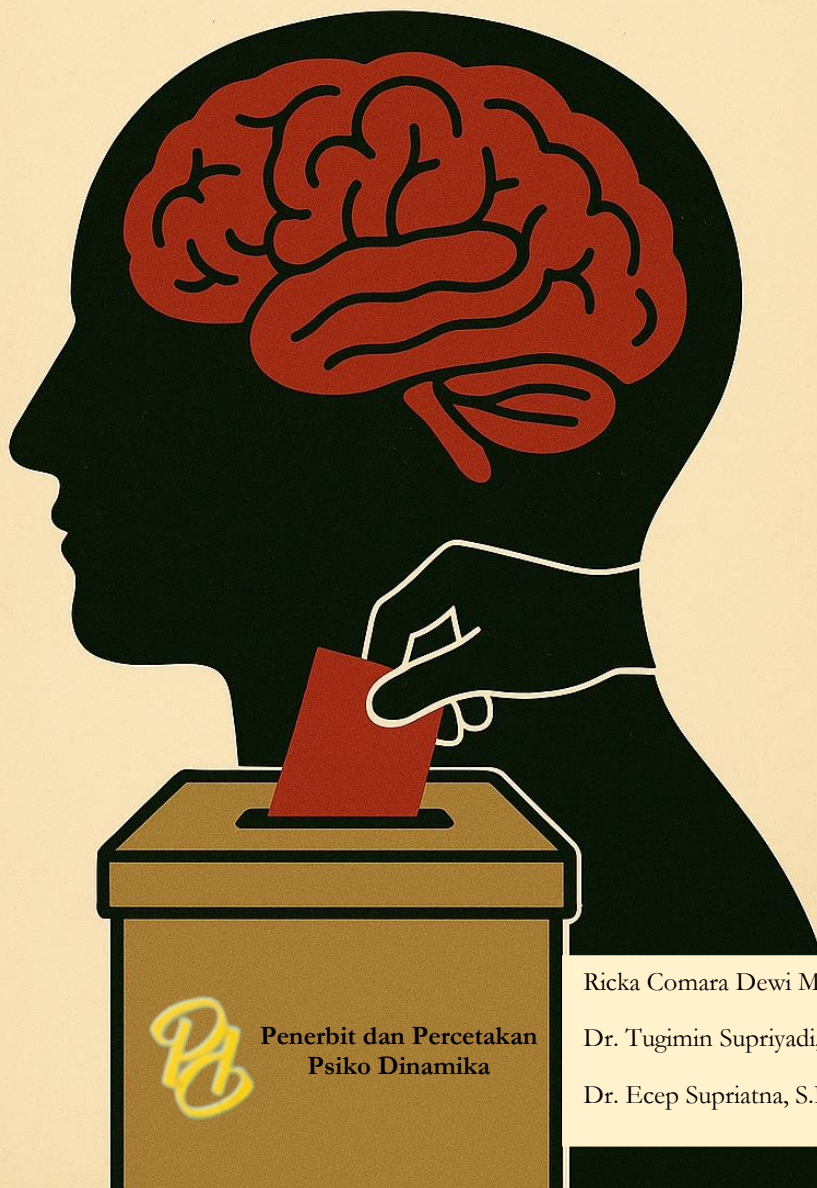


PSIKOLOGI POLITIK KONTEMPORER



Penerbit dan Percetakan
Psiko Dinamika

Ricka Comara Dewi M.Psi Psikolog

Dr. Tugimin Supriyadi, Psikolog

Dr. Ecep Supriatna, S.Psi., M.Pd

PSIKOLOGI POLITIK KONTEMPORER

PENULIS:

Ricka Comara Dewi M.Psi Psikolog

Dr. Tugimin Supriyadi, Psikolog

Dr. Ecep Supriatna, S.Psi., M.Pd



Psiko Dinamika

2025

PSIKOLOGI POLITIK KONTEMPORER

Penulis : Ricka Comara Dewi M.Psi Psikolog
Dr. Tugimin Supriyadi, Psikolog
Dr. Ecep Supriatna, S.Psi., M.Pd

Kata Pengantar : Prof. Adi Fahrudin, Ph.D

Kontributor : Dr. Kus Hanna Rahmi, M.Psi., Psikolog
Dr. Ecep Supriatna, S.Psi., M.Pd

Editor dan Layout : Dr. Arfian. M.Si
Tiara Anggita Perdini, M.Psi., Psikolog

Design Cover : Tiara Anggita Perdini, M.Psi., Psikolog

ISBN : 978-623-97210-2-2

Cetakan Pertama : Januari 2026

Penerbit : Psiko Dinamika

**Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun
tanpa izin penerbit!**

KATA PENGANTAR

Politik dan psikologi adalah dua disiplin ilmu yang sering kali tampak terpisah, namun kenyataannya keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam kehidupan sosial kita. Setiap keputusan politik, baik yang dibuat oleh individu, kelompok, maupun negara, tidak terlepas dari proses-proses psikologis yang mendalam. Dalam konteks ini, pemahaman tentang psikologi politik menjadi kunci untuk mengungkap bagaimana persepsi, emosi, dan motivasi mempengaruhi perilaku politik dalam masyarakat kontemporer.

Buku ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji hubungan antara psikologi dan politik, serta untuk menggali dinamika psikologis yang membentuk sikap, keputusan, dan tindakan politik. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, pengaruh psikologi terhadap politik semakin kompleks dan menarik untuk dipelajari. Dari cara individu memilih pemimpin, hingga bagaimana kelompok masyarakat terlibat dalam gerakan sosial dan politik, semua itu dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang mendalam.

Dalam buku ini, kita akan mempelajari berbagai teori psikologi yang relevan dalam konteks politik, serta mengidentifikasi bagaimana fenomena politik kontemporer—seperti populisme, polaritas politik, dan pengaruh media sosial—berkaitan erat dengan aspek psikologis yang ada dalam diri individu dan kelompok. Tidak

hanya itu, kita juga akan mengeksplorasi peran kepemimpinan, konflik politik, dan tantangan psikologis yang muncul dalam demokrasi modern.

Pentingnya pemahaman terhadap psikologi politik ini tidak hanya terbatas pada para akademisi atau politisi, tetapi juga bagi setiap individu yang ingin memahami lebih dalam bagaimana politik bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi siapa saja yang tertarik untuk mengkaji politik melalui lensa psikologis, serta memberikan wawasan baru mengenai bagaimana psikologi politik memengaruhi hubungan sosial dan politik dalam masyarakat saat ini.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami lebih jauh mengenai interaksi antara psikologi dan politik, serta membuka ruang bagi diskusi dan kajian lebih lanjut di bidang yang sangat dinamis ini.

Selamat membaca, dan semoga buku ini dapat menambah pemahaman serta memperkaya wawasan Anda dalam menghadapi tantangan politik di masa kini.

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
Siapa Generasi Z?	1
Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Perilaku Politik Generasi Z	4
Media Sosial dan Digital Political Engagement	9
Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Generasi Z	13
Tantangan Keterlibatan Politik Generasi Z	17
Peluang dan Arah Dukungan untuk Generasi Z	21
Studi Kasus Indonesia: Narasi Mobilisasi Politik Generasi Z dalam Demo Besar-Besaran Terbaru.....	24
BAB I.....	29
PENGANTAR PSIKOLOGI POLITIK.....	29
A. Definisi Psikologi Politik	30
B. Sejarah Psikologi Politik.....	31
C. Hubungan Antara Psikologi dan Politik.....	33

D. Pentingnya Studi Psikologi Politik dalam Konteks Kontemporer.....	35
Kesimpulan.....	39
BAB II	41
PSIKOLOGI INDIVIDU DALAM POLITIK	41
A. Teori-Teri Psikologi Sosial dalam Politik	42
B. Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Pemilih: Kognisi dan Emosi.....	45
C. Persepsi Politik dan Pengaruhnya terhadap Preferensi Politik.....	48
D. Personalitas dan Kepemimpinan dalam Politik.....	50
E. Pengaruh Media Sosial terhadap Psikologi Pemilih	53
Kesimpulan.....	55
BAB III.....	57
KEKANAK-KANAKKAN DAN KEDEWASAAN DALAM BERPOLITIK.....	57
A. Cermin Kematangan Demokrasi	58
B. Politik Kekanak-kanakan: Cermin Imaturitas Demokrasi	60
C. Kedewasaan dalam Berpolitik: Pilar Demokrasi Sehat	62
D. Strategi Membangun Kedewasaan Politik	65
Kesimpulan.....	67

BAB IV.....	69
PSIKOLOGI KELOMPOK DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM POLITIK	69
A. Pengaruh Identitas Sosial terhadap Perilaku Politik.....	72
B. Pemikiran Kelompok dan Keputusan Politik	75
C. Konformitas, Kepatuhan, dan Radikalisasi dalam Kelompok	77
D. Fenomena Populisme dan Pemimpin Karismatik	80
E. Peran Media dalam Pembentukan Opini Publik	82
Kesimpulan.....	85
BAB V	87
KONFLIK, KEKUASAAN, DAN AGRESI DALAM PSIKOLOGI POLITIK	87
A. Teori Konflik dalam Psikologi Politik.....	89
B. Kekuasaan, Otoritas, dan Legitimasi.....	91
C. Agresi Politik dan Kekerasan Kolektif	94
D. Dinamika “Kami vs Mereka”: Polarisasi Politik	96
E. Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi Politik	97
F. Studi Kasus Lokal	100
G. Radikalisasi Politik dan Agresi di Media Sosial	102

H. Rekonsiliasi Politik Pasca-Reformasi: Dari Trauma ke Transisi	105
Kesimpulan.....	108
BAB VI.....	111
PSIKOLOGI POLITIK DALAM ERA DIGITAL	111
A. Media Sosial Sebagai Arena Politik Baru.....	113
B. Algoritma, Disinformasi, dan Manipulasi Psikologis	116
C. Emosi Politik dan Konten Viral.....	118
D. Aktivisme Digital dan Mobilisasi Politik Online.....	120
E. Tantangan Etika dan Regulasi Politik Digital	123
F. Studi Kasus Lokal	125
Kesimpulan.....	140
BAB VII	143
DEMOKRASI DAN PSIKOLOGI PARTISIPASI	143
A. Psikologi Partisipasi Politik: Mengapa Orang Terlibat?.....	145
B. Motivasi di Balik Aktivisme Politik dan Protes Sosial.....	147
C. Demokrasi Dalam Konteks Psikologi Politik	150
D. Efek Desinformasi dan Politisasi dalam Demokrasi	153
E. Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi....	156
F. Studi Kasus Lokal	160

Kesimpulan.....	167
Kuis Reflektif	171
BAB VIII.....	173
TEKNOLOGI, MEDIA SOSIAL, DAN PSIKOLOGI POLITIK	173
A. Pengaruh Teknologi Terhadap Psikologi Politik Kontemporer	175
B. Media Sosial Sebagai Alat Pengaruh Dalam Politik.....	177
C. Psikologi di Balik Manipulasi Media dalam Politik.....	179
D. Kecenderungan Polarisasi dan Echo Chambers di Media Sosial	182
E. Dampak Media Sosial terhadap Persepsi dan Opini Publik..	185
Kesimpulan.....	188
Kuis Reflektif	192
BAB IX.....	193
PSIKOLOGI POLITIK GLOBAL	193
A. Perbedaan Psikologi Politik di Berbagai Negara	194
B. Konflik Internasional dan Psikologi Antar-Negara.....	198
C. Pengaruh Budaya dalam Membentuk Perspektif Politik Global	201

D. Psikologi dalam Hubungan Internasional dan Diplomasi.....	204
E. Dampak Psikologi Politik dalam Konflik Global dan Perubahan Sosial.....	208
Kesimpulan.....	211
BAB X.....	215
REFLEKSI MASA DEPAN PSIKOLOGI POLITIK	215
A. Psikologi Politik sebagai Disiplin Interdisipliner.....	217
B. Tantangan Kontemporer dalam Psikologi Politik.....	219
C. Arah Masa Depan Psikologi Politik.....	222
Pesan Penutup.....	225
DAFTAR PUSTAKA.....	227
GLOSARIUM.....	241
TENTANG PENULIS	243

PENDAHULUAN

Siapa Generasi Z?

Generasi Z umumnya merujuk pada individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 (Pew Research Center, 2019). Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya dalam dunia yang terkoneksi internet, smartphone, dan media sosial sejak usia sangat dini. Karena itu, mereka sering disebut sebagai digital natives (Prensky, 2001). Lingkungan sosial-teknologis yang unik inilah yang membentuk pola pikir, perilaku, serta preferensi politik yang berbeda dibanding generasi sebelumnya, termasuk Generasi X dan Millennials. Dalam kajian psikologi politik, pemahaman tentang karakteristik dasar Generasi Z penting karena generasi ini sedang memasuki panggung politik dan mendominasi komposisi pemilih di Indonesia. Secara psikologis, Generasi Z dikenal memiliki kemampuan untuk mengolah informasi secara cepat dan kritis, karena terbiasa dengan arus informasi digital yang tak terbatas. Mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten, baik melalui TikTok, YouTube, maupun platform lainnya. Menurut Twenge (2017), paparan teknologi sejak dini mempengaruhi gaya berpikir, cara berkomunikasi, dan cara mereka memaknai isu-isu sosial-politik. Berbeda dari generasi sebelumnya yang memperoleh informasi politik

melalui televisi atau surat kabar, Gen Z menerima informasi secara simultan dari berbagai sumber dan mempercayai konten yang lebih visual dan naratif.

Kondisi sosial global yang mereka alami juga turut membentuk identitas politik mereka. Generasi Z tumbuh di tengah isu-isu besar seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, gerakan keadilan rasial, perkembangan kecerdasan buatan, serta polarisasi politik (Miller & Twenge, 2020). Berbagai studi menunjukkan bahwa generasi ini memiliki orientasi nilai yang lebih progresif, terutama terkait keadilan sosial, lingkungan, hak minoritas, dan kesetaraan gender (Dimock & Wike, 2020). Hal ini tidak semata-mata karena mereka “lebih liberal”, tetapi karena mereka memiliki akses terhadap perspektif global dan pengalaman digital yang memperluas empati antargenerasi dan antarbudaya. Dalam konteks Indonesia, Generasi Z mulai menjadi kekuatan politik yang signifikan. Pada Pemilu 2024, data KPU menunjukkan bahwa pemilih kategori Gen Z dan Millennials mencapai lebih dari 50% total pemilih. Fakta demografis ini menandakan bahwa cara pandang Gen Z terhadap politik akan sangat menentukan arah demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh LIPI (2023) menunjukkan bahwa Gen Z Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap institusi politik formal dibanding generasi yang lebih tua, namun pada saat yang sama menunjukkan minat yang besar pada

isu-isu publik yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, lapangan kerja, lingkungan, dan korupsi.

Salah satu karakteristik utama Gen Z dalam ranah politik adalah preferensi mereka terhadap otentisitas. Generasi ini lebih mempercayai pemimpin atau figur publik yang dinilai jujur, transparan, dan mampu menampilkan sisi personal (Hobbs & Lajevardi, 2020). Komunikasi politik yang formal, penuh jargon, atau terlalu “dibungkus” tidak lagi efektif. Mereka lebih responsif terhadap pesan politik yang disampaikan melalui format visual, naratif, dan emosional misalnya video pendek, podcast, atau konten story-telling. Hal ini sejalan dengan temuan Social Media Lab (2022) bahwa Gen Z cenderung mempercayai figur yang mampu membangun koneksi emosional, bukan sekadar menawarkan janji politik. Gen Z juga memandang politik sebagai bagian dari identitas diri. Menurut penelitian Moffitt (2018), anak muda masa kini terlibat dalam identity politics bukan hanya karena orientasi ideologi, tetapi juga sebagai ekspresi identitas personal dan kelompok. Mereka memaknai politik melalui pilihan gaya hidup, konten media sosial, hingga preferensi konsumsi. Bentuk-bentuk partisipasi politik mereka sering kali tidak muncul dalam bentuk konvensional, seperti keanggotaan partai atau organisasi politik, tetapi melalui aktivisme digital, gerakan hashtag, petisi online, hingga consumer activism. Fenomena ini juga ditemukan dalam survei UNICEF Indonesia (2022), yang

menunjukkan bahwa keterlibatan politik Gen Z lebih tinggi dalam ranah digital daripada ranah formal.

Namun, dinamika ini membawa tantangan tersendiri. Akses terhadap banjir informasi membuat Generasi Z rentan terhadap misinformasi, echo chambers, dan radikalisasi algoritmik (Pariser, 2011). Banyak dari mereka mengalami political fatigue atau kelelahan politik akibat intensitas konten politik di media sosial. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam meningkatnya rasa ketidakpercayaan terhadap aktor politik, tetapi bukan terhadap isu politik itu sendiri. Ana (2023) menyebut fenomena ini sebagai “apatisme selektif”, yaitu ketertarikan pada isu, tetapi keengganan terlibat dalam proses politik formal. Dengan demikian, memahami siapa Generasi Z merupakan fondasi penting dalam membaca perilaku politik mereka. Gen Z bukan generasi yang apatis, melainkan generasi yang mencari bentuk baru dalam berpolitik: lebih cair, lebih horizontal, lebih digital, dan lebih berbasis nilai. Dengan memahami karakteristik kognitif, emosional, sosial, dan digital mereka, kita dapat memprediksi bagaimana mereka akan mempengaruhi lanskap politik Indonesia.

Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Perilaku Politik Generasi Z

Perilaku politik Generasi Z dibentuk oleh berbagai faktor psikologis yang terkait dengan perkembangan identitas, nilai-nilai

personal, pengalaman sosial-digital, dan dinamika emosional. Tidak seperti generasi terdahulu, pengalaman politik Gen Z sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan teknologi, keragaman sosial, dan perubahan budaya global. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku politik mereka menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana generasi ini berpikir, bereaksi, dan terlibat dalam isu-isu publik. Pada bagian ini, akan dibahas tiga faktor psikologis utama: identitas sosial, nilai-nilai personal, dan peran emosi dalam keterlibatan politik.

a. Identitas Sosial dan Pencarian Jati Diri

Menurut teori Social Identity Theory yang dikembangkan Tajfel dan Turner (1979), individu membangun identitasnya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Proses ini sangat relevan untuk Generasi Z yang sedang berada pada fase perkembangan identitas (Erikson, 1968). Pada masa remaja dan awal dewasa, mereka aktif mengeksplorasi berbagai kelompok sosial dan ideologi sebagai bagian dari pencarian jati diri. Dalam konteks politik, identitas ini dapat terbentuk melalui komunitas digital, subkultur daring, kelompok aktivis, atau kelompok-kelompok berbasis minat tertentu. Penelitian Boulianne & Theocharis (2020) menunjukkan bahwa identitas kelompok berbasis digital memiliki pengaruh kuat terhadap preferensi politik anak muda. Media sosial memberikan ruang bagi Gen Z

untuk menemukan kelompok yang sejalan dengan nilai mereka, sehingga membentuk apa yang disebut sebagai digital tribes. Kelompok ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga memengaruhi bagaimana mereka menafsirkan isu politik. Ketika identitas sosial mereka sudah melekat pada kelompok tertentu, pandangan politik pun cenderung mengikuti preferensi kelompok tersebut. Di Indonesia, fenomena ini tampak dalam kelompok-kelompok aktivisme daring seperti komunitas lingkungan, kelompok literasi digital, komunitas kreator konten politik, hingga gerakan sosial seperti #ReformasiDikorupsi. Kelompok-kelompok ini menjadi ruang bagi Gen Z untuk mengekspresikan identitas sosial sekaligus identitas politik. Dengan demikian, identitas sosial memainkan peran fundamental dalam membentuk perilaku politik generasi ini.

b. Nilai-Nilai Personal (Personal Values)

Nilai-nilai personal merupakan salah satu prediktor paling kuat dari perilaku politik. Menurut teori Schwartz (1992), nilai-nilai personal seperti universalitas, kesejahteraan sosial, kebebasan, dan keadilan memengaruhi pilihan individu dalam menilai kebijakan publik dan aktor politik. Generasi Z memiliki orientasi nilai yang cenderung lebih progresif dibanding generasi sebelumnya (Twenge, et al, 2019). Paparan mereka terhadap isu global melalui media sosial telah

membuat mereka lebih peduli pada isu kesetaraan, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial. Menurut survei global oleh Deloitte (2023), Gen Z menempatkan isu perubahan iklim, kesehatan mental, ketidaksetaraan sosial, dan korupsi sebagai nilai yang sangat penting dan menjadi dasar dalam perilaku politik mereka. Hal ini memengaruhi keputusan politik mereka, mulai dari siapa yang mereka pilih hingga bagaimana mereka mengekspresikan opini. Di Indonesia, beberapa penelitian (misalnya Yusoff, 2022; LIPI, 2023) menunjukkan bahwa Generasi Z lebih mengutamakan nilai kejujuran, transparansi, dan relevansi isu dalam memilih pemimpin atau mendukung gerakan sosial. Nilai-nilai personal ini juga menjelaskan mengapa Gen Z lebih suka tokoh politik yang dianggap “dekat” dengan masalah sehari-hari mereka dan menolak gaya politik lama yang dianggap penuh retorika. Mereka cenderung memprioritaskan nilai substansial seperti keadilan, kepedulian, atau keberlanjutan lingkungan dalam mendukung isu politik, bukan sekadar identitas partai atau simbol ideologi lama.

c. Emosi dalam Keterlibatan Politik

Emosi merupakan faktor kunci dalam membentuk perilaku politik. Dalam psikologi politik, emosi seperti harapan, kemarahan, ketakutan, dan empati memainkan peran besar dalam mempengaruhi persepsi dan tindakan politik (Marcus,

et al, 2000). Generasi Z, sebagai generasi yang sangat terhubung secara digital, mengalami intensitas emosi politik yang lebih tinggi karena paparan konten yang bersifat emosional di media sosial. Emosi kemarahan, misalnya, sering menjadi pemicu mobilisasi politik Gen Z. Hal ini terlihat dalam berbagai gerakan sosial anak muda di seluruh dunia, seperti di Indonesia, demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada 2019. Konten visual yang menggugah emosi sering kali menjadi pemicu utama keterlibatan mereka. Penelitian Vraga & Bode (2021) menemukan bahwa konten politik yang bersifat emosional memiliki tingkat penyebaran lebih tinggi di kalangan anak muda, sehingga memperkuat dinamika politik berbasis emosi. Selain kemarahan, emosi harapan (hope) juga memengaruhi perilaku politik Gen Z. Mereka mendukung gerakan atau tokoh yang memberikan optimisme terhadap perubahan, bukan sekadar retorika. Tokoh politik yang mampu menghadirkan visi masa depan dan memberikan gambaran perubahan yang konkret lebih mudah mendapat dukungan dari generasi ini. Di sisi lain, emosi ketakutan dan kecemasan juga memainkan peran, terutama dalam konteks isu disinformasi atau potensi kehilangan kebebasan digital. Secara keseluruhan, emosi yang intens dan cepat menyebar melalui media sosial membuat perilaku politik Gen Z lebih dinamis, responsif, dan terkadang impulsif. Namun, justru

karakteristik emosional inilah yang sering memicu keterlibatan politik mereka secara aktif.

Media Sosial dan Digital Political Engagement

Media sosial merupakan elemen paling dominan dalam kehidupan Generasi Z dan menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku politik mereka. Gen Z tidak hanya menggunakan media sosial untuk hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, membentuk identitas, dan mengekspresikan pendapat politik. Dalam perspektif psikologi politik, media sosial menjadi arena baru yang memengaruhi persepsi, emosi, dan tindakan politik melalui proses kognitif dan sosial yang belum pernah muncul pada generasi sebelumnya. Bagian ini membahas tiga aspek utama: media sosial sebagai ruang partisipasi politik, bentuk ekspresi politik online, serta risiko dan tantangan digital yang dihadapi generasi ini. Generasi Z menjadikan media sosial sebagai ruang utama untuk berpartisipasi dalam politik. Platform seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), YouTube, dan podcast menjadi sumber utama informasi politik mereka (Pew Research Center, 2022). Berbeda dari generasi sebelumnya yang memperoleh informasi dari media konvensional, Gen Z lebih mempercayai informasi yang disampaikan melalui konten kreatif, video pendek, atau percakapan informal yang dibagikan oleh

kreator favorit mereka. Hal ini menggeser struktur komunikasi politik dari model top-down menjadi horizontal dan partisipatif.

Menurut Theocharis & Van Deth (2018), digital engagement membuat anak muda lebih mudah mengakses isu politik, berinteraksi dengan tokoh publik, dan terlibat dalam diskusi publik. Proses ini meningkatkan rasa efikasi politik (*political efficacy*), yaitu keyakinan bahwa suara mereka memiliki dampak. Penelitian Ha et al. (2021) menunjukkan bahwa Gen Z yang aktif di media sosial memiliki probabilitas lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivisme digital dan gerakan sosial. Di Indonesia, fenomena ini sangat terlihat dalam Pemilu 2024 ketika TikTok menjadi platform politik paling berpengaruh bagi pemilih muda. Banyak pemilih Gen Z mengandalkan konten kreator politik, *micro-influencers*, dan analisis singkat untuk memahami isu politik, bukan dari debat formal atau berita panjang. Media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang partisipasi politik yang mengutamakan kreativitas, humor, dan kedekatan emosional.

Selain itu Ekspresi politik online adalah bentuk keterlibatan politik yang paling menonjol pada Generasi Z. Bentuk ekspresi ini mencakup posting pendapat, re-share konten, membuat video edukasi politik, hingga memproduksi meme politik. Dalam psikologi politik, bentuk partisipasi ini disebut *expressive political participation* (Gil de Zúñiga et al., 2014), yaitu partisipasi yang berorientasi pada identitas,

nilai, dan ekspresi diri, bukan hanya pada kegiatan politik formal. Gen Z menggunakan media sosial sebagai panggung identitas politik. Mereka mengekspresikan pandangan politik melalui estetika visual—misalnya gaya grafis, warna, atau gaya humor tertentu yang populer di TikTok atau Instagram. Fenomena ini sering disebut sebagai *political aesthetic* (Abidin, 2021), yaitu bagaimana politik diintegrasikan ke dalam gaya hidup digital melalui simbol, narasi, dan gaya kreatif.

Konten politik yang dibuat oleh Gen Z sering kali bersifat naratif dan mengandalkan *storytelling*. Mereka menggabungkan humor, musik, filter, atau tren viral untuk menjelaskan isu politik dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini membuat politik menjadi lebih dekat dan relevan bagi sesama anak muda. Di Indonesia, banyak kreator TikTok, YouTuber edukasi, dan akun satire politik berperan dalam meningkatkan literasi politik anak muda. Selain itu, Gen Z tidak hanya menjadi konsumen konten politik, tetapi juga produsen. Mereka menciptakan ruang politik baru melalui video kreatif, infografis, podcast, hingga thread informatif. Fenomena ini membuat mereka lebih aktif dan inovatif dalam mengkonstruksi narasi politik, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi publik secara luas.

Walaupun media sosial menawarkan peluang besar untuk keterlibatan politik, generasi ini juga menghadapi risiko yang signifikan. Salah satu risiko utama adalah *echo chamber*, yaitu situasi ketika individu hanya terekspos pada pandangan yang sejalan dengan

keyakinannya (Sunstein, 2017). Algoritma media sosial memperkuat kecenderungan ini dengan menampilkan konten yang sesuai preferensi pengguna. Akibatnya, Gen Z dapat semakin terpolarisasi karena jarang terekspos pandangan yang berbeda. Risiko lainnya adalah disinformasi. Menurut Wardle dan Derakhshan (2017), disinformasi mudah menyebar karena konten emosional lebih cepat viral, sementara Gen Z lebih rentan terhadap konten yang menyentuh emosi. Penelitian Bernstein et al. (2022) menunjukkan bahwa anak muda sering kesulitan membedakan informasi terpercaya dari konten viral yang manipulatif. Di Indonesia, kasus penyebaran hoaks politik di platform seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram meningkat terutama menjelang pemilu, dan banyak menargetkan pemilih muda.

Selain itu, media sosial dapat memicu polarisasi afektif, yaitu kebencian terhadap kelompok politik lawan. Menurut Iyengar & Krupenkin (2018), polarisasi afektif diperkuat oleh interaksi digital yang emosional dan penuh konflik, terutama dalam komentar atau diskusi online. Gen Z sering kali menghadapi situasi di mana diskusi politik dapat berubah menjadi perdebatan personal, memicu stres digital dan kelelahan politik (*political fatigue*). Konten politik yang berlebihan juga membuat sebagian Gen Z mengalami *digital burnout*. UNICEF Indonesia (2022) menemukan bahwa banyak anak muda merasa kewalahan dengan intensitas informasi dan konflik politik di media sosial. Kondisi ini menyebabkan sebagian dari mereka

mengambil jarak dari politik formal meskipun tetap peduli terhadap isu-isu sosial.

Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Generasi Z

Perilaku politik Generasi Z menunjukkan pergeseran yang signifikan dibanding generasi sebelumnya. Jika generasi lebih tua cenderung terlibat melalui mekanisme politik formal seperti partisipasi dalam partai politik atau menghadiri kampanye secara langsung, Generasi Z memilih bentuk keterlibatan politik yang lebih fleksibel, kreatif, dan berbasis teknologi. Dalam kajian psikologi politik, bentuk perilaku politik Gen Z dapat dipahami melalui tiga kategori utama: partisipasi politik konvensional, partisipasi politik non-konvensional, dan aktivisme berbasis identitas (*activism-as-identity*). Ketiga kategori ini menggambarkan bagaimana Gen Z menavigasi ruang politik yang semakin kompleks dalam era digital.

a. Partisipasi Politik Konvensional

Partisipasi politik konvensional mencakup aktivitas yang sudah lama dikenal dan dilembagakan, seperti memberikan suara dalam pemilu, bergabung dalam organisasi politik, atau menghadiri kampanye politik. Generasi Z memiliki karakteristik unik dalam bentuk partisipasi ini. Mereka tidak sepenuhnya menolak politik formal, tetapi menunjukkan pola yang berbeda. Menurut Nielsen & Vaccari (2021), tingkat

minat Gen Z dalam pemilu cenderung meningkat ketika mereka melihat isu yang relevan secara personal, misalnya isu terkait pekerjaan, pendidikan, atau lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil survei oleh KPU (2024), yang menunjukkan bahwa pemilih muda Indonesia turut menentukan arah pemilu dengan partisipasi yang cukup tinggi pada beberapa wilayah urban, terutama ketika kampanye disampaikan dengan gaya yang kreatif dan dekat dengan bahasa anak muda. Namun demikian, keanggotaan partai politik di kalangan Gen Z masih sangat rendah. Penelitian Theocharis (2015) menunjukkan bahwa anak muda tidak tertarik pada struktur politik yang hierarkis dan birokratis. Mereka lebih memilih keterlibatan yang bersifat langsung, cepat, dan relevan. Di Indonesia, generasi ini jarang terlibat sebagai anggota partai, tetapi mereka berpartisipasi sebagai relawan kampanye digital, pembuat konten, atau tenaga kreatif dalam tim media sosial kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi konvensional tetap dilakukan oleh Gen Z, tetapi dengan cara yang lebih modern dan berbasis minat, bukan sebagai bentuk loyalitas ideologis.

b. Partisipasi Politik Non-Konvensional

Partisipasi politik non-konvensional merupakan bentuk keterlibatan politik yang tidak terikat pada struktur formal dan biasanya lebih kreatif, spontan, dan berbasis isu. Bentuk ini

sangat dominan pada Generasi Z karena sesuai dengan gaya hidup digital mereka. Menurut Van Deth (2014), bentuk partisipasi non-konvensional mencakup aksi demonstrasi, petisi online, boikot produk, gerakan sosial, aktivisme digital, dan kampanye berbasis komunitas. Gen Z sangat aktif dalam bentuk partisipasi ini, baik secara online maupun offline. Di tingkat global, Gen Z terlibat dalam berbagai gerakan besar seperti Fridays for Future yang dipelopori Greta Thunberg, Black Lives Matter, dan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Mereka turut menyebarkan informasi, membuat poster digital, dan memobilisasi dukungan melalui TikTok dan Instagram. Penelitian Collin et al. (2020) menunjukkan bahwa generasi ini lebih responsif terhadap gerakan sosial yang berbasis nilai moral dan emosional. Di Indonesia, bentuk partisipasi non-konvensional tampak dalam gerakan #ReformasiDikorupsi (2019), petisi online terkait RUU bermasalah, kampanye digital soal lingkungan, serta berbagai gerakan yang digagas oleh komunitas anak muda. Generasi Z menggunakan platform digital bukan hanya untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga mengorganisir aksi nyata di lapangan. Perilaku boikot dan consumer activism juga semakin populer. Gen Z lebih sering menghubungkan nilai moral dengan pilihan konsumsi. Mereka mendukung atau menolak merek tertentu berdasarkan isu etika, lingkungan,

atau keberpihakan politik perusahaan. Menurut Deloitte (2022), 36% Gen Z di Asia Tenggara pernah melakukan boikot terhadap perusahaan karena isu moral. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik Gen Z lebih cair dan beragam, tidak terbatas pada aktivitas formal.

c. Activism-as-Identity (Aktivisme sebagai Identitas)

Salah satu temuan paling menarik dalam kajian psikologi politik adalah fenomena activism-as-identity, yaitu ketika keterlibatan politik menjadi bagian dari identitas diri. Menurut Moffitt & Tormey (2020), bagi Generasi Z, aktivisme bukan sekadar tindakan politik, tetapi cara mengekspresikan siapa mereka. Fenomena ini diperkuat oleh budaya media sosial di mana identitas sering dikonstruksi melalui unggahan, estetika visual, dan narasi personal. Gen Z tidak hanya membagikan opini politik, tetapi juga membangun brand pribadi sebagai seseorang yang peduli isu tertentu, misalnya isu gender equality, climate justice, atau anti-korupsi. Dalam konteks Indonesia, banyak anak muda yang memposisikan diri sebagai aktivis lingkungan, aktivis pendidikan, kreator konten politik, atau penggerak kampanye sosial. Mereka memadukan aktivisme dengan kreativitas dan gaya hidup, menjadikan politik sebagai bagian dari identitas digital mereka. Penelitian Abidin (2021) menunjukkan bahwa estetika digital, warna, font, gaya visual, hingga music menjadi bagian dari cara Gen

Z menampilkan identitas politik. Aktivisme menjadi lebih personal, ekspresif, dan emosional. Hal ini tidak berarti bahwa aktivisme mereka dangkal; justru sebaliknya, identitas politik yang kuat dapat menjadi landasan keterlibatan jangka panjang. Selain itu, activism-as-identity juga memunculkan bentuk solidaritas baru. Solidaritas tidak lagi hanya dibangun melalui keanggotaan organisasi fisik, tetapi melalui kesamaan nilai dan simbol yang dibagikan secara digital. Identitas ini sering kali meningkatkan motivasi untuk terlibat dalam isu-isu publik, terutama ketika isu tersebut menyentuh nilai moral yang penting bagi mereka.

Tantangan Keterlibatan Politik Generasi Z

Meskipun Generasi Z memiliki potensi besar dalam mengubah lanskap politik melalui kreativitas digital, idealisme, dan keberanian moral, mereka juga menghadapi berbagai tantangan psikologis, sosial, dan struktural yang dapat menghambat keterlibatan politik mereka. Tantangan-tantangan ini tidak hanya memengaruhi partisipasi politik formal, tetapi juga memengaruhi cara mereka memaknai politik, membangun identitas politik, serta mempertahankan komitmen jangka panjang terhadap isu publik. Dalam bagian ini, empat tantangan utama akan dibahas: apatisme

politik, distrust terhadap institusi, political fatigue, dan preferensi terhadap bentuk partisipasi yang spontan.

a. Apatisme Politik dan Political Cynicism

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Generasi Z adalah apatisme politik. Apatisme ini bukan berarti mereka tidak peduli terhadap isu publik, melainkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem politik formal. Menurut Henn & Foard (2014), anak muda masa kini menunjukkan tingkat political cynicism yang tinggi, yaitu keyakinan bahwa aktor politik tidak mampu atau tidak mau mewakili kepentingan publik. Survei UNICEF Indonesia (2022) juga menemukan bahwa banyak Gen Z merasa politik penuh konflik, penuh korupsi, dan jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Apatisme ini dipicu oleh dua hal: Kekecewaan terhadap institusi politik yang dianggap tidak responsive dan Ketidakjelasan dampak nyata dari partisipasi formal, seperti pemilu. Fenomena ini disebut selective apathy oleh Ana (2023), yaitu kondisi ketika anak muda peduli isu tetapi skeptis terhadap proses dan aktor politik formal. Apatisme jenis ini membuat sebagian Gen Z lebih memilih aktivisme sosial daripada politik kelembagaan.

b. Distrust terhadap Institusi Politik

Generasi Z tumbuh dalam era ketika berbagai skandal politik, korupsi, dan konflik elite mudah tersebar melalui media

sosial. Menurut Edelman Trust Barometer (2023), tingkat kepercayaan anak muda global terhadap pemerintah adalah yang terendah dibanding semua kelompok umur. Ketidakpercayaan ini berakar pada pengalaman mereka yang melihat institusi gagal menyelesaikan masalah besar seperti ketidaksetaraan ekonomi, perubahan iklim, dan akses pendidikan. Di Indonesia, laporan LIPI (2023) menunjukkan bahwa Gen Z memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap lembaga seperti DPR, partai politik, dan sebagian institusi penegak hukum. Distrust ini muncul karena Persepsi bahwa politik bersifat transaksional. Kurangnya representasi anak muda dalam proses pengambilan kebijakan. Anggapan bahwa politisi tidak memahami aspirasi generasi digital. Akibat distrust ini, Gen Z cenderung menghindari partisipasi politik formal dan lebih memilih jalur alternatif seperti komunitas sosial, gerakan digital, atau advokasi berbasis isu.

c. Political Fatigue dan Kelelahan Informasi

Arus informasi yang sangat cepat dan intens di media sosial membuat Generasi Z rentan mengalami political fatigue atau kelelahan politik. Menurut penelitian Chan (2020), paparan terus-menerus terhadap berita politik yang emosional atau konflik online dapat memicu stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Hal ini diperparah oleh algoritma media sosial yang menampilkan konten politik secara repetitif. UNICEF (2022)

mencatat bahwa banyak anak muda Indonesia merasa kewalahan oleh banyaknya debat politik, hoaks, dan konflik identitas yang beredar di media sosial. Kelelahan ini membuat mereka menarik diri dari diskusi politik, bahkan menonaktifkan akun media sosial untuk sementara. Political fatigue berdampak pada Menurunnya motivasi untuk mengikuti perkembangan politik. Hilangnya minat untuk terlibat dalam isu publik. Menghindari perdebatan politik karena dianggap menguras emosi. Fenomena ini menghambat perkembangan keterlibatan politik yang sehat pada Gen Z karena mereka lebih fokus menghindari konflik daripada memahami isu secara mendalam.

d. Preferensi terhadap Partisipasi yang Spontan dan Tidak Terstruktur

Generasi Z terbiasa dengan budaya instan, fleksibel, dan berbasis kreativitas. Hal ini memengaruhi cara mereka berpolitik. Menurut penelitian Sloam & Henn (2019), anak muda lebih suka bentuk partisipasi politik yang bersifat spontan dan tidak terikat struktur formal. Mereka enggan mengikuti mekanisme politik tradisional yang dianggap lambat dan birokratis. Di Indonesia, hal ini terlihat dari Minimnya minat Gen Z untuk bergabung dalam partai politik. Kecenderungan mengikuti gerakan ad-hoc seperti petisi online. Aktivisme melalui konten kreatif ketimbang organisasi

fisik. Keterlibatan mereka sangat bergantung pada momentum dan viralitas isu. Jika isu tersebut hilang dari lini masa, biasanya keterlibatan mereka ikut menurun. Fenomena ini disebut episodic engagement oleh Banaji & Buckingham (2013). Di satu sisi, gaya partisipasi ini membuat Gen Z responsif dan kreatif dalam menyuarakan pendapat. Namun di sisi lain, ini dapat menjadi tantangan karena komitmen jangka panjang dalam demokrasi memerlukan konsistensi, bukan hanya keterlibatan berdasarkan tren.

Peluang dan Arah Dukungan untuk Generasi Z

Meskipun Generasi Z menghadapi berbagai tantangan dalam keterlibatan politik, mereka juga memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan transformatif dalam demokrasi Indonesia dan dunia. Dengan karakteristik digital-native, nilai-nilai progresif, kepedulian terhadap isu publik, serta kemampuan beradaptasi yang tinggi, Gen Z dapat menjadi agen perubahan yang signifikan. Namun, potensi ini hanya dapat berkembang optimal jika mereka memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan ekosistem digital. Pada bagian ini akan dibahas tiga peluang utama serta arah dukungan yang dapat memperkuat keterlibatan politik Generasi Z.

Peluang pertama yang sangat penting adalah penguatan pendidikan politik dan literasi digital. Gen Z mengakses informasi melalui media sosial dan internet, sehingga proses belajar mereka berbeda dari generasi sebelumnya. Menurut Kahne & Bowyer (2018), pendidikan politik tradisional yang menekankan hafalan konsep formal tidak lagi relevan untuk generasi ini. Mereka membutuhkan pendekatan baru yang interaktif, berbasis isu, dan terintegrasi dengan teknologi. Pendidikan politik modern bagi Gen Z perlu mencakup:

1. Pembelajaran berbasis isu nyata (real-world issues). Generasi Z lebih tertarik pada isu yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti lingkungan, kesehatan mental, pendidikan, dan ketimpangan sosial (Deloitte, 2023).
2. Literasi digital politik (digital political literacy). Ini mencakup kemampuan memilah informasi, memahami bias algoritma, serta mengidentifikasi misinformasi dan disinformasi (Guess et al., 2020). Literasi digital sangat penting karena Gen Z terpapar berbagai bentuk manipulasi digital dalam media sosial.
3. Penguatan kemampuan berpikir kritis. Menurut Facione (2015), kemampuan ini menjadi dasar penting agar anak muda dapat menilai argumen politik secara objektif, bukan sekadar berdasarkan viralitas atau emosi.
4. Pembelajaran kolaboratif dan berbasis dialog. Model ini memungkinkan anak muda untuk berdiskusi lintas perspektif,

sehingga mengurangi polarisasi dan memperkuat empati politik (Hess & McAvoy, 2015).

Pendidikan politik modern bukan hanya tanggung jawab sekolah atau universitas, tetapi juga ekosistem digital. Platform media sosial dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan ruang belajar politik yang aman dan sehat bagi anak muda.

Peluang kedua yang tak kalah penting adalah Institusi pendidikan dan komunitas sosial memiliki peran strategis dalam mengembangkan keterlibatan politik Gen Z. Sekolah dan kampus adalah ruang pembentukan identitas sosial dan politik, tempat mereka belajar memahami perbedaan, berdiskusi tentang isu publik, dan mempraktikkan kepemimpinan. Beberapa arah dukungan yang dapat dilakukan institusi pendidikan meliputi:

1. Mengintegrasikan civic engagement ke dalam kurikulum. Penelitian oleh Torney-Purta et al. (2015) menunjukkan bahwa siswa yang terpapar pembelajaran kewarganegaraan inklusif lebih cenderung aktif secara politik di masa dewasa.
2. Menyediakan ruang aman untuk dialog politik. Universitas dan sekolah dapat mengadakan forum diskusi, debat akademik, atau kelas tematik yang mempertemukan siswa dengan perspektif politik berbeda.
3. Mendorong partisipasi dalam organisasi dan komunitas. Kegiatan OSIS, komunitas lingkungan, BEM, dan kelompok

seni dapat memperkuat political efficacy kepercayaan bahwa individu dapat memengaruhi perubahan

4. Kolaborasi antar komunitas anak muda. Kolaborasi lintas sekolah, kampus, dan komunitas dapat menciptakan jaringan advokasi yang lebih kuat. Komunitas lokal juga memiliki peran penting. Organisasi masyarakat, lembaga sosial, serta komunitas berbasis isu dapat membantu Gen Z menemukan identitas politik mereka melalui aksi nyata dan kolaborasi sosial.

Studi Kasus Indonesia: Narasi Mobilisasi Politik Generasi Z dalam Demo Besar-Besaran Terbaru

Beberapa bulan lalu, Indonesia dikejutkan oleh gelombang demonstrasi besar-besaran yang hampir terjadi di seluruh kota besar. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, hingga kota-kota satelit seperti Depok dan Tangerang, dipenuhi massa yang sebagian besar berusia muda. Fenomena ini menjadi salah satu peristiwa sosial-politik paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya karena skalanya yang masif, tetapi karena wajah utama dari aksi protes tersebut adalah Generasi Z. Dalam narasi panjang gerakan sosial Indonesia, keterlibatan Gen Z dalam demonstrasi besar ini menandai sebuah perubahan penting dalam perilaku politik anak muda. Mereka tidak bergerak melalui organisasi formal atau tokoh

sentral, tetapi melalui jaringan digital yang cair, cepat, dan organik. Mobilisasi aksi berlangsung dalam tempo yang mengejutkan. Hanya dalam hitungan jam sejak isu mulai memanasi, poster-poster digital berisi ajakan aksi menyebar secara masif melalui Instagram Stories, WhatsApp Group, TikTok, dan Twitter. Informasi tersebar bukan melalui selebaran atau konferensi pers, melainkan lewat video pendek, thread, meme, dan konten kreatif yang dibuat oleh anak-anak muda itu sendiri.

Fenomena ini sejalan dengan konsep connective action yang dikembangkan Bennett dan Segerberg (2013), yang menjelaskan bahwa gerakan sosial modern tidak lagi bertumpu pada organisasi formal, tetapi pada identitas personal yang dibagikan melalui jaringan digital. Generasi Z bergerak bukan karena perintah dari struktur organisasi, tetapi karena merasa nilai moral dan masa depan mereka terancam. Keputusan mereka untuk turun ke jalan lahir dari koneksi emosional dan rasa solidaritas horizontal yang dibentuk melalui media sosial. Emosi moral menjadi pemicu utama mobilisasi ini. Banyak studi psikologi politik (Haidt, 2012; Neuman et al., 2007) menjelaskan bahwa kemarahan moral (moral outrage) mampu mengubah rasa tidak nyaman menjadi tindakan kolektif. Ketika peristiwa dan kebijakan tertentu dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan atau ancaman terhadap kehidupan masa depan mereka, Gen Z meresponsnya dengan cepat. Narasi yang berkembang dalam lini masa media sosial mereka memperlihatkan bahwa aksi ini bukan

hanya tentang kebijakan tertentu, tetapi tentang perasaan bahwa generasi muda tidak didengarkan, tidak diwakili, dan sering kali terpinggirkan dalam proses politik nasional.

Menariknya, identitas kolektif Gen Z terbentuk secara spontan seiring berkembangnya aksi. Menurut teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner, 1979), identitas kelompok dapat mengikat individu untuk bertindak demi kepentingan bersama. Itulah yang terlihat di jalanan: anak muda dari latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi yang sangat beragam hadir dengan tujuan yang sama. Mereka mengekspresikan identitas politik bukan hanya melalui slogan, tetapi juga lewat estetika visual—poster-poster kreatif, ilustrasi digital, humor politik, dan meme yang viral. Hal ini memperkuat temuan Abidin (2021) bahwa estetika digital telah menjadi bagian penting dari ekspresi politik anak muda. Media sosial memainkan peran sentral dalam membentuk narasi kolektif aksi ini. TikTok yang biasanya dipenuhi konten hiburan—tiba-tiba dipenuhi video analisis, kesaksian lapangan, dan penjelasan isu yang dijelaskan dengan gaya visual yang mudah dipahami. Instagram Stories menjadi papan pengumuman publik, sementara Twitter menjadi ruang diskusi cepat. Ketika satu kota mengadakan aksi, kota lain segera bereaksi karena mereka menyaksikan video real-time dari lapangan. Fenomena ini konsisten dengan apa yang disebut Tufekci (2017) sebagai *networked protest*, yaitu aksi kolektif yang tumbuh dari dinamika komunikasi digital.

Kreativitas menjadi kekuatan utama Gen Z. Cara mereka menyampaikan pesan politik sering kali lebih estetik, humoris, dan emosional dibanding generasi sebelumnya. Ini membuat isu politik yang kompleks menjadi lebih mudah diakses dan dicerna. Bahkan bagi yang sebelumnya tidak mengikuti isu tersebut, visual dan narasi yang mereka temui di media sosial membuat mereka merasa terhubung dan terdorong untuk ikut terlibat. Dari perspektif psikologi politik, aksi besar-besaran ini menunjukkan bahwa efikasi politik (political efficacy) Gen Z meningkat. Mereka merasakan bahwa suara mereka memiliki dampak. Hal ini sejalan dengan teori Bandura (1997) tentang self-efficacy, bahwa keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi kunci tindakan. Ketika mereka melihat ribuan orang seusia mereka turun ke jalan, mereka merasa kuat, bersatu, dan mampu menekan perubahan.

Gerakan ini juga memperlihatkan munculnya kepemimpinan digital baru. Bukan tokoh formal atau aktivis senior, tetapi akun-akun media sosial yang menyampaikan informasi akurat, membuat analisis yang jernih, atau memandu massa dengan bijak. Banyak akun TikTok atau X yang tiba-tiba menjadi sumber informasi terpercaya. Inilah bentuk informal leadership yang lahir dari era digital: kepemimpinan yang tidak lahir dari jabatan, tetapi dari kepercayaan kolektif. Namun, fenomena ini juga memperlihatkan tantangan bagi Generasi Z. Intensitas paparan informasi emosional membuat sebagian merasa kewalahan. Political fatigue, menurut Chan (2020), sering muncul

ketika seseorang terlalu lama terlibat dalam debat emosional atau konsumsi konten politik yang berlebihan. Beberapa anak muda bahkan menonaktifkan sementara media sosial karena merasa stres oleh dinamika aksi dan narasi konflik.

Meski demikian, narasi besar dari demonstrasi ini jelas: Generasi Z bukan generasi apatis. Mereka bukan generasi yang tidak peduli politik. Sebaliknya, mereka peduli dengan cara mereka sendiri cara yang kreatif, cepat, berbasis nilai moral, dan sangat digital. Demonstrasi besar ini menjadi bukti bahwa Gen Z adalah kekuatan politik baru yang tidak bisa diabaikan. Mereka memiliki suara, jaringan, kreativitas, dan keberanian untuk mempengaruhi arah kehidupan sosial-politik Indonesia. Dengan demikian, demonstrasi besar-besaran ini bukan sekadar peristiwa, tetapi bab penting dalam perjalanan politik Indonesia. Sebuah bab yang memperlihatkan bahwa masa depan politik Indonesia akan semakin ditentukan oleh generasi yang tumbuh bersama gawai, media sosial, dan kesadaran moral yang kuat terhadap masa depan bangsanya.

BAB I

PENGANTAR PSIKOLOGI POLITIK

Psikologi politik adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi perilaku politik, persepsi, serta proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Bidang ini menyoroti bagaimana individu memahami dunia politik, bagaimana opini dan ideologi terbentuk, serta bagaimana emosi, motivasi, dan identitas sosial dapat mendorong seseorang untuk mendukung kandidat, kebijakan, atau gerakan tertentu. Tidak hanya berfokus pada tingkat individu, psikologi politik juga mempelajari dinamika kelompok, opini publik, propaganda, komunikasi politik, hingga bagaimana pemimpin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh massa. Pada tingkat negara, psikologi politik berperan dalam memahami pola kepemimpinan, stabilitas sosial, konflik, serta proses legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, psikologi politik menjadi jembatan antara aspek psikologis manusia dan struktur politik yang lebih luas, yang membentuk sistem sosial serta dinamika kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Dalam bab ini, kita akan menyelami sejarah perkembangan psikologi politik, hubungan integral antara psikologi dan ilmu politik, serta berbagai

pendekatan yang digunakan dalam menganalisis fenomena politik dari sudut pandang psikologis.

A. Definisi Psikologi Politik

Psikologi politik dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana aspek-aspek psikologis mempengaruhi proses dan dinamika politik. Bidang ini melihat bagaimana individu maupun kelompok mengambil keputusan politik, apa yang mendorong mereka untuk memilih atau mendukung suatu ideologi, serta bagaimana pikiran, perasaan, pengalaman, dan kepercayaan mereka membentuk tindakan politik yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, psikologi politik membantu menjelaskan mengapa seseorang bersikap tertentu terhadap isu politik, bagaimana opini politik terbentuk, dan apa yang membuat kelompok masyarakat merespons situasi politik secara berbeda.

Menurut David G. Winter (2011), psikologi politik merupakan kajian tentang hubungan antara karakteristik psikologis manusia dengan kehidupan politik. Ia menekankan bahwa untuk memahami perilaku politik, tidak cukup hanya melihat faktor struktural seperti sistem pemerintahan atau kondisi sosial ekonomi, tetapi perlu memperhatikan motivasi, emosi, pengalaman pribadi, serta identitas sosial yang dimiliki individu dan kelompok. Winter juga menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kebutuhan psikologis akan

kekuasaan, rasa aman, keterikatan kelompok, hingga persepsi terhadap ancaman atau harapan masa depan, dapat memengaruhi preferensi seseorang terhadap pemimpin tertentu, partai politik tertentu, atau kebijakan yang sedang dibahas. Dengan demikian, psikologi politik membantu kita memahami bahwa perilaku politik bukan hanya soal rasionalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika psikologis yang kompleks dan seringkali tidak disadari.

B. Sejarah Psikologi Politik

Sejarah psikologi politik dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, ketika para pemikir mulai menyadari bahwa perilaku politik tidak hanya ditentukan oleh struktur sosial atau sistem pemerintahan, tetapi juga oleh kondisi psikologis manusia. Salah satu tokoh paling awal yang memberikan pengaruh besar adalah Sigmund Freud. Melalui pemikirannya tentang naluri dasar, ketidaksadaran, dan mekanisme pertahanan diri, Freud menunjukkan bagaimana emosi dan konflik batin dapat membentuk cara individu dan kelompok bereaksi terhadap kekuasaan, pemimpin, dan situasi politik. Meskipun Freud tidak secara langsung menulis tentang psikologi politik sebagai disiplin khusus, banyak konsepnya digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti fanatisme, kepatuhan terhadap otoritas, dan dinamika massa.

Pada dekade 1920-an, perkembangan penting muncul melalui karya Gordon Allport dan Kurt Lewin. Allport berkontribusi dalam pengembangan teori kepribadian dan sikap sosial yang kemudian digunakan untuk memahami prasangka, identitas kelompok, serta pembentukan opini politik. Sementara itu, Kurt Lewin memperkenalkan field theory, yaitu pemahaman bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosial tertentu. Lewin juga dianggap sebagai pelopor studi dinamika kelompok dan perubahan sosial, yang menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana massa dapat dipengaruhi oleh pemimpin, media, atau tekanan sosial dalam konteks politik.

Meskipun gagasan-gagasan awal tersebut signifikan, psikologi politik sebagai disiplin ilmu yang terstruktur baru berkembang setelah Perang Dunia II. Pada periode ini, perhatian ilmuwan meningkat terhadap bagaimana propaganda digunakan dalam perang, bagaimana pemimpin otoriter memperoleh dukungan, serta bagaimana trauma kolektif dapat membentuk identitas politik suatu bangsa. Selain itu, muncul berbagai penelitian yang mencoba menjelaskan perilaku pemilih, proses sosialisasi politik, ideologi, dan konflik antar kelompok melalui pendekatan psikologi. Perang Dingin, misalnya, memicu lahirnya studi mengenai motivasi kepemimpinan, persepsi ancaman, dan polarisasi ideologis.

Memasuki akhir abad ke-20 hingga sekarang, psikologi politik berkembang sebagai bidang interdisipliner yang memadukan psikologi sosial, psikologi kepribadian, ilmu politik, sosiologi, dan komunikasi. Teknologi media modern, termasuk media sosial, semakin menegaskan pentingnya peran aspek psikologis dalam pembentukan opini publik dan mobilisasi politik. Dengan demikian, sejarah psikologi politik menunjukkan perjalanan panjang dari pemikiran dasar tentang perilaku manusia menuju analisis kompleks tentang bagaimana pikiran, emosi, identitas, dan interaksi sosial mempengaruhi dinamika kekuasaan dan kehidupan bernegara.

C. Hubungan Antara Psikologi dan Politik

Psikologi dan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat karena keduanya sama-sama berhubungan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Psikologi memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu maupun kelompok menilai, merespons, dan mengambil keputusan terkait isu-isu politik. Faktor-faktor psikologis seperti emosi, keyakinan pribadi, nilai-nilai, pengalaman hidup, hingga identitas sosial sangat berpengaruh dalam menentukan sikap politik seseorang. Salah satu konsep yang relevan adalah teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel, yang menjelaskan bahwa individu cenderung mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu — misalnya partai politik, agama, suku,

komunitas ideologis, atau organisasi masyarakat. Identitas kelompok tersebut kemudian memengaruhi cara pandang seseorang terhadap kebijakan politik, kandidat dalam pemilu, serta bagaimana ia menilai pihak yang dianggap “kelompok lain”. Dengan kata lain, afiliasi politik seringkali bukan hanya persoalan logika atau pengetahuan, tetapi juga keterikatan emosional dan rasa memiliki terhadap kelompok tertentu.

Sebaliknya, politik juga memberikan pengaruh signifikan terhadap psikologi individu dan kelompok. Kondisi politik suatu negara dapat membentuk rasa aman, kepercayaan terhadap pemerintah, serta tingkat stres sosial masyarakat. Misalnya, ketegangan politik menjelang pemilu, polarisasi yang tajam antara kelompok pendukung kandidat berbeda, atau perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada ekonomi dan sosial, dapat menimbulkan kecemasan, rasa tidak pasti, bahkan konflik interpersonal. Situasi politik yang tidak stabil dapat menurunkan kesehatan mental masyarakat, meningkatkan rasa curiga antarkelompok, serta memperkuat stereotip dan diskriminasi.

Lebih jauh lagi, hubungan antara psikologi dan politik juga dapat dilihat dalam proses komunikasi dan persuasi politik. Para pemimpin dan komunikator politik sering memanfaatkan pengetahuan psikologis untuk mempengaruhi opini publik, membangun citra diri, atau membangkitkan emosi tertentu seperti harapan, ketakutan, maupun kemarahan untuk mendapatkan

dukungan. Dalam konteks ini, psikologi politik membantu kita memahami bahwa politik bukan hanya arena rasionalitas dan kepentingan, tetapi juga arena emosi, simbol, makna, dan pengaruh sosial yang kompleks.

D. Pentingnya Studi Psikologi Politik dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks dunia modern yang semakin kompleks, cepat berubah, dan saling terhubung, studi psikologi politik menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dan perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta munculnya platform media sosial telah mengubah secara drastis cara individu membentuk opini politik, berinteraksi dengan informasi, dan mengekspresikan identitas politik mereka. Cass Sunstein (2007) dalam *Republic.com 2.0* menekankan bahwa teknologi digital dapat menciptakan ruang informasi yang terfragmentasi, di mana individu cenderung memilih dan mengonsumsi informasi yang hanya sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini memperkuat bias konfirmasi dan mendorong pembentukan echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan dirinya sehingga polarisasi politik semakin meningkat dan dialog publik menjadi kurang terbuka.

Lebih jauh lagi, psikologi politik sangat penting digunakan untuk menganalisis berbagai tantangan sosial dan politik kontemporer, seperti ekstremisme, radikalisme, populisme, serta meningkatnya konflik identitas dalam masyarakat. Pemimpin populis, misalnya, sering memanfaatkan dinamika psikologis kelompok untuk menciptakan narasi “kami versus mereka”, yang menonjolkan perbedaan antar-kelompok guna memperoleh dukungan emosional dari pengikutnya. Pendekatan ini dapat memperkuat rasa solidaritas internal kelompok, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketegangan, permusuhan, dan bahkan konflik terbuka dengan kelompok lain.

Selain itu, pemahaman psikologi politik juga penting dalam merancang kebijakan publik yang lebih manusiawi dan efektif. Dengan memahami motivasi, kebutuhan psikologis, dan sensitivitas masyarakat, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih inklusif, mengurangi resistensi sosial, serta mendorong partisipasi politik yang sehat. Di era informasi yang serba cepat ini, di mana persepsi sering kali lebih berpengaruh daripada fakta, kemampuan untuk memahami dan mengelola aspek psikologis dari kehidupan politik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat demokrasi.

Dalam psikologi politik, terdapat sejumlah pendekatan teoretis yang digunakan untuk memahami bagaimana individu dan

kelompok berperilaku dalam konteks politik. Setiap pendekatan ini memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana keputusan politik terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

1. Pendekatan Kognitif

Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, membentuk persepsi, dan mengambil keputusan politik. Herbert Simon (1985) memperkenalkan konsep *bounded rationality* atau rasionalitas terbatas, yang menekankan bahwa manusia tidak selalu mampu berpikir secara logis dan komprehensif ketika mengambil keputusan politik. Keterbatasan informasi, tekanan waktu, bias kognitif, serta pengaruh lingkungan menyebabkan individu sering bergantung pada penilaian cepat atau *heuristics*. Dengan demikian, pilihan politik seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh data objektif, tetapi juga oleh cara mereka menafsirkan dan memaknai informasi tersebut.

2. Pendekatan Sosial

Pendekatan ini melihat perilaku politik sebagai hasil interaksi sosial dan norma yang berlaku dalam kelompok. Teori konformitas dan teori identitas sosial karya Henri Tajfel menjelaskan bahwa individu cenderung mengikuti sikap politik kelompok yang mereka identifikasi sebagai bagian dari

identitas diri. Misalnya, seseorang dapat memilih partai politik tertentu bukan semata karena programnya, tetapi karena rasa kebersamaan atau loyalitas terhadap kelompok sosial atau komunitasnya. Dengan demikian, politik tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan fenomena kolektif yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk diterima dan diakui dalam kelompok.

3. Pendekatan Psikodinamika

Pendekatan ini berakar pada pemikiran Sigmund Freud, yang menekankan peran ketidaksadaran, konflik batin, pengalaman masa kecil, serta mekanisme pertahanan diri dalam membentuk sikap politik seseorang. Emosi seperti kecemasan, rasa takut, kebutuhan akan perlindungan, atau dorongan untuk berkuasa dapat secara tidak disadari memengaruhi preferensi politik. Misalnya, seseorang mungkin mendukung pemimpin otoriter karena kebutuhan psikologis akan rasa aman dan kepastian, bukan semata karena alasan rasional atau ideologis.

4. Pendekatan Evolusioner

Pendekatan evolusioner melihat perilaku politik sebagai bagian dari strategi adaptasi manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Perilaku seperti pembentukan kelompok, hierarki kepemimpinan, solidaritas internal, dan

penolakan terhadap kelompok luar (outgroup) dipandang sebagai pola yang telah berkembang sejak masa manusia purba. Dalam konteks ini, kecenderungan untuk memilih pemimpin yang kuat atau membentuk ikatan kelompok yang solid dianggap sebagai bagian dari mekanisme bertahan hidup yang diwariskan secara evolusioner.

Kesimpulan

Psikologi politik memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi dinamika kehidupan politik, baik pada tingkat individu maupun kelompok sosial. Dengan mempelajari aspek-aspek seperti persepsi, emosi, kepribadian, keyakinan, serta identitas sosial, kita dapat memahami alasan di balik pilihan politik seseorang, cara mereka merespons isu-isu yang berkembang, dan pola perilaku politik yang muncul dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh logika atau kalkulasi rasional semata, tetapi juga oleh pengalaman pribadi, posisi sosial, lingkungan budaya, dan interaksi dengan kelompok sosial yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, psikologi politik memungkinkan kita melihat bagaimana proses persuasi, propaganda, komunikasi massa, dan kepemimpinan memainkan peran penting dalam membentuk opini

publik serta mengarahkan arah kebijakan politik. Dalam masyarakat yang semakin plural, beragam, dan dipengaruhi oleh arus informasi yang cepat, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor psikologis menjadi kunci untuk menganalisis fenomena seperti polarisasi politik, konflik identitas, dan pembentukan gerakan sosial.

Oleh karena itu, buku ini disusun untuk membahas berbagai konsep dan pendekatan dalam psikologi politik secara sistematis dan aplikatif. Dengan memahami hubungan antara psikologi dan politik secara lebih mendalam, diharapkan pembaca mampu melihat politik bukan hanya sebagai arena kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang di mana manusia mengekspresikan nilai, emosi, identitas, serta harapannya terhadap kehidupan bersama dalam masyarakat yang terus berkembang.

BAB II

PSIKOLOGI INDIVIDU DALAM POLITIK

Psikologi individu dalam konteks politik berfokus pada bagaimana pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang memengaruhi pilihan serta tindakan politik yang ia ambil. Proses pengambilan keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial atau struktur politik, tetapi juga oleh faktor psikologis internal seperti cara individu memproses informasi (kognisi), bagaimana ia merasakan dan merespons situasi politik (emosi), sifat atau karakter kepribadian, hingga bagaimana ia menilai lingkungan sosial dan aktor-aktor politik di dalamnya (persepsi). Oleh karena itu, pemahaman mengenai preferensi politik dan tingkat partisipasi seseorang dalam aktivitas politik dapat ditelusuri melalui pendekatan psikologi sosial.

Dalam praktik berpolitik, seorang individu tidak terlepas dari pengaruh teori-teori sosial yang telah dipelajari dan diinternalisasikan. Teori konformitas, misalnya, menjelaskan bagaimana seseorang dapat mengikuti pandangan politik kelompok mayoritas untuk mendapatkan penerimaan sosial. Sementara itu, teori identitas sosial menunjukkan bahwa identitas kelompok—seperti agama, etnis, atau partai politik—dapat menjadi dasar pembentukan loyalitas dan orientasi politik. Selain itu, teori perilaku sosial membantu memahami

bagaimana tindakan politik dipengaruhi oleh norma sosial, tekanan lingkungan, serta harapan masyarakat.

Lebih jauh, individu yang terlibat dalam politik, terutama mereka yang berperan sebagai politisi, juga menerapkan strategi tertentu untuk membangun citra, mempengaruhi opini publik, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Strategi tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyampaian gagasan atau program politik, tetapi juga melalui pengelolaan kognisi dan emosi audiens. Politisi sering kali berupaya mengarahkan cara masyarakat memahami isu politik tertentu, sekaligus membangkitkan emosi seperti simpati, harapan, atau rasa percaya. Dengan demikian, kognisi dan emosi memainkan peran strategis dalam membentuk keterikatan psikologis antara politisi dan pemilih, yang pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan mereka dalam memperoleh dukungan politik.

A. Teori-Teori Psikologi Sosial dalam Politik

Psikologi sosial memberikan sudut pandang yang mendalam mengenai bagaimana individu bertindak, merespons, dan mengambil keputusan ketika berada dalam interaksi sosial. Dalam ranah politik, pendekatan ini menekankan bahwa perilaku politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh keyakinan atau nilai pribadi, tetapi juga oleh pengaruh lingkungan sosial, struktur kelompok, dan persepsi terhadap identitas sosial. Dengan kata lain, pilihan politik tidak sekadar

merupakan hasil pertimbangan rasional, tetapi seringkali merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks yang melibatkan tekanan kelompok, hubungan antarindividu, serta kebutuhan akan penerimaan sosial. Oleh karena itu, psikologi sosial menawarkan kerangka teoretis yang sangat relevan untuk memahami mengapa dan bagaimana individu membentuk sikap politik, menentukan preferensi partai, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.

1. Teori Konformitas

Salah satu teori penting dalam psikologi sosial adalah Teori Konformitas yang dikembangkan oleh Solomon Asch (1951). Melalui eksperimennya, Asch menunjukkan bahwa individu cenderung menyesuaikan pendapat, keyakinan, atau perilaku mereka untuk menyesuaikan diri dengan pandangan kelompok mayoritas, bahkan ketika mereka sebenarnya mengetahui bahwa pandangan tersebut keliru. Dalam konteks politik, teori ini menjelaskan fenomena ketika seseorang mendukung kandidat atau partai politik tertentu bukan karena keyakinannya sendiri, tetapi karena tekanan sosial, keinginan untuk diterima, atau ketakutan akan dikucilkan dari kelompok sosialnya. Konformitas ini dapat terlihat dalam dinamika kampanye politik, budaya politik keluarga, hingga pola pemilih dalam komunitas tertentu yang didominasi satu kekuatan politik.

2. Teori Identitas Sosial

Henri Tajfel (1979) melalui Teori Identitas Sosial menjelaskan bahwa individu mendefinisikan dirinya berdasarkan kelompok sosial yang ia ikuti, seperti kelompok etnis, agama, kelas sosial, atau partai politik. Identitas kelompok ini mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya, orang lain, dan isu-isu sosial-politik di sekitarnya. Dalam konteks politik, teori ini menjelaskan mengapa pemilih sering menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap partai atau kelompok tertentu, meskipun terkadang kebijakan atau kandidat yang diusung tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Selain itu, teori ini juga membantu memahami terbentuknya polarisasi politik, yaitu ketika kelompok yang berbeda saling memandang sebagai lawan atau ancaman, sehingga memunculkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat.

3. Teori Perilaku Sosial

Albert Bandura (1977) melalui Teori Pembelajaran Sosial menegaskan bahwa perilaku individu, termasuk perilaku politik, dibentuk melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan dari lingkungan sosial. Individu belajar perilaku politik dari tokoh yang dianggap berpengaruh, seperti orang tua, pemimpin agama, tokoh masyarakat, media massa, dan

figur politik. Media sosial pada era kontemporer juga memainkan peran besar sebagai sumber pembelajaran politik, baik melalui berita, diskusi, maupun propaganda. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana informasi politik, opini publik, dan sikap terhadap isu politik tertentu dapat menyebar dengan cepat dalam masyarakat melalui interaksi sosial dan media.

B. Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Pemilih: Kognisi dan Emosi

Dalam proses pengambilan keputusan politik, pemilih tidak selalu bertindak atas dasar pertimbangan rasional semata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan politik sering dipengaruhi oleh interaksi antara proses kognitif (cara individu berpikir dan menafsirkan informasi) dan respons emosional yang muncul dari situasi politik tertentu. Teori kognisi sosial mempelajari bagaimana individu mengolah informasi politik, membangun keyakinan, dan menilai kandidat atau isu. Di sisi lain, teori emosi menyoroti bagaimana perasaan dapat memperkuat, melemahkan, atau bahkan mengubah preferensi politik seseorang. Dengan demikian, perilaku politik merupakan hasil kombinasi dari penalaran logis dan dinamika emosional yang kompleks.

1. Kognisi dan Bias Kognitif

Daniel Kahneman dan Amos Tversky (1974) melalui Teori Prospek menjelaskan bahwa manusia tidak selalu mengambil keputusan dengan cara yang rasional dan objektif. Mereka menemukan bahwa individu lebih sensitif terhadap kemungkinan mengalami kerugian dibandingkan meraih keuntungan. Dalam konteks politik, hal ini dapat dilihat ketika pemilih lebih mudah terpengaruh oleh pesan-pesan yang menekankan ancaman, ketidakpastian, atau risiko, dibandingkan janji akan perbaikan dan kemajuan. Misalnya, isu ancaman terhadap keamanan nasional atau identitas budaya seringkali memengaruhi pilihan politik masyarakat lebih kuat daripada program pembangunan jangka panjang. Selain itu, bias kognitif seperti *confirmation bias* (kecenderungan mencari informasi yang sesuai dengan kepercayaan yang telah ada) dan *halo effect* (kecenderungan menilai seseorang secara keseluruhan berdasarkan satu karakteristik) juga turut membentuk persepsi pemilih terhadap kandidat politik.

2. Emosi dan Politik

George E. Marcus (2000) dalam karyanya *The Sentimental Citizen* menegaskan bahwa emosi memegang peran penting dalam motivasi politik individu. Emosi seperti rasa takut

dapat mendorong pemilih untuk mencari figur pemimpin yang dianggap mampu memberikan perlindungan, sementara emosi marah dapat memobilisasi masyarakat untuk menuntut perubahan radikal. Sebaliknya, emosi positif seperti kebanggaan dapat memperkuat loyalitas dan dukungan terhadap partai atau kandidat tertentu. Kampanye politik sering memanfaatkan dinamika emosional ini, misalnya melalui penggunaan simbol, narasi sejarah, atau slogan yang menyentuh perasaan publik. Dengan demikian, emosi bukan hanya pelengkap, tetapi justru elemen utama dalam pembentukan sikap politik.

Kognisi dan emosi dalam politik tidak dapat dilepaskan dari teori-teori psikologi sosial yang telah dibahas sebelumnya. Teori Konformitas menjelaskan bahwa keputusan politik dapat dipengaruhi oleh norma kelompok dan tekanan sosial, sehingga pemilih mungkin mengikuti pilihan kelompoknya meskipun secara pribadi ia memiliki pemikiran berbeda. Teori Identitas Sosial menunjukkan bahwa ikatan emosional terhadap kelompok sosial (misalnya partai, agama, atau suku) dapat memperkuat preferensi politik dan memperkuat loyalitas, terutama ketika identitas kelompok dianggap terancam. Sementara Teori Pembelajaran Sosial (Bandura) membantu memahami bagaimana emosi dan pola berpikir politik dipelajari melalui observasi terhadap tokoh atau lingkungan sosial.

Dengan mempertimbangkan hubungan antara kognisi, emosi, dan teori-teori psikologi sosial, dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan proses sosial-psikologis yang kompleks. Pemilih tidak hanya bertindak berdasarkan informasi dan perhitungan logis, tetapi juga berdasarkan rasa memiliki, rasa takut, harapan, dan dorongan untuk diterima dalam kelompok sosialnya. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika politik secara lebih mendalam, penting untuk mengkaji bagaimana faktor psikologis ini berperan dalam memengaruhi cara individu memilih, bertindak, dan merespon realitas politik.

C. Persepsi Politik dan Pengaruhnya terhadap Preferensi Politik

Persepsi politik merujuk pada cara individu memahami, menafsirkan, dan menilai informasi yang berkaitan dengan isu-isu politik. Proses ini tidak bersifat netral atau objektif, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis seperti pengalaman pribadi, nilai yang dianut, identitas kelompok, dan bias kognitif yang telah tertanam dalam diri individu. Edward E. Jones (1972) melalui Teori Atribusi menjelaskan bahwa manusia cenderung mencari penyebab atau alasan di balik tindakan atau peristiwa politik, dan penilaian tersebut sering kali dipengaruhi oleh kecenderungan untuk menyederhanakan situasi atau menyalahkan pihak tertentu. Sebagai

contoh, seseorang yang memiliki afiliasi emosional terhadap suatu partai dapat menafsirkan kebijakan partai tersebut secara positif, sementara kebijakan serupa dari pihak lawan akan dipandang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi politik bukan sekadar hasil penalaran logis, tetapi terkait erat dengan predisposisi psikologis dan identitas sosial individu.

Persepsi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi politik seseorang, termasuk pilihan partai, kandidat, dan dukungan terhadap kebijakan tertentu. Cara seseorang menafsirkan informasi politik akan memengaruhi bagaimana ia menilai aktor politik dan menentukan sikap politiknya. Individu yang memersepsikan kondisi politik sebagai stabil dan menguntungkan cenderung mendukung pemimpin yang sedang berkuasa, sedangkan individu yang memersepsikan ketidakadilan atau ancaman politik lebih cenderung mendukung alternatif yang menjanjikan perubahan. Selain itu, persepsi politik yang terbentuk melalui media sosial dan interaksi kelompok dapat memperkuat polarisasi, karena individu cenderung mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan yang telah dimilikinya (*confirmation bias*). Oleh karena itu, persepsi politik bukan hanya hasil dari paparan informasi, tetapi merupakan proses aktif yang dipengaruhi oleh emosi, identitas, dan hubungan sosial.

Dengan demikian, memahami persepsi politik sangat penting dalam menganalisis perilaku pemilih. Persepsi tidak hanya memberikan gambaran mengenai bagaimana pemilih melihat realitas politik, tetapi juga bagaimana mereka merasionalisasi pilihan mereka dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik bukan sekadar pilihan yang bersifat rasional dan terukur, tetapi merupakan refleksi dari konstruksi psikologis dan sosial yang telah tertanam dalam diri individu.

D. Personalitas dan Kepemimpinan dalam Politik

Teori kepribadian memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana karakteristik individu memengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak dalam dunia politik. Keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh faktor sosial dan situasional, tetapi juga oleh perbedaan internal yang melekat pada diri individu. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam mengkaji hubungan antara kepribadian dan perilaku politik adalah Teori Big Five Personality Traits yang dikembangkan oleh Paul Costa dan Robert McCrae (1992). Pendekatan ini mengidentifikasi lima dimensi utama kepribadian—neuroticism (kecenderungan emosional yang tidak stabil), extraversion (keterbukaan dalam interaksi sosial), openness to experience (keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru), agreeableness (kecenderungan untuk kooperatif dan peduli

pada orang lain), dan conscientiousness (ketekunan dan kehati-hatian dalam bertindak).

Dalam konteks politik, setiap dimensi kepribadian dapat berhubungan dengan orientasi dan preferensi tertentu. Misalnya, individu yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi cenderung lebih menerima gagasan baru dan lebih mungkin mendukung kebijakan progresif. Sebaliknya, individu dengan tingkat neurotisme tinggi mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh pesan politik yang menekankan ancaman atau ketidakpastian. Sementara itu, seseorang dengan sifat kehati-hatian yang tinggi mungkin lebih mendukung kebijakan yang stabil dan terukur. Dengan demikian, karakteristik kepribadian memberikan landasan psikologis yang mempengaruhi bagaimana individu memahami isu politik, memilih pemimpin, serta menentukan sikap terhadap perubahan sosial.

Di sisi lain, kepemimpinan politik juga tidak dapat dipisahkan dari aspek kepribadian individu yang memegang kekuasaan. James MacGregor Burns (1978) melalui konsep kepemimpinan transformasional menjelaskan bahwa pemimpin yang mampu menciptakan perubahan sosial bersifat inspiratif, visioner, dan mampu membangun hubungan emosional dengan para pengikutnya. Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kekuasaan, tetapi berupaya menggerakkan masyarakat menuju arah perubahan yang dianggap lebih baik melalui

penyampaian nilai, visi, dan tujuan kolektif. Tipe kepemimpinan ini sering ditemukan pada tokoh-tokoh yang mampu membangkitkan harapan dan motivasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kepribadian memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk citra dan efektivitas seorang pemimpin politik. Pemimpin dengan tingkat ekstrasversi yang tinggi, misalnya, sering tampil lebih percaya diri, komunikatif, dan persuasif, sehingga lebih mudah membangun hubungan dengan publik. Sementara itu, tingkat keterbukaan yang tinggi memungkinkan pemimpin melihat berbagai kemungkinan kebijakan dan lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan transformasional umumnya muncul dari kombinasi sifat-sifat kepribadian ini, yang memungkinkan pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memengaruhi nilai dan pandangan pengikutnya.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kepribadian pemimpin juga mempengaruhi kepercayaan dan dukungan politik. Pemilih cenderung memberikan dukungan kepada pemimpin yang dianggap memiliki integritas, kemampuan merangkul masyarakat, serta visi yang jelas mengenai masa depan. Oleh karena itu, personalitas bukan hanya aspek psikologis yang bersifat internal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi komunikasi politik yang

menentukan bagaimana pemimpin membangun citra publik dan legitimasi kekuasaan.

E. Pengaruh Media Sosial terhadap Psikologi Pemilih

Media sosial kini memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk persepsi politik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Kecepatan penyebaran informasi, kemampuan menciptakan interaksi langsung, serta jangkauan yang luas menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan opini dan sikap politik. Melalui konten yang beragam—mulai dari berita, komentar publik, meme politik, hingga kampanye digital—media sosial mampu menguatkan pandangan politik yang telah dimiliki individu sebelumnya, sekaligus memperkuat keterikatan mereka terhadap kelompok atau ideologi tertentu. Cass Sunstein (2001) dalam karya-karyanya menjelaskan bahwa media sosial mendorong individu untuk masuk ke dalam echo chambers, yaitu lingkungan informasi tertutup di mana seseorang hanya mendengar pandangan yang sejalan dengan opini yang ia yakini. Akibatnya, kemampuan individu untuk mengevaluasi informasi secara kritis dapat menurun karena tidak adanya paparan terhadap perspektif yang berbeda.

Selain itu, Eli Pariser (2011) melalui konsep The Filter Bubble menunjukkan bahwa algoritma media sosial berperan besar dalam

membentuk realitas informasi individu. Algoritma ini secara otomatis memilih dan menampilkan konten yang sesuai dengan riwayat pencarian, preferensi, atau interaksi sebelumnya dari pengguna. Dengan cara ini, pengguna cenderung terpapar pada informasi yang mendukung pandangannya sendiri, sementara informasi alternatif atau yang berlawanan menjadi semakin tidak terlihat. Situasi ini berpotensi memperdalam polarisasi politik, karena pengguna tidak lagi berhadapan dengan keragaman gagasan, melainkan hanya dengan opini yang memperkuat keyakinan awal mereka. Dengan demikian, media sosial bukan hanya sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebuah mekanisme seleksi yang dapat memengaruhi struktur berpikir dan arah pilihan politik masyarakat.

Pengaruh media sosial terhadap psikologi pemilih dapat dilihat dari bagaimana platform digital mampu memengaruhi emosi, penilaian, dan proses pengambilan keputusan. Media sosial tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memicu reaksi emosional melalui penyajian pesan yang bersifat persuasif, provokatif, atau bahkan manipulatif. Konten yang memunculkan rasa takut, marah, atau bangga sering kali disebarkan lebih cepat karena memiliki daya tarik psikologis yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori psikologi sosial yang menekankan bahwa emosi mempunyai peran penting dalam membentuk orientasi dan tindakan politik. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi pembentukan identitas kelompok politik melalui komunitas berbasis dukungan, tagar kampanye, atau grup diskusi

daring, yang memperkuat rasa kebersamaan maupun antagonisme terhadap kelompok lain.

Dengan demikian, media sosial berperan dalam membentuk preferensi politik tidak hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui mekanisme psikologis yang memengaruhi cara individu menafsirkan dan merespons isu politik. Pengguna yang terus-menerus terpapar konten dengan tone emosional tertentu cenderung membangun sikap politik yang konsisten dengan konten tersebut. Oleh karena itu, memahami pengaruh media sosial menjadi sangat penting dalam menganalisis perilaku pemilih pada era digital, di mana opini politik dapat dibentuk, dipolarisasi, atau bahkan dimobilisasi hanya melalui aliran informasi yang berlangsung sangat cepat.

Kesimpulan

Psikologi individu dalam ranah politik memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana faktor-faktor internal seperti cara berpikir (kognisi), dinamika perasaan (emosi), cara menafsirkan realitas (persepsi), karakter kepribadian (personalitas), serta pengaruh lingkungan sosial modern seperti media sosial membentuk pilihan dan perilaku politik seseorang. Faktor-faktor psikologis tersebut mempengaruhi bagaimana individu menilai informasi politik, menentukan preferensi terhadap kandidat, serta memutuskan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan

tertentu. Selain itu, aspek-aspek tersebut juga menjelaskan mengapa respons politik antarindividu bisa sangat beragam, meskipun berada dalam konteks sosial dan informasi yang sama.

Dengan memahami aspek psikologis tersebut, kita dapat melihat bahwa perilaku politik tidak hanya dipengaruhi oleh struktur kekuasaan atau kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh proses psikologis yang terjadi dalam diri setiap individu. Dalam konteks ini, pemilih bukan sekadar aktor rasional, melainkan makhluk yang dipengaruhi oleh pengalaman emosional, kebutuhan identitas, pola kognitif, dan lingkungan sosial digital yang semakin dominan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya dalam buku ini akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana faktor-faktor psikologis tersebut saling berinteraksi, membentuk pola dinamika politik dalam masyarakat, dan berkontribusi pada munculnya fenomena politik yang lebih luas seperti polarisasi, perubahan sikap publik, hingga pembentukan gerakan politik.

BAB III

KEKANAK-KANAKKAN DAN KEDEWASAAN DALAM BERPOLITIK

Bab ini membahas dinamika psikologis yang muncul dalam perilaku politik, khususnya mengenai sikap kekanak-kanakkan dan kedewasaan dalam berpolitik. Dalam konteks politik kontemporer, perilaku aktor politik dan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan strategis atau struktur kekuasaan, tetapi juga oleh tingkat kematangan emosional, pola pikir, dan kemampuan dalam memahami serta merespons realitas sosial. Sikap kekanak-kanakkan dapat tercermin dari tindakan impulsif, penggunaan emosi secara berlebihan, penghindaran tanggung jawab, hingga kecenderungan memecah belah kelompok untuk memperoleh dukungan. Sebaliknya, kedewasaan dalam berpolitik ditandai oleh kemampuan untuk menimbang kepentingan bersama, menjalin dialog konstruktif, serta menempatkan nilai dan etika sebagai landasan pengambilan keputusan politik.

Melalui pembahasan pada bab ini, pembaca diajak untuk melihat bagaimana proses kematangan psikologis berperan dalam menentukan kualitas perilaku politik baik pada individu, kelompok,

maupun institusi. Analisis ini tidak hanya relevan untuk menilai karakter pemimpin politik, tetapi juga untuk memahami perilaku pemilih serta dinamika komunikasi politik di ruang publik, termasuk di media sosial. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat membuka ruang refleksi mengenai pentingnya kedewasaan politik sebagai fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadaban.

A. Cermin Kematangan Demokrasi

Politik pada dasarnya merupakan seni sekaligus ilmu dalam upaya meraih, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan. Namun, dalam realitasnya, praktik politik tidak selalu dijalankan dengan kedewasaan berpikir maupun bertindak. Di berbagai konteks, termasuk di Indonesia, masih banyak dijumpai perilaku politik yang menunjukkan kurangnya kematangan emosional dan intelektual. Kondisi ini dikenal sebagai politik kekanak-kanakan, yaitu situasi di mana aktor politik berperilaku impulsif, mengutamakan ego, terjebak dalam konflik personal, atau melakukan manipulasi opini publik tanpa mempertimbangkan etika dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, politik yang dewasa merupakan model politik yang berlandaskan rasionalitas, kemampuan berdialog secara terbuka, kesediaan bernegosiasi, dan keberanian memikul tanggung jawab demi kepentingan umum.

Fenomena politik kekanak-kanakan yang muncul dalam masyarakat kita terlihat dari kecenderungan sebagian politisi yang belum siap secara mental maupun moral dalam memperjuangkan visi dan misi politiknya. Mereka sering terjebak pada upaya menjatuhkan lawan politik melalui pencarian kesalahan pribadi atau kelemahan partai lain, daripada berfokus pada gagasan konstruktif atau solusi terhadap masalah publik. Sikap ini menunjukkan kurangnya orientasi terhadap nilai pelayanan publik serta minimnya kesadaran terhadap peran politik sebagai sarana untuk membangun kesejahteraan kolektif. Sebaliknya, politisi yang matang secara politik akan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengemban amanah partainya, memperjuangkan visi-misi yang dipegang, serta menjaga integritas dalam proses politik.

Tingkat kedewasaan dalam berpolitik sesungguhnya merupakan refleksi dari kualitas demokrasi suatu bangsa. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh adanya pemilu atau kebebasan berbicara, tetapi juga oleh kedewasaan moral dan intelektual para aktor politik dan warganya. Ketika politisi dan masyarakat mampu berdiskusi secara rasional, menghargai perbedaan, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, maka demokrasi berkembang ke arah yang lebih mapan dan beradab. Namun, apabila praktik politik dipenuhi dengan tindakan saling menjatuhkan, politisasi isu sensitif, penyebaran hoaks, serta

ketidakmampuan menerima kritik, maka demokrasi mudah terjebak dalam konflik emosional dan polarisasi.

Oleh karena itu, kedewasaan dalam berpolitik bukan hanya tugas politisi, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai pemilih. Pemilih yang kritis dan rasional akan mendorong perubahan ke arah politik yang lebih etis dan bermartabat. Dengan demikian, tingkat kedewasaan politik mencerminkan sejauh mana suatu bangsa telah memahami makna demokrasi sebagai proses kolektif untuk membangun masa depan bersama, bukan sebagai arena perebutan kekuasaan semata.

B. Politik Kekanak-kanakan: Cermin Imaturitas Demokrasi

Politik kekanak-kanakan merupakan pola perilaku politik yang ditandai oleh kecenderungan saling menyalahkan, membuat sensasi atau drama politik, menyebarkan informasi palsu (hoaks), serta memanfaatkan isu agama dan identitas untuk kepentingan elektoral jangka pendek. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan proses politik, tetapi juga menghambat perkembangan demokrasi yang matang dan berkelanjutan. Pola ini menunjukkan bahwa politik dijalankan bukan sebagai sarana memperjuangkan gagasan dan kesejahteraan publik, melainkan sebagai arena perebutan kekuasaan yang didasari egoisme dan emosi. Niccolò Machiavelli dalam *The Prince* (1532) memang menjelaskan bahwa kekuasaan dapat diraih

dengan berbagai strategi, termasuk kelecikan dan manipulasi. Namun, ketika strategi tersebut dilakukan tanpa tanggung jawab moral dan tidak dibarengi kesadaran etis, politik mudah berubah menjadi kekuatan destruktif yang merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam konteks Indonesia, bentuk politik kekanak-kanakan tampak dalam perilaku elite politik yang kerap terlibat saling sindir dan serang di ruang publik, terutama melalui media sosial. Selain itu, keberadaan buzzer politik yang bertugas membentuk opini publik secara manipulatif tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi semakin memperkeruh dinamika politik. Praktik politik yang demikian menunjukkan bahwa orientasi politik masih terfokus pada perebutan citra dan kekuasaan, bukan pada substansi kebijakan dan penyelesaian persoalan rakyat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya budaya demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jürgen Habermas, di mana ruang publik idealnya menjadi tempat berlangsungnya dialog rasional, kritis, dan inklusif antarwarga negara dan pemimpin politik.

Fenomena politik kekanak-kanakan pada dasarnya mencerminkan tingkat kedewasaan demokrasi suatu negara. Demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu, kebebasan berpendapat, atau sistem kepartaian, tetapi juga dari kualitas interaksi politik yang terjadi di ruang publik. Ketika wacana politik didominasi oleh emosi, sentimen identitas, serangan personal, dan berita palsu,

maka hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi masih berada dalam tahap imatur atau belum matang. Dalam demokrasi yang matang, perbedaan pandangan dihormati, konflik diselesaikan melalui dialog, dan politik dijalankan dengan orientasi jangka panjang demi kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, politik kekanak-kanakan bukan hanya masalah individu politisi, tetapi merupakan cermin budaya politik masyarakat secara keseluruhan. Pemilih yang mudah terprovokasi dan tidak kritis juga berperan dalam mempertahankan pola politik semacam ini. Oleh karena itu, mendorong kedewasaan politik membutuhkan pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan etika publik, serta peningkatan kualitas literasi media. Semakin dewasa cara masyarakat dan politisi berpolitik, semakin kokoh pula fondasi demokrasi yang sehat, beretika, dan berkeadaban.

C. Kedewasaan dalam Berpolitik: Pilar Demokrasi Sehat

Kedewasaan dalam berpolitik tercermin ketika seorang aktor politik mampu mengutamakan kepentingan bangsa dan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sikap ini tampak melalui kemampuan menerima kritik dengan lapang dada, kesiapan berdialog secara terbuka, serta keterampilan membangun koalisi lintas partai, ideologi, dan kepentingan tanpa kehilangan prinsip etika bernegara. Seorang politisi yang matang tidak

mudah tersulut emosi, tidak terjebak dalam politik adu domba, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan publik. Contoh historis yang sangat menonjol adalah Nelson Mandela. Setelah keluar dari penjara dan memimpin Afrika Selatan, ia memilih jalur rekonsiliasi dibanding balas dendam, meskipun luka sejarah apartheid sangat dalam. Keputusannya ini menunjukkan kedewasaan moral dan politik yang luar biasa, yang kemudian menjadi teladan dunia.

Dalam konteks Indonesia, Mohammad Hatta merupakan figur utama yang memperlihatkan kedewasaan politik melalui konsistensinya memperjuangkan demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Ia menolak segala bentuk politik yang berorientasi pada kekuasaan absolut dan menegaskan pentingnya musyawarah sebagai dasar kehidupan bernegara. Hatta sering menekankan bahwa politik harus dijalankan dengan kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Ia mengingatkan bahwa politik yang benar adalah politik yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak menggunakan manipulasi, provokasi, atau kekerasan sebagai alat mencapai tujuan. Gagasannya mengenai “politik yang beradab” menjadi warisan penting yang relevan hingga saat ini.

Kedewasaan politik juga tampak dalam hubungan antara pemerintah dan oposisi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, oposisi bukanlah musuh, melainkan mitra yang berfungsi mengawasi jalannya

pemerintahan agar tetap berada pada rel kepentingan rakyat. Pemerintah dan oposisi yang matang akan mengedepankan argumentasi substantif, bukan serangan pribadi atau upaya menjatuhkan kredibilitas satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Hannah Arendt dalam *The Human Condition* (1958) yang menyatakan bahwa politik seyogianya menjadi ruang bagi tindakan bersama (*praxis*), tempat manusia membangun dunia bersama berdasarkan kesadaran kolektif, bukan sekadar arena mempertontonkan superioritas kekuasaan atau kepentingan sesaat.

Kedewasaan politik merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang stabil dan berkeadaban. Ketika para aktor politik mampu mengelola konflik secara rasional dan mengutamakan dialog, maka proses politik akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan bermakna. Kedewasaan ini mencerminkan pemahaman bahwa politik adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, serta kemampuan melihat kepentingan bersama di atas ego kelompok. Semakin matang budaya politik suatu negara, semakin kuat pula daya tahannya terhadap polarisasi, populisme, radikalisme identitas, serta manipulasi informasi. Dengan demikian, kedewasaan dalam berpolitik bukan hanya merupakan kualitas individu politisi, tetapi juga indikator kematangan demokrasi secara keseluruhan. Demokrasi yang sehat hanya dapat tercapai ketika semua pihak—pemimpin, oposisi, dan

masyarakat—menempatkan etika dan tanggung jawab moral sebagai dasar setiap tindakan politik.

D. Strategi Membangun Kedewasaan Politik

Membangun kedewasaan politik bukanlah proses instan, melainkan usaha jangka panjang yang melibatkan individu, institusi, dan budaya politik suatu bangsa. Salah satu strategi utama adalah memperkuat literasi politik masyarakat melalui pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek formal seperti pemilu dan struktur pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, berpikir kritis, toleransi, dan etika berdialog. Pendidikan politik seharusnya mulai ditanamkan sejak usia sekolah, melalui pembelajaran yang mendorong siswa untuk berdiskusi, menghargai perbedaan, dan memahami bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan tujuan. Selain itu, peran media dan ruang publik digital perlu diarahkan agar menjadi sarana pertukaran gagasan secara sehat, bukan tempat propaganda atau penyebaran kebencian. Transparansi pemerintah dan akuntabilitas lembaga politik juga menjadi faktor penentu, karena keteladanan dari pemimpin akan memperkuat norma-norma politik yang dewasa dalam masyarakat.

Strategi lainnya adalah memperkuat mekanisme partisipasi politik yang inklusif. Partai politik perlu membuka ruang bagi kaderisasi yang sehat, berbasis kompetensi dan integritas, bukan

sekadar hubungan patronase atau kedekatan personal. Sistem politik yang memberi kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik akan mendorong rasa memiliki terhadap negara dan memperkecil kecenderungan untuk berpolitik secara emosional atau antagonistik. Di sisi lain, masyarakat sipil, seperti organisasi kemasyarakatan, komunitas profesional, dan institusi akademik, perlu berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dengan memberikan pendidikan politik berbasis riset dan pendekatan moral. Kolaborasi antara elemen negara dan masyarakat menjadi penting untuk membentuk budaya politik yang lebih rasional, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Pada akhirnya, kedewasaan politik hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak menyadari bahwa politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan ruang membangun masa depan bersama. Proses deliberasi, dialog, kompromi, dan kesediaan untuk mendengar menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem politik yang stabil dan bermartabat. Ketika individu dan institusi politik mampu menahan godaan politik praktis jangka pendek dan mengedepankan visi peradaban yang lebih luas, maka demokrasi akan tumbuh tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substansial—sebagai wujud penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan.

Kesimpulan

Perbedaan mendasar antara politik kekanak-kanakan dan politik yang dijalankan dengan kedewasaan terletak pada orientasi tujuan, landasan moral, serta cara aktor politik berkomunikasi dan mengambil keputusan. Politik yang bersifat kekanak-kanakan biasanya berfokus pada kepentingan jangka pendek, penuh dengan drama, saling serang, dan permainan citra tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Model politik seperti ini cenderung melahirkan kebijakan yang reaktif, dangkal, serta berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan polarisasi yang berkepanjangan. Sementara itu, kedewasaan dalam berpolitik menuntut kemampuan untuk mengelola perbedaan secara bijaksana, memprioritaskan konsensus, mendahulukan kepentingan rakyat, serta memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab moral dan bukan sekadar alat mencapai keinginan pribadi atau kelompok.

Politik yang dijalankan dengan kedewasaan akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang rasional, dialogis, dan inklusif, sehingga dapat menciptakan ruang sosial yang harmonis dan berkeadaban. Di dalamnya terkandung nilai kesabaran, kemampuan mendengarkan, serta penghargaan terhadap kritik dan keberagaman pandangan. Atas dasar itu, membangun kedewasaan politik harus menjadi agenda kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pendidikan politik yang mencerahkan perlu ditanamkan sejak dini agar warga negara memiliki literasi sosial dan

kecakapan berpikir kritis dalam menilai peristiwa politik. Di sisi lain, peningkatan integritas moral dan kapabilitas kepemimpinan para elite politik menjadi syarat penting agar mereka mampu menjadi panutan dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat dan pemimpinnya sama-sama bergerak menuju kedewasaan politik, maka demokrasi akan tumbuh tidak hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai budaya yang mencerminkan kematangan moral dan peradaban bangsa.

BAB IV

PSIKOLOGI KELOMPOK DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM POLITIK

Politik selalu terkait erat dengan kehidupan sosial, karena setiap individu tidak pernah bertindak dalam ruang hampa. Setiap pandangan, pilihan, maupun keputusan politik terbentuk melalui proses interaksi yang berkelanjutan dengan orang lain, baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, organisasi, maupun komunitas yang lebih luas. Interaksi tersebut menjadi ruang di mana nilai, norma, dan simbol politik dipertukarkan, dinegosiasikan, dan diinternalisasi. Oleh karena itu, perilaku politik seseorang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil pertimbangan rasional individual, melainkan sebagai produk dari relasi sosial yang kompleks dan dinamis.

Dalam konteks ini, kelompok sosial memainkan peran sentral dalam membentuk orientasi dan sikap politik individu. Keanggotaan dalam suatu kelompok memberikan rasa identitas, keamanan psikologis, serta kerangka acuan dalam menilai realitas sosial dan politik. Tekanan untuk diterima, keinginan menjaga keharmonisan, dan kebutuhan mempertahankan identitas kelompok sering kali mendorong individu untuk menyesuaikan pandangan politiknya

dengan norma kelompok. Proses konformitas ini tidak selalu disadari, namun berpengaruh kuat dalam membentuk preferensi politik, termasuk dalam menentukan sikap terhadap isu publik, tokoh politik, maupun kebijakan tertentu.

Lebih jauh, dinamika kelompok dapat menghasilkan penguatan keyakinan bersama (group reinforcement), di mana pandangan yang sejalan terus-menerus diperkuat melalui diskusi internal, simbol kolektif, dan narasi bersama. Dalam situasi seperti ini, perbedaan pendapat cenderung dipandang sebagai ancaman terhadap kohesi kelompok, sehingga kritik dan pandangan alternatif sering kali diabaikan atau ditolak. Akibatnya, masyarakat dapat terfragmentasi ke dalam kubu-kubu yang memiliki pandangan politik yang semakin ekstrem dan sulit untuk saling memahami, suatu kondisi yang dikenal sebagai polarisasi politik.

Polarisasi ini semakin diperparah oleh pola komunikasi yang tertutup dan homogen, baik dalam interaksi tatap muka maupun di ruang digital. Media massa dan media sosial memiliki peran penting dalam proses ini, karena tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk realitas sosial. Algoritma media sosial, misalnya, cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan pengguna, sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai echo chamber atau ruang gema. Dalam ruang ini, individu terus-menerus terpapar pada pandangan

yang serupa dengan keyakinannya sendiri, sementara informasi yang berlawanan semakin jarang ditemui.

Dalam kondisi demikian, potensi radikalisasi meningkat. Ketika individu merasa bahwa pandangan ekstremnya mendapat dukungan dan legitimasi dari kelompok serta diperkuat oleh arus informasi yang selektif, batas antara sikap kritis dan penerimaan tanpa refleksi menjadi semakin kabur. Pandangan politik yang awalnya bersifat moderat dapat berkembang menjadi lebih kaku dan eksklusif, bahkan mendorong pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang merugikan kelompok lain. Radikalisasi, dengan demikian, bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi dari interaksi kelompok, konstruksi identitas sosial, dan pengaruh media yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, memahami dinamika kelompok, proses pembentukan identitas sosial, kecenderungan konformitas, serta peran media menjadi kunci penting dalam analisis perilaku politik masyarakat. Pemahaman ini tidak hanya relevan untuk menjelaskan mengapa sikap dan perilaku politik dapat berubah dan mengeras, tetapi juga penting sebagai dasar untuk merancang strategi pendidikan politik, dialog lintas kelompok, dan kebijakan komunikasi publik yang lebih inklusif. Dengan meningkatkan kesadaran akan pengaruh sosial dan media dalam kehidupan politik, masyarakat diharapkan mampu

mengembangkan sikap politik yang lebih reflektif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah bersama.

A. Pengaruh Identitas Sosial terhadap Perilaku Politik

Henri Tajfel dan John Turner (1979) melalui Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory) berpendapat bahwa identitas seseorang tidak hanya dibangun dari karakteristik pribadi, tetapi juga dari keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok berbasis agama, etnis, bahasa, kelas sosial, maupun orientasi politik seperti partai, gerakan sosial, atau komunitas ideologi. Dengan kata lain, individu tidak hanya “menjadi dirinya sendiri”, tetapi juga “menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.” Dalam konteks politik, hal ini berarti bahwa pilihan, sikap, dan preferensi politik seseorang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan dan kehormatan kelompok tempat ia bergabung.

Tajfel menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menata dunia sosial dalam dua kategori besar: ingroup (kelompok yang dianggap sebagai “kita”) dan outgroup (kelompok yang dipandang sebagai “mereka”). Proses kategorisasi ini memunculkan loyalitas terhadap ingroup, karena kelompok tersebut menjadi sumber identitas, rasa aman, dan solidaritas. Namun, pada saat yang sama, outgroup sering kali dipersepsikan sebagai lawan atau

ancaman yang harus dihadapi, baik secara ideologis maupun sosial. Perbedaan pandangan yang awalnya bersifat wajar dapat berubah menjadi polarisasi yang tajam ketika identitas kelompok semakin diperkuat dan dijadikan dasar dalam menilai benar-salah atau baik-buruk.

Dalam praktik politik, hal ini terlihat ketika individu tetap bertahan pada pendapat kelompoknya meski informasi yang diterima bertentangan dengan fakta. Hal tersebut terjadi karena menerima informasi dari luar berarti mengancam identitas diri dan posisi kelompok. Fenomena ini diperkuat oleh kehadiran media sosial yang mendorong munculnya echo chamber, yaitu ruang informasi yang hanya memperkuat keyakinan kelompok dan menyaring informasi dari luar yang berbeda. Akibatnya, individu semakin yakin bahwa pandangannya adalah satu-satunya yang benar, sementara kelompok lain dianggap salah atau bahkan berbahaya. Berikut contoh-contoh penerapan dalam dunia politik:

1. Konservatif vs Progresif: Di banyak negara, orang yang memiliki identitas politik konservatif cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, sementara kelompok progresif mendorong perubahan sosial. Perbedaan ini kerap melahirkan konflik ideologis mengenai isu seperti perkawinan, pendidikan, kebijakan gender, atau peran agama dalam negara.

2. Nasionalis vs Globalis: Dalam banyak wacana internasional, kelompok nasionalis mempromosikan kepentingan negara sebagai prioritas utama. Sebaliknya, kelompok globalis menekankan kerja sama antarnegara dan solidaritas global. Perbedaan cara pandang ini dapat memengaruhi kebijakan imigrasi, perdagangan, hingga diplomasi.
3. Mayoritas vs Minoritas: Dalam konteks Indonesia, identitas agama dan etnis sering menjadi dasar afiliasi politik. Misalnya, kampanye politik yang memanfaatkan sentimen “kelompok mayoritas” sering menguatkan perasaan bahwa ada kelompok lain yang menjadi ancaman. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa proses pemilu lokal maupun nasional, di mana isu identitas menjadi lebih dominan daripada program kerja.
4. Fans Club Politik dan Politik Selebriti: Di era digital, tokoh politik sering diperlakukan layaknya selebritas yang memiliki “basis fanatik”. Pendukung tokoh tertentu akan membela tokohnya mati-matian dan memandang rivalnya sebagai musuh. Fenomena ini terjadi di berbagai negara, termasuk dalam perdebatan mengenai tokoh nasional, gubernur, atau pemimpin partai tertentu.

Dengan demikian, Teori Identitas Sosial memberikan pemahaman bahwa polarisasi politik tidak hanya lahir dari perbedaan ide atau kebijakan, tetapi terutama dari kebutuhan manusia untuk mempertahankan identitas kelompok. Semakin kuat identitas

kelompok dibangun, semakin besar kemungkinan sikap politik menjadi kaku dan sulit berdialog dengan kelompok lain.

B. Pemikiran Kelompok dan Keputusan Politik

Irving Janis (1972) memperkenalkan istilah Groupthink untuk menggambarkan kondisi ketika suatu kelompok yang memiliki kohesi atau rasa kebersamaan yang sangat kuat cenderung mengutamakan kesepakatan bersama dibandingkan proses penilaian yang kritis dan objektif. Dalam situasi ini, keinginan untuk mempertahankan harmoni dan persatuan kelompok justru menghambat kemampuan anggota untuk mempertimbangkan berbagai alternatif atau menampung pandangan yang berbeda. Fenomena ini sangat umum terjadi dalam konteks politik, terutama dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat elit, seperti di partai politik, lembaga legislatif, atau lingkaran kabinet pemerintahan.

Janis menekankan bahwa Groupthink dapat menurunkan kualitas pengambilan keputusan karena beberapa alasan. Pertama, anggota kelompok sering kali merasa enggan untuk mengemukakan kritik terhadap pandangan yang mendominasi, terutama ketika pemimpin atau figur otoritatif telah menunjukkan preferensinya. Kedua, informasi penting yang seharusnya dipertimbangkan dapat diabaikan atau disembunyikan karena dianggap dapat memicu perdebatan internal. Ketiga, terdapat tekanan tersirat maupun eksplisit

agar setiap anggota menunjukkan kesetiaan kepada kelompok, sehingga perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan internal. Selain itu, kelompok juga dapat mengembangkan ilusi kebulatan suara, yaitu keyakinan bahwa semua anggota sepakat, meskipun sebenarnya beberapa hanya diam karena tekanan.

Akibat dari kondisi tersebut, keputusan politik yang dihasilkan sering kali bersifat tergesa-gesa, kurang matang, dan mengabaikan risiko yang sebenarnya dapat diprediksi. Janis menunjuk Invasi Teluk Babi (Bay of Pigs) tahun 1961 sebagai contoh klasik Groupthink, di mana Presiden John F. Kennedy bersama para penasihatnya gagal mempertanyakan validitas strategi invasi terhadap Kuba. Karena kritik internal ditekan dan asumsi kelompok dianggap tak terbantahkan, keputusan yang diambil ternyata tidak realistis dan berujung pada kegagalan militer yang memalukan. Contoh lain yang relevan:

1. Perang Irak 2003

Administrasi Presiden George W. Bush memutuskan untuk menginvasi Irak dengan klaim bahwa negara tersebut memiliki senjata pemusnah massal. Banyak suara kritis yang menentang atau mempertanyakan bukti tersebut diabaikan, sehingga keputusan politik akhirnya didasarkan pada asumsi yang tidak akurat.

2. Pengambilan keputusan dalam organisasi politik lokal

Dalam beberapa partai politik di Indonesia, keputusan kandidat kepala daerah sering kali ditentukan oleh elite partai tanpa mempertimbangkan aspirasi akar rumput. Para anggota yang berbeda pendapat enggan mengekspresikan ketidaksetujuan karena khawatir dianggap tidak loyal.

3. Kelompok aktivisme atau komunitas daring

Dalam kelompok aktivis di media sosial, kritik internal sering dipandang sebagai pengkhianatan. Ini menyebabkan strategi kampanye yang tidak efektif tetap dipertahankan demi menjaga “kebersamaan”.

Dengan demikian, Groupthink mengingatkan kita bahwa konsensus yang tampak kompak tidak selalu mencerminkan kualitas keputusan yang baik. Justru, ruang bagi kritik konstruktif dan keberagaman pandangan sangat penting untuk mencegah kesalahan politik yang berulang.

C. Konformitas, Kepatuhan, dan Radikalisasi dalam Kelompok

Dalam dinamika politik kelompok, terdapat tiga proses sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang membentuk keyakinan dan perilaku politiknya, yaitu konformitas, kepatuhan, dan radikalisasi. Proses-proses ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan

saling berkaitan dan dapat memperkuat satu sama lain, terutama dalam konteks sosial yang penuh tekanan, polarisasi, atau persaingan identitas.

Konformitas dapat dipahami sebagai kecenderungan individu untuk menyesuaikan persepsi, keyakinan, atau tindakan mereka agar sesuai dengan norma atau pandangan yang dominan dalam kelompok. Eksperimen Solomon Asch (1951) menunjukkan bagaimana seseorang bisa mengikuti pendapat mayoritas meskipun ia menyadari bahwa pendapat itu jelas-jelas keliru. Fenomena ini sangat relevan dalam ranah politik, sebab individu sering kali mendukung suatu pandangan politik bukan karena pemahaman mendalam atau kesesuaian nilai pribadi, melainkan karena dorongan untuk diterima, dihargai, atau dianggap sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu. Dengan kata lain, identitas kelompok dapat menjadi faktor yang lebih kuat daripada argumentasi rasional.

Kepatuhan terhadap otoritas juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Stanley Milgram (1963) melalui eksperimen elektrokusinya menunjukkan bahwa individu cenderung mematuhi perintah dari figur otoritas, bahkan ketika perintah tersebut bertentangan dengan nilai moral dasar. Dalam konteks politik, hal ini menjelaskan bagaimana rezim otoriter atau pemimpin dengan kekuasaan yang besar dapat memperoleh dukungan luas dari masyarakat biasa. Kepatuhan tersebut dapat

muncul karena rasa hormat terhadap hierarki, ketergantungan pada struktur sosial yang mapan, atau anggapan bahwa otoritas memiliki pengetahuan dan legitimasi moral yang lebih tinggi. Dengan demikian, kepatuhan bukan hanya hasil dari paksaan, tetapi juga dari internalisasi struktur kekuasaan.

Sementara itu, radikalisasi merujuk pada proses bertahap ketika individu atau kelompok mengadopsi keyakinan politik atau ideologis yang semakin ekstrem. Clark McCauley dan Sophia Moskalenko (2011) dalam karyanya *Friction* menjelaskan bahwa radikalisasi biasanya tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui akumulasi pengalaman sosial, tekanan lingkungan, serta perasaan ketidakadilan atau marginalisasi. Ketika suatu kelompok merasa terancam, dipinggirkan, atau diremehkan, solidaritas internal akan meningkat, dan norma kelompok menjadi lebih kaku. Individu yang sangat beridentifikasi dengan kelompok tersebut dapat terdorong untuk menerima ideologi yang semakin ekstrem demi melindungi atau memperjuangkan keberlangsungan kelompok. Proses ini sering diperkuat oleh propaganda, media sosial, dan dinamika "kami vs mereka" yang menghapus ruang dialog.

Secara keseluruhan, ketiga proses ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku politik tidak selalu berakar pada pertimbangan rasional atau pilihan yang sepenuhnya individual. Sebaliknya, politik kelompok sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial, struktur otoritas,

dan dinamika identitas kolektif. Pemahaman terhadap proses ini menjadi penting untuk mencegah polarisasi ekstrem, memperkuat literasi politik, dan membangun ruang demokrasi yang lebih kritis dan inklusif.

D. Fenomena Populisme dan Pemimpin Karismatik

Populisme merupakan sebuah pendekatan atau gaya politik yang menekankan klaim bahwa ia mewakili aspirasi “rakyat biasa” yang dianggap tertindas, tidak didengar, atau diabaikan oleh kelompok elite yang berkuasa. Populisme biasanya tumbuh subur dalam situasi sosial-politik yang diwarnai kekecewaan masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi yang meningkat, ketidakadilan distribusi sumber daya, pengangguran yang tinggi, serta hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi formal seperti partai politik, parlemen, atau lembaga hukum. Dalam konteks tersebut, populisme hadir bukan sekadar sebagai ideologi, tetapi sebagai strategi politik yang memobilisasi sentimen emosional masyarakat dengan menawarkan narasi pemisahan yang jelas antara “rakyat” versus “elite”.

Pemikir seperti Ernesto Laclau (2005) dalam karyanya *On Populist Reason* menegaskan bahwa populisme tidak bisa dipahami hanya sebagai gerakan spontan, tetapi sebagai proses konstruksi identitas politik, di mana kategori “rakyat” dibangun secara simbolis sebagai satu entitas kolektif yang bersatu menghadapi pihak “mereka”

yang dianggap berkuasa dan menindas. Dalam kerangka ini, populisme bekerja melalui penguatan antagonisme, yaitu menciptakan garis pembatas yang tegas antara kelompok yang diperjuangkan dan kelompok yang dilawan. Oleh karena itu, tokoh atau pemimpin populis sering menjadi perantara penting dalam membentuk narasi tersebut. Pemimpin inilah yang menyatukan berbagai keluhan dan aspirasi yang tersebar dalam masyarakat menjadi satu kesatuan tuntutan politik.

Penjelasan mengenai peran pemimpin dalam populisme dapat dihubungkan dengan teori Max Weber tentang bentuk-bentuk legitimasi otoritas. Weber membedakan tiga tipe otoritas utama: legal-rasional (yang bersandar pada hukum dan aturan formal), tradisional (yang berakar pada kebiasaan atau warisan budaya), dan karismatik (yang didasarkan pada kemampuan pribadi seorang pemimpin yang dianggap luar biasa oleh pengikutnya). Dalam banyak gerakan populis, tipe otoritas karismatik mendominasi. Pemimpin populis memperoleh dukungan bukan semata-mata karena struktur institusi, tetapi karena daya tarik personal, kemampuan retorik, serta kemampuannya membangkitkan rasa harapan, kedekatan emosional, dan solidaritas sesama “rakyat”.

Kemunculan pemimpin karismatik ini seringkali terjadi dalam masa-masa ketidakpastian atau krisis sosial, ketika masyarakat mencari figur yang dapat memberikan arah, jawaban sederhana terhadap

masalah kompleks, serta simbol identitas baru yang dapat mempersatukan mereka. Dampaknya dapat bersifat ambivalen: dalam kondisi tertentu, pemimpin populus dapat mendorong perubahan positif seperti membuka ruang partisipasi politik bagi kelompok marjinal. Namun, dalam situasi lain, kekuatan karisma yang tidak diimbangi dengan mekanisme demokrasi dapat berujung pada konsentrasi kekuasaan, kultus individu, bahkan potensi otoritarianisme.

E. Peran Media dalam Pembentukan Opini Publik

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik, terutama di era digital dan media sosial saat ini, di mana informasi mengalir dengan cepat dan dapat diakses hampir tanpa batas. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga berperan dalam memilih, menyusun, dan menyajikan isu-isu tertentu sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Dengan demikian, media berperan sebagai aktor penting dalam mengarahkan bagaimana masyarakat melihat suatu peristiwa, siapa yang mereka anggap penting, dan bagaimana mereka menilai suatu kebijakan atau tokoh politik.

Dalam Agenda-Setting Theory, Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan

untuk menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik. Media tidak secara langsung memberi tahu masyarakat apa pendapat yang harus dipegang, tetapi menentukan topik apa yang layak diperhatikan dan dibicarakan. Ketika media memberikan sorotan yang besar pada suatu isu, misalnya korupsi, konflik politik, atau isu ekonomi. Isu tersebut menjadi lebih menonjol di benak masyarakat. Akibatnya, persepsi publik terhadap prioritas sosial dan politik sangat sering merupakan cerminan dari prioritas yang ditentukan oleh media.

Selanjutnya, Framing Theory yang dijelaskan oleh Robert Entman (1993) menunjukkan bahwa media tidak hanya memilih isu, tetapi juga cara isu tersebut ditafsirkan. Proses pembingkai (framing) melibatkan seleksi elemen tertentu dari suatu realitas untuk disorot, sementara aspek lain disamarkan. Cara media mendeskripsikan suatu isu—misalnya dengan istilah “ancaman”, “krisis”, atau sebaliknya “kesempatan” dan “harapan”—dapat memengaruhi emosi, respons, dan sikap politik publik. Sebagai contoh, pemberitaan mengenai imigrasi yang dibingkai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dapat memicu ketakutan dan dukungan terhadap kebijakan pengetatan perbatasan. Sebaliknya, jika imigrasi dibingkai sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan keberagaman budaya, publik dapat lebih mendukung kebijakan inklusif. Dengan demikian, framing bukan sekadar cara melaporkan peristiwa, melainkan strategi pembentukan makna.

Selain itu, teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann (1974) menjelaskan bagaimana opini publik dapat dibentuk bukan hanya oleh apa yang diberitakan media, tetapi juga oleh apa yang tidak diungkapkan. Menurut teori ini, individu cenderung enggan menyatakan pendapat yang mereka rasa berbeda atau bertentangan dengan pendapat mayoritas karena takut dikucilkan atau dianggap tidak sejalan dengan norma sosial. Akibatnya, opini minoritas menjadi semakin tidak terdengar, sementara opini mayoritas tampak semakin dominan. Proses ini menciptakan lingkaran yang berulang, di mana keterdiamannya individu memperkuat persepsi bahwa opini mayoritas adalah satu-satunya opini yang sah atau diterima. Hal ini sangat relevan dalam konteks media sosial, di mana tekanan sosial berupa "likes", komentar, dan reaksi publik dapat mempercepat terbentuknya spiral keheningan tersebut.

Secara keseluruhan, ketiga teori ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas politik, bukan hanya melalui penyebaran informasi, tetapi melalui penentuan isu, pembentukan cara pandang, dan penciptaan norma wacana publik. Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting agar masyarakat mampu berpikir kritis dan menyadari bagaimana informasi dibentuk dan diarahkan.

Kesimpulan

Psikologi kelompok memberikan landasan konseptual yang sangat penting untuk memahami perilaku politik dalam konteks sosial. Melalui perspektif ini, kita dapat melihat bahwa individu tidak pernah sepenuhnya bertindak sebagai entitas yang terpisah, melainkan selalu terhubung dengan identitas kelompok, norma sosial, dan dinamika relasional yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak. Konsep seperti identitas sosial menjelaskan bagaimana seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu, dan bagaimana loyalitas terhadap kelompok tersebut dapat memengaruhi pilihan politik, sikap terhadap pihak lain, hingga cara mereka menilai kebenaran atau fakta.

Selain itu, proses seperti radikalisasi menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam suatu kelompok politik dapat mengalami intensifikasi bertahap, terutama ketika kelompok tersebut merasa terancam atau terpinggirkan. Dalam kondisi semacam ini, solidaritas internal meningkat, sementara pandangan terhadap kelompok luar menjadi semakin negatif, sehingga memunculkan potensi konflik atau perpecahan sosial. Di sisi lain, figur kepemimpinan karismatik dapat memperkuat identitas kolektif dengan memberikan visi, narasi moral, dan simbol yang mempersatukan pengikutnya. Pemimpin semacam ini mampu memobilisasi emosi, menciptakan harapan bersama, bahkan mendorong tindakan politik yang besar dan masif.

Peran media juga tidak dapat diabaikan, karena media berfungsi sebagai sarana utama yang membentuk persepsi publik mengenai isu politik, tokoh, dan kelompok sosial. Melalui proses pembingkaihan isu dan penentuan agenda publik (agenda-setting), media dapat memperkuat identitas kelompok tertentu sekaligus memperlebar jarak dengan kelompok lain. Dalam era digital, penyebaran informasi yang cepat dan luas tidak hanya memperkuat solidaritas internal kelompok, tetapi juga dapat mempercepat penyebaran disinformasi, mempertinggi polarisasi, dan memperlebar kesenjangan pemahaman antara kelompok yang berbeda pandangan.

Dengan demikian, politik tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pengambilan keputusan rasional atau kompetisi kekuasaan semata. Politik adalah arena di mana emosi, identitas, simbol, dan pengalaman kolektif memainkan peran yang sangat menentukan. Memahami dinamika psikologi kelompok menjadi semakin penting di tengah tantangan politik kontemporer. Kesadaran terhadap aspek-aspek psikologis ini memungkinkan kita merumuskan strategi sosial dan politik yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada dialog, bukan hanya konfrontasi.

BAB V

KONFLIK, KEKUASAAN, DAN AGRESI DALAM PSIKOLOGI POLITIK

Konflik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, karena politik pada hakikatnya melibatkan perebutan kepentingan, sumber daya, dan kekuasaan di antara berbagai kelompok sosial. Persaingan antar partai, ketegangan antar kelompok identitas, hingga pertentangan antar negara semuanya menunjukkan bahwa konflik bukan hanya persoalan strategi atau perbedaan kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan dinamika psikologis yang memengaruhi persepsi, motivasi, dan perilaku para aktor politik. Melihat konflik politik dari sudut pandang psikologi membantu kita memahami bagaimana ketidakpercayaan, stereotip, ketakutan, dan emosi kolektif dapat memperdalam perpecahan dan memperpanjang ketegangan.

Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi faktor yang sangat sentral. Cara kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan dijalankan akan memengaruhi bentuk dan intensitas konflik yang muncul. Kekuasaan tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolis dan psikologis: ia dapat mengatur siapa yang dianggap benar, siapa yang berhak

berbicara, dan siapa yang harus diam. Ketidakseimbangan kekuasaan sering kali melahirkan rasa ketidakadilan, yang kemudian dapat memicu perlawanan, protes, atau bahkan pemberontakan. Karena itu, memahami konflik politik memerlukan pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan mengatur hubungan antar kelompok serta bagaimana legitimasi kekuasaan dibangun atau dipertanyakan.

Selain itu, kepemimpinan memiliki peran kunci dalam menentukan apakah konflik akan meningkat (eskalasi) atau mereda (de-eskalasi). Pemimpin dapat memperkuat konflik dengan memanfaatkan retorika pemisahan, kebencian, dan polarisasi untuk memperkuat posisi politik mereka. Di sisi lain, pemimpin juga dapat menjadi agen rekonsiliasi dengan mendorong dialog, kompromi, dan kesadaran akan kepentingan bersama. Dengan demikian, sikap dan gaya kepemimpinan sangat memengaruhi arah perkembangan konflik.

Tidak kalah penting, kekerasan politik—mulai dari intimidasi verbal, represi negara, hingga perang bersenjata—seringkali berakar pada proses psikologis seperti identifikasi kelompok yang kaku, dehumanisasi lawan, dan internalisasi narasi bahwa pihak lain merupakan ancaman eksistensial. Ketika suatu kelompok melihat kelompok lain bukan lagi sebagai sesama manusia tetapi sebagai “musuh”, maka tindakan kekerasan menjadi lebih mudah dibenarkan.

Melalui pemahaman psikologis mengenai konflik politik, kita dapat mengidentifikasi strategi untuk mengelola dan meredakan

konflik, seperti memfasilitasi komunikasi antar kelompok, membangun empati, memperkuat institusi mediasi, serta mendorong kepemimpinan yang inklusif dan dialogis. Pada akhirnya, memahami konflik tidak hanya berarti memahami perpecahan, tetapi juga membuka kemungkinan untuk transformasi sosial menuju hubungan politik yang lebih adil dan damai.

A. Teori Konflik dalam Psikologi Politik

Teori konflik dalam psikologi menekankan bahwa konflik tidak hanya lahir dari perebutan sumber daya material atau perbedaan ideologi semata. Konflik juga dapat berakar pada aspek-aspek psikologis yang lebih mendasar, seperti cara individu atau kelompok memandang dirinya sendiri, bagaimana mereka membedakan diri dari kelompok lain, serta sejauh mana kebutuhan emosional dan identitas sosial mereka terpenuhi. Dengan kata lain, konflik sering kali berhubungan erat dengan kebutuhan manusia untuk dihargai, diakui, dan merasa memiliki tempat dalam tatanan sosial.

Salah satu teori awal yang penting adalah Realistic Conflict Theory yang dikembangkan oleh Muzafer Sherif (1961) melalui eksperimen kelompok anak laki-laki di kamp Robbers Cave. Teori ini menunjukkan bahwa konflik cenderung muncul ketika dua kelompok atau lebih bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, baik itu kekuasaan, fasilitas ekonomi, atau pengaruh sosial. Persaingan

tersebut melahirkan stereotip negatif, permusuhan, dan penguatan batas identitas antara “kelompok kami” dan “mereka”. Dengan demikian, konflik tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyangkut pembentukan solidaritas internal dan antagonisme terhadap kelompok lain.

Namun, konflik tidak selalu berakhir setelah isu sumber daya terselesaikan. Edward Azar kemudian mengembangkan konsep Protracted Social Conflict (PSC) untuk menjelaskan konflik jangka panjang yang terjadi tidak hanya karena perebutan sumber daya, tetapi karena kegagalan sistem politik dalam memenuhi kebutuhan identitas, pengakuan, keamanan, dan partisipasi kelompok tertentu dalam proses sosial. Dalam konflik jenis ini, ketidakpuasan berlangsung terus-menerus dan diwariskan antar generasi, sehingga konflik menjadi bagian dari struktur sosial dan memori kolektif. Kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan identitas atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung mengalami frustrasi kolektif, yang kemudian meningkatkan kemungkinan munculnya perlawanan politik atau bahkan kekerasan.

Dengan demikian, teori konflik dalam psikologi mengajarkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan hanya melalui distribusi sumber daya atau kesepakatan politik formal. Upaya resolusi harus mempertimbangkan aspek psikologis dan simbolis, seperti bagaimana kelompok diperlakukan, apakah mereka merasa dihormati,

dan apakah mereka memiliki ruang yang setara untuk menyuarakan aspirasi. Tanpa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut, konflik akan tetap hidup dan berpotensi muncul kembali dalam bentuk yang lebih intens.

B. Kekuasaan, Otoritas, dan Legitimasi

Kekuasaan dalam politik tidak semata-mata bersumber dari struktur formal seperti jabatan, lembaga, atau peraturan yang berlaku, tetapi juga sangat bergantung pada persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan tersebut. Dalam konteks psikologi politik, legitimasi menjadi elemen kunci karena ia menentukan sejauh mana masyarakat bersedia menerima otoritas tanpa paksaan. Seorang pemimpin dapat memiliki posisi formal, tetapi tanpa kepercayaan publik, kekuasaannya akan rapuh dan mudah dipertanyakan. Karena itu, kekuasaan politik selalu bersifat relasional—ia hidup dan bertahan sejauh diakui serta diinternalisasi oleh individu-individu dalam masyarakat.

Max Weber, salah satu sosiolog dan filsuf politik paling berpengaruh, membedakan kekuasaan berdasarkan tiga tipe otoritas utama yang menjelaskan sumber legitimasi yang berbeda-beda. Pertama, otoritas tradisional, yaitu kekuasaan yang berakar pada adat, kebiasaan, dan warisan sejarah. Tipe ini sering dijumpai pada sistem monarki atau pemerintahan adat, di mana legitimasi diperoleh karena

adanya penerimaan sosial terhadap warisan leluhur. Kedua, otoritas legal-rasional, yang didasarkan pada sistem hukum dan aturan formal yang disepakati bersama. Dalam tipe ini, kekuasaan dianggap sah karena dijalankan melalui prosedur institusional yang jelas, seperti pemilu atau konstitusi. Ketiga, otoritas karismatik, yang bersumber dari daya tarik pribadi, kemampuan retorika, dan kepribadian luar biasa seorang pemimpin. Pemimpin dengan otoritas karismatik sering muncul pada masa krisis, ketika masyarakat membutuhkan figur penyelamat yang mampu mempersatukan dan memberi arah.

Sementara itu, John R. P. French dan Bertram Raven (1959) memperluas analisis Weber dengan memperkenalkan konsep Lima Basis Kekuasaan Sosial, yang menjelaskan bagaimana individu atau pemimpin dapat memengaruhi orang lain dalam berbagai konteks sosial. Lima basis tersebut meliputi:

1. Kekuasaan imbalan (reward power) – kemampuan memberikan penghargaan atau manfaat bagi pihak yang patuh.
2. Kekuasaan koersif (coercive power) – kemampuan memaksa atau memberikan hukuman terhadap ketidakpatuhan.
3. Kekuasaan legitimasi (legitimate power) – kekuasaan yang diakui karena berasal dari posisi atau jabatan resmi.

4. Kekuasaan keahlian (*expert power*) – otoritas yang muncul dari pengetahuan, kompetensi, atau keahlian tertentu yang diakui.
5. Kekuasaan rujukan (*referent power*) – kekuatan yang bersumber dari identifikasi dan rasa kagum pengikut terhadap pemimpin.

Dalam praktik politik modern, pemimpin yang efektif biasanya tidak hanya bergantung pada satu jenis kekuasaan, melainkan memadukan berbagai bentuk kekuasaan tersebut untuk membangun dan mempertahankan pengaruhnya. Misalnya, seorang presiden mungkin memiliki kekuasaan legal melalui konstitusi (*legitimate power*), namun keberhasilan kepemimpinannya juga ditentukan oleh karisma personal (*referent power*), keahlian dalam mengelola pemerintahan (*expert power*), serta kemampuannya memberikan insentif atau ancaman (*reward dan coercive power*). Kombinasi ini memungkinkan pemimpin untuk tidak hanya memperoleh kekuasaan secara formal, tetapi juga memelihara legitimasi sosial dan emosional di mata masyarakat.

Dengan demikian, kekuasaan politik tidak dapat dipahami hanya sebagai struktur hierarkis, tetapi sebagai proses interaktif yang melibatkan kepercayaan, pengaruh, dan persepsi sosial. Ketika legitimasi runtuh, kekuasaan pun kehilangan fondasinya, seberapa besar pun kontrol formal yang dimiliki. Oleh sebab itu, memahami

dinamika psikologis di balik kekuasaan menjadi kunci untuk menjelaskan stabilitas, efektivitas, maupun keruntuhan suatu sistem politik.

C. Agresi Politik dan Kekerasan Kolektif

Agresi politik merujuk pada tindakan kekerasan, ancaman, ataupun intimidasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi, mempertahankan, atau merebut kekuasaan politik. Agresi ini dapat dilakukan oleh berbagai aktor, mulai dari individu, kelompok sosial, organisasi militan, hingga pemerintah atau negara melalui aparatur resminya. Dalam banyak kasus, agresi politik tidak hanya dimaknai sebagai tindakan fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan simbolik, tekanan psikologis, dan upaya delegitimasi yang sistematis terhadap kelompok lawan. Dengan demikian, agresi politik merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan dimensi emosional, struktural, dan ideologis.

Salah satu teori yang paling awal menjelaskan penyebab agresi adalah Frustration-Aggression Hypothesis yang dikemukakan oleh Dollard dan rekan-rekannya (1939). Teori ini menyatakan bahwa agresi muncul sebagai respons terhadap frustrasi, yaitu perasaan terhalang dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan yang penting. Dalam konteks politik, frustrasi dapat timbul akibat ketidakadilan sosial, penindasan struktural, marginalisasi kelompok

tertentu, atau kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Ketika frustrasi tersebut tidak tersalurkan melalui mekanisme demokratis dan dialogis, maka ia dapat berkembang menjadi kemarahan kolektif yang mendorong tindakan kekerasan atau pemberontakan. Dengan kata lain, agresi politik sering kali merupakan ekspresi dari pengalaman ketidakadilan yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan.

Selain faktor frustrasi, Albert Bandura mengemukakan bahwa kekerasan juga dapat dipelajari melalui proses pembelajaran sosial (social learning). Menurut Bandura, individu mempelajari perilaku agresif dengan mengamati, meniru, dan menginternalisasi tindakan yang dianggap efektif atau diakui dalam lingkungannya. Dalam konteks politik kontemporer, media massa, pidato pemimpin, propaganda digital, dan simbol-simbol ideologis memainkan peran penting sebagai sarana pembelajaran kekerasan. Ketika kekerasan diglorifikasi, dijustifikasi, atau digambarkan sebagai tindakan heroik untuk membela kelompok atau ideologi tertentu, maka individu maupun kelompok dapat terdorong untuk melakukan agresi secara kolektif. Retorika kebencian, dehumanisasi terhadap lawan politik, dan penyebaran narasi ancaman menjadi pemicu kuat dalam eskalasi agresi politik.

Dengan demikian, agresi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan spontan atau irasional. Ia merupakan hasil dari

interaksi antara kondisi struktural, seperti ketidaksetaraan dan penindasan, dengan proses psikologis, seperti frustrasi, identifikasi kelompok, dan pembelajaran sosial. Untuk mencegah dan mengurangi agresi politik, strategi penanganan harus mencakup upaya memperkuat keadilan sosial, membuka ruang dialog, mengendalikan retorika yang memecah belah, serta membangun media dan pendidikan yang mendorong empati dan pemikiran kritis.

D. Dinamika “Kami vs Mereka”: Polarisasi Politik

Konflik politik kerap berkembang melalui pembentukan batas yang tegas antara kelompok “kami” dan “mereka”. Pembelahan ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan suatu konstruksi sosial yang diperkuat oleh faktor identitas, narasi media, serta strategi elite politik dalam mempertahankan dukungan. Dalam perspektif psikologi sosial, Marilynn Brewer (1999) melalui teori Ingroup Bias menekankan bahwa individu memiliki kecenderungan alami untuk lebih mempercayai, bersimpati, dan menunjukkan solidaritas kepada anggota kelompok yang dianggap sebagai bagian dari dirinya. Pada saat yang sama, kelompok luar sering dipandang dengan rasa curiga, jarak emosional, atau bahkan dianggap sebagai ancaman. Pola ini membuat konflik tidak lagi berbasis argumentasi rasional, tetapi menjadi persoalan afeksi, loyalitas, dan pertahanan identitas.

Selain itu, kerangka Stereotype Content Model (SCM) yang dikembangkan oleh Susan Fiske dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa persepsi terhadap kelompok lain biasanya dipetakan melalui dua dimensi utama, yakni kehangatan (warmth) dan kompetensi (competence). Kelompok yang dianggap hangat namun tidak kompeten, misalnya, cenderung memicu rasa kasihan atau perlindungan, sementara kelompok yang dipersepsikan kompeten tetapi tidak hangat dapat menimbulkan rasa iri atau ancaman. Kombinasi persepsi ini kemudian memunculkan berbagai emosi sosial seperti simpatik, penghinaan, kebencian, hingga kecemasan—semua yang sangat relevan dalam dinamika pertarungan politik. Dengan demikian, persepsi kita terhadap pihak lain dalam arena politik tidak hanya dibentuk oleh fakta atau argumen, tetapi juga oleh konstruksi psikologis yang mengaitkan identitas kelompok, stereotip sosial, serta emosi yang menyertainya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa polarisasi politik sering kali bersifat intens dan sulit diredakan.

E. Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi Politik

Upaya untuk mengatasi konflik politik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai dinamika psikologis yang terbentuk selama dan setelah konflik berlangsung. Konflik yang berkepanjangan tidak hanya menghasilkan kerusakan fisik dan ketidakstabilan politik,

tetapi juga meninggalkan trauma kolektif, yaitu pengalaman luka emosional yang dialami bersama oleh suatu kelompok atau komunitas. Trauma ini dapat membentuk narasi identitas yang penuh kecurigaan, ketakutan, dan kebencian yang tertanam kuat dalam ingatan sosial. Akibatnya, meskipun kekerasan fisik telah berhenti, konflik psikologis dan sosial dapat terus berlanjut dalam bentuk diskriminasi, stereotip, dan penolakan untuk berdialog. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada penyusunan kesepakatan politik atau reformasi institusional, tetapi juga harus mencakup upaya membangun kembali hubungan antarindividu dan antar kelompok.

Dalam kerangka ini, Herbert Kelman (1999) memperkenalkan pendekatan *problem-solving workshop* sebagai salah satu metode penting untuk meredakan ketegangan dan membuka jalan menuju rekonsiliasi. Melalui dialog yang berlangsung dalam suasana informal, para peserta dari kelompok-kelompok yang berkonflik diundang untuk berbagi pengalaman, menjelaskan motivasi, dan mengungkapkan rasa takut serta harapan mereka tanpa tekanan politik maupun opini publik. Pendekatan ini berupaya menciptakan ruang aman di mana para peserta dapat melihat pihak lain bukan sebagai lawan atau musuh, melainkan sebagai manusia dengan kebutuhan dan kerentanan yang serupa. Dengan bertukar perspektif seperti ini, muncul kemungkinan untuk membangun empati dan rasa saling percaya yang sebelumnya terhalang oleh

permusuhan dan prasangka. Selain itu, pendekatan ini sering kali menghasilkan penemuan kepentingan bersama, yaitu nilai atau tujuan yang dapat menjadi dasar bagi perdamaian jangka panjang.

Di sisi lain, John Paul Lederach (1997) menekankan pentingnya melihat rekonsiliasi sebagai proses yang tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga moral dan emosional. Dalam model rekonsiliasinya, Lederach mengintegrasikan empat pilar utama: kebenaran, keadilan, belas kasih, dan perdamaian. Kebenaran diperlukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi selama konflik, sehingga pengalaman korban tidak dihapus atau diabaikan. Keadilan diperlukan agar pelaku pelanggaran tidak sepenuhnya lolos dari pertanggungjawaban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemulihan. Belas kasih membuka ruang bagi pengampunan, bukan sebagai bentuk pelupaan, tetapi sebagai langkah sadar untuk melepaskan diri dari siklus balas dendam. Dan pada akhirnya, perdamaian dapat tumbuh ketika hubungan sosial yang terputus diperbarui melalui kepercayaan yang diperjuangkan secara bertahap.

Lederach juga menekankan bahwa rekonsiliasi membutuhkan keterlibatan berbagai tingkat masyarakat, mulai dari elite politik, pemimpin agama dan budaya, hingga masyarakat akar rumput. Proses ini bersifat bottom-up dan top-down secara bersamaan, karena perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila struktur politik mendukung rekonsiliasi dan masyarakat secara aktif

berpartisipasi dalam penyembuhan sosial. Dengan kata lain, rekonsiliasi bukanlah peristiwa sesaat, melainkan proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran, ruang dialog, serta komitmen untuk mengatasi rasa sakit masa lalu dan membangun masa depan yang lebih inklusif.

F. Studi Kasus Lokal

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu momen paling signifikan dalam perjalanan politik Indonesia modern. Kontestasi antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan di tingkat daerah, tetapi berkembang menjadi konflik sosial-politik berskala nasional yang sarat dengan muatan identitas. Isu agama, ras, serta dikotomi mayoritas dan minoritas menjadi titik sentral dalam narasi politik yang berkembang di masyarakat. Perdebatan politik yang seharusnya berfokus pada kinerja dan kebijakan publik bergeser menjadi perdebatan mengenai siapa yang dianggap mewakili kelompok “kita” dan siapa yang dianggap sebagai “mereka”. Sentimen keagamaan dan etnis dimanfaatkan oleh sebagian elite politik untuk memperkuat basis dukungan, sementara media sosial menjadi arena utama penyebaran narasi identitas yang memperlebar jurang perbedaan di antara warga.

Dari perspektif psikologi sosial, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Identitas Sosial yang dikemukakan oleh Henri Tajfel dan John Turner. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan kelompok tertentu (ingroup) dan membedakan diri dari kelompok lain (outgroup). Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, identifikasi terhadap kelompok agama dan etnis menjadi penanda penting dalam pembentukan sikap politik. Kelompok pro-Ahok dan kelompok yang menentangnya saling membangun narasi “kita” versus “mereka”, yang diperkuat oleh Ingroup-Outgroup Bias — kecenderungan untuk menilai kelompok sendiri secara lebih positif dan kelompok lain secara negatif. Bias ini semakin diperkuat oleh dinamika media sosial yang menciptakan echo chamber, di mana informasi dan opini yang beredar hanya memperkuat keyakinan dan emosi kelompok masing-masing, tanpa adanya ruang dialog yang sehat.

Selain itu, konflik ini juga dipicu oleh frustrasi kolektif dan mobilisasi emosi akibat persepsi ketidakadilan atau penghinaan terhadap keyakinan. Kasus pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang dikaitkan dengan isu penodaan agama menjadi pemicu utama ledakan emosional di masyarakat. Emosi keagamaan yang terbangun kemudian dimanfaatkan dalam mobilisasi politik melalui aksi-aksi massa besar seperti Aksi 212, yang menjadi simbol perlawanan berbasis sentimen religius. Mobilisasi ini menunjukkan bagaimana emosi dapat menjadi kekuatan sosial yang efektif dalam

menggerakkan massa, tetapi juga berpotensi memperdalam fragmentasi sosial dan memperlemah kohesi antarwarga negara.

Dampak dari konflik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak berhenti di tingkat lokal. Polarisasi sosial yang bermula di ibu kota menjalar ke seluruh wilayah Indonesia, memengaruhi cara masyarakat memandang politik, agama, dan kebangsaan. Munculnya garis pemisah berbasis identitas agama dan etnis memperlemah solidaritas nasional serta menggeser orientasi politik rasional menjadi politik emosional. Peristiwa ini menandai perubahan besar dalam politik Indonesia, di mana isu identitas menjadi instrumen yang efektif namun berisiko tinggi dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu. Dalam jangka panjang, polarisasi ini menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia, karena proses politik yang idealnya menjadi ajang kompetisi gagasan justru berubah menjadi ajang pertarungan identitas yang mengancam kohesi sosial dan kebinekaan bangsa.

G. Radikalisasi Politik dan Agresi di Media Sosial

Setelah pemilihan presiden tahun 2014 dan semakin intens pada 2019, media sosial menjelma menjadi arena utama ekspresi politik yang sangat emosional di Indonesia. Platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, tetapi juga sebagai medan pertarungan

ideologi dan identitas politik yang sering kali diselimuti oleh emosi, provokasi, serta disinformasi. Dalam konteks ini, ujaran kebencian, hoaks, dan manipulasi informasi berkembang pesat, menciptakan atmosfer politik yang penuh kecurigaan dan permusuhan. Misalnya, munculnya narasi tentang “pemilu curang” yang disebarkan oleh akun anonim atau buzzer politik menjadi contoh nyata bagaimana informasi palsu dapat digunakan untuk menggiring opini publik dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Fenomena polarisasi “cebong vs kampret” menggambarkan dengan jelas bagaimana masyarakat terbelah dalam dua kubu ekstrem yang saling menstigmatisasi, sementara kehadiran cyber army dan bot politik semakin memperkeruh suasana dengan melakukan serangan sistematis terhadap lawan politik melalui ujaran kebencian dan kampanye negatif.

Dari sudut pandang psikologi sosial, dinamika ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori penting. Pertama, Social Learning Theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia, termasuk agresi verbal dan simbolik di dunia maya, sering kali terbentuk melalui proses observasi dan peniruan. Ketika seseorang melihat perilaku kasar, ejekan, atau ujaran kebencian mendapatkan dukungan atau validasi dari komunitas daring, perilaku tersebut dianggap normal dan layak diulang. Akibatnya, kekerasan simbolik di media sosial menjadi budaya baru dalam komunikasi politik digital. Sikap agresif, hinaan, dan sarkasme terhadap lawan

politik menjadi bentuk ekspresi yang diterima bahkan dipuji oleh kelompok sehaluan.

Kedua, fenomena konformitas dan radikalisasi kelompok menjelaskan bagaimana ruang-ruang digital, seperti grup WhatsApp atau forum politik daring, menjadi tempat terbentuknya norma kelompok yang semakin ekstrem. Dalam lingkungan yang homogen secara ideologis, pendapat yang berbeda cenderung ditekan atau diabaikan, sementara opini ekstrem justru mendapatkan penguatan. Proses ini dikenal sebagai group polarization, di mana diskusi internal dalam kelompok yang berpikiran sama membuat pandangan anggotanya menjadi lebih radikal dari sebelumnya. Ketidakhadiran dissenting opinion (pendapat yang berbeda) membuat ruang percakapan politik kehilangan keseimbangan, sehingga memperkuat polarisasi dan mengikis kemampuan masyarakat untuk berdialog secara rasional.

Ketiga, teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann menjelaskan bagaimana banyak individu akhirnya memilih untuk diam di tengah perdebatan politik yang panas. Mereka yang memiliki pandangan moderat atau berbeda dari arus utama kelompoknya merasa takut untuk berbicara karena khawatir diserang, dikucilkan, atau diserbu secara digital. Fenomena ini menciptakan ilusi keseragaman opini di ruang publik maya, padahal sebenarnya banyak orang yang memilih untuk tidak bersuara. Dalam

jangka panjang, spiral of silence ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi deliberatif, karena hanya suara ekstrem yang mendominasi percakapan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial, meskipun memberikan ruang kebebasan berekspresi yang luas, juga memiliki potensi besar dalam memperkuat polarisasi dan mengikis rasionalitas publik. Dinamika psikologis seperti peniruan sosial, konformitas kelompok, dan tekanan sosial membuat ruang digital menjadi ekosistem yang mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, memahami dimensi psikologis dari perilaku politik di media sosial menjadi kunci penting untuk merumuskan strategi literasi digital, etika komunikasi, dan kebijakan publik yang dapat meminimalkan dampak destruktif polarisasi politik di era digital.

H. Rekonsiliasi Politik Pasca-Reformasi: Dari Trauma ke Transisi

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh berbagai tantangan besar, terutama dalam upaya rekonsiliasi antara negara dan rakyatnya. Masa ini membuka kembali luka-luka sosial dan politik yang selama puluhan tahun tersembunyi di bawah otoritarianisme, termasuk penderitaan korban kekerasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial yang melanda

berbagai daerah. Tragedi Mei 1998, pelanggaran di Timor-Timur sebelum dan sesudah referendum, serta konflik komunal di Poso dan Ambon menjadi titik-titik kelam dalam perjalanan bangsa yang meninggalkan trauma kolektif mendalam. Meskipun Komnas HAM telah mencatat berbagai pelanggaran HAM berat dan melakukan sejumlah investigasi, penyelesaian hukum terhadap pelaku masih minim. Upaya yang muncul sering kali bersifat simbolik, seperti pernyataan maaf dari pejabat negara, pemulihan nama baik korban, atau pembangunan museum ingatan. Namun langkah-langkah tersebut belum cukup menyentuh dimensi psikologis dan sosial yang lebih dalam dari proses rekonsiliasi itu sendiri.

Dari perspektif psikologi konflik, proses rekonsiliasi tidak hanya dapat diukur melalui penyelesaian hukum atau kebijakan politik semata, tetapi juga melalui pemulihan hubungan antar manusia dan antar kelompok. Teori rekonsiliasi berbasis hubungan yang dikemukakan oleh John Paul Lederach (1997) menekankan bahwa rekonsiliasi sejati harus melibatkan pertemuan langsung antara pihak-pihak yang pernah berkonflik untuk membangun kembali kepercayaan, empati, dan rasa saling pengertian. Dalam konteks Indonesia, proses ini belum sepenuhnya tercapai karena minimnya ruang pertemuan yang aman dan inklusif antara korban, pelaku, dan negara. Banyak inisiatif perdamaian dilakukan secara formal dan terpusat (top-down), tanpa mengakar kuat dalam pengalaman dan kebutuhan komunitas di tingkat lokal. Akibatnya, rekonsiliasi sering

berhenti pada tataran simbolik, bukan transformasi hubungan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan Herbert Kelman mengenai rekonsiliasi menyoroti pentingnya penyembuhan identitas dan pengakuan terhadap trauma kolektif. Menurut Kelman, konflik yang melibatkan kekerasan sistemik meninggalkan luka identitas yang mendalam — rasa kehilangan martabat, kepercayaan, dan keamanan sosial. Dalam kasus Indonesia, banyak korban kekerasan masa lalu masih hidup dalam bayang-bayang trauma tanpa pengakuan yang memadai. Ketidakmampuan negara untuk memberikan keadilan yang substantif memperpanjang penderitaan psikologis ini dan menghambat proses penyembuhan sosial. Tanpa pengakuan atas penderitaan dan keterlibatan langsung dalam proses penyembuhan, rekonsiliasi akan sulit berkembang menjadi kenyataan sosial yang kuat.

Namun demikian, di beberapa konteks lokal, muncul pendekatan-pendekatan rekonsiliasi berbasis budaya yang justru lebih efektif dan bermakna bagi masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah praktik *pela gandong* di Maluku, yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, dan kesetiaan antar komunitas yang pernah berkonflik. Melalui ritual adat, masyarakat berusaha memulihkan harmoni sosial dengan menegaskan kembali ikatan moral dan spiritual di antara mereka. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi tidak hanya bisa dilakukan melalui mekanisme

hukum atau politik, tetapi juga melalui cara-cara kultural yang mampu menyentuh dimensi emosional dan identitas kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman pasca-1998 menunjukkan bahwa rekonsiliasi di Indonesia masih merupakan pekerjaan panjang: bukan hanya mengungkap kebenaran masa lalu, tetapi juga membangun kembali jembatan kemanusiaan yang rusak akibat kekerasan dan ketidakadilan.

Kesimpulan

Konflik politik tidak semata-mata muncul dari perbedaan kepentingan atau perebutan kekuasaan, tetapi berakar pada dimensi psikologis yang jauh lebih kompleks, seperti identitas kelompok, pengalaman akan ketidakadilan, dan trauma yang terakumulasi dalam ingatan kolektif masyarakat. Identitas politik sering menjadi sumber makna dan rasa memiliki, sehingga ancaman terhadap identitas tersebut dapat memicu reaksi defensif, bahkan agresif. Persepsi bahwa suatu kelompok diperlakukan tidak adil—baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya—dapat memperkuat rasa frustrasi dan membentuk narasi perlawanan. Trauma kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi juga dapat memperkuat siklus permusuhan, membuat masyarakat sulit melepaskan diri dari pola dendam dan kecurigaan.

Dalam konteks ini, kekuasaan memainkan peran yang sangat menentukan. Cara kekuasaan dijalankan—apakah melalui dominasi

yang represif atau pendekatan dialogis yang mendengarkan aspirasi publik—dapat memperkuat konflik atau justru membuka jalan menuju rekonsiliasi. Kekuasaan yang cenderung menekan perbedaan dan memaksakan keseragaman sering kali memicu resistensi, sedangkan kekuasaan yang mampu mengelola keragaman dan memberikan ruang bagi partisipasi dapat menjadi sarana penyembuhan sosial. Oleh karena itu, memahami dinamika psikologis seperti internalisasi identitas politik, reaksi terhadap otoritas, serta mekanisme agresi dan pertahanan kelompok menjadi kunci untuk merancang proses politik yang lebih manusiawi.

Pendekatan rekonsiliasi dalam politik tidak hanya berfokus pada penandatanganan perjanjian formal atau perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup proses transformasi relasi sosial dan emosional di antara pihak-pihak yang berkonflik. Rekonsiliasi merupakan proses jangka panjang yang menuntut pengakuan terhadap luka masa lalu, baik dalam bentuk kekerasan fisik, ketidakadilan struktural, maupun trauma psikologis yang dialami oleh individu dan kelompok. Tanpa pengakuan ini, upaya perdamaian cenderung bersifat dangkal dan berisiko memelihara ketegangan laten yang sewaktu-waktu dapat kembali muncul ke permukaan.

Dalam konteks tersebut, pembukaan ruang dialog yang aman dan setara menjadi elemen kunci dalam proses rekonsiliasi. Dialog bukan sekadar sarana pertukaran pandangan politik, melainkan wadah

untuk mendengarkan pengalaman, emosi, dan narasi pihak lain yang selama ini terpinggirkan atau dibungkam. Melalui dialog yang inklusif, pihak-pihak yang berkonflik dapat membangun pemahaman bersama mengenai akar konflik, sekaligus mengembangkan empati yang diperlukan untuk mengurangi prasangka dan dehumanisasi. Proses ini membantu menggeser relasi yang sebelumnya didominasi oleh kecurigaan dan permusuhan menuju hubungan yang lebih kooperatif dan saling menghargai.

BAB VI

PSIKOLOGI POLITIK DALAM ERA DIGITAL

Perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, telah merevolusi wajah politik kontemporer. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara politisi menyampaikan pesan, membangun citra, dan berinteraksi dengan publik, tetapi juga memengaruhi secara mendalam bagaimana masyarakat berpikir, merasakan, dan berperilaku secara politik. Politik kini bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya — pesan kampanye dapat menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan detik, opini publik dapat berubah secara drastis akibat satu unggahan viral, dan emosi kolektif dapat dimobilisasi secara instan melalui narasi digital yang kuat. Dalam ruang digital, politik menjadi lebih personal karena setiap individu dapat menjadi aktor politik melalui posting, retweet, atau comment yang memperkuat posisi dan identitas mereka di ruang publik daring. Namun, di balik dinamika yang demokratis dan partisipatif ini, terdapat sisi gelap yang tidak bisa diabaikan: meningkatnya kerentanan terhadap manipulasi psikologis, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan sekadar alat komunikasi politik, tetapi juga arena pembentukan dan pertarungan makna. Setiap interaksi daring—dari meme politik hingga thread panjang di X (Twitter)—menciptakan resonansi emosional yang dapat memperkuat loyalitas kelompok sekaligus memperdalam jarak antar kubu. Informasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pencerdasan politik, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan persepsi dan pengaruh. Algoritma media sosial, yang dirancang untuk memaksimalkan perhatian pengguna, cenderung memperkuat konten yang provokatif, emosional, atau kontroversial. Akibatnya, ruang publik digital sering kali didominasi oleh emosi—baik kemarahan, kebanggaan, maupun ketakutan—yang membentuk perilaku politik berbasis afeksi, bukan rasionalitas.

Dari sudut pandang psikologi politik, perubahan ini mencerminkan pergeseran mendasar dalam cara manusia berinteraksi dengan kekuasaan, informasi, dan identitas. Media sosial menciptakan ilusi kedekatan antara pemimpin dan rakyat, tetapi sekaligus mengaburkan batas antara opini pribadi dan propaganda politik. Dalam lingkungan yang serba cepat dan penuh stimulasi, individu semakin sulit membedakan antara fakta dan opini, antara empati dan manipulasi emosional. Identitas politik menjadi semakin cair, namun juga lebih mudah diprovokasi. Fenomena seperti echo chamber, filter bubble, dan confirmation bias memperkuat kecenderungan manusia

untuk mencari informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri, sehingga mempersempit ruang dialog lintas pandangan.

Dengan demikian, ekosistem digital modern tidak hanya mengubah cara politik dijalankan, tetapi juga cara politik dihayati secara psikologis. Dunia maya telah menjadi cermin sekaligus panggung bagi dinamika kekuasaan, emosi, dan identitas. Dalam konteks ini, memahami psikologi politik digital menjadi sangat penting—bukan hanya untuk menganalisis perilaku pemilih atau strategi kampanye, tetapi juga untuk menjaga kesehatan demokrasi di tengah arus informasi yang semakin tidak terkendali. Hanya dengan memahami cara pikiran, emosi, dan identitas beroperasi di ruang digital, masyarakat dapat membangun ketahanan psikologis terhadap manipulasi, serta mengembalikan esensi politik sebagai sarana refleksi rasional dan tanggung jawab bersama.

A. Media Sosial Sebagai Arena Politik Baru

Media sosial kini telah menjelma menjadi arena utama dalam komunikasi politik modern. Platform seperti Facebook, Twitter (kini dikenal sebagai X), Instagram, dan TikTok tidak lagi sekadar menjadi ruang berbagi informasi atau hiburan, tetapi juga medan tempat ide, opini, dan identitas politik dipertukarkan secara intens. Di dunia digital ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, memengaruhi opini publik, bahkan memicu terbentuknya

gerakan sosial tanpa harus melalui jalur institusional formal. Politik tidak lagi dimonopoli oleh elite atau media arus utama; kini warganet dapat menjadi agen perubahan, juru kampanye, bahkan oposisi digital yang mampu menekan kekuasaan hanya dengan kekuatan narasi dan jaringan daring. Fenomena ini menandai pergeseran mendasar dalam dinamika politik, di mana legitimasi sosial sering kali ditentukan bukan oleh argumentasi rasional, melainkan oleh seberapa kuat dan viral pesan yang disampaikan di ruang publik maya.

Salah satu karakteristik utama media sosial dalam konteks politik adalah interaktivitasnya. Berbeda dengan media tradisional yang bersifat satu arah, media sosial membuka ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan publik berinteraksi langsung dengan politisi, pejabat publik, atau tokoh masyarakat. Warganet dapat mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, atau menunjukkan dukungan secara real time, menciptakan kesan kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Namun, interaktivitas ini juga membawa konsekuensi: batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur, dan politisi dituntut untuk selalu responsif terhadap opini publik yang terus bergerak cepat. Di sisi lain, interaksi langsung ini sering kali tidak didasarkan pada pertukaran gagasan yang rasional, melainkan pada dinamika emosional yang mudah tersulut oleh isu-isu sensitif.

Karakteristik kedua adalah viralitas, yaitu kemampuan pesan politik untuk menyebar dengan cepat melampaui batas geografis dan

sosial. Studi oleh Brady et al. (2017) menunjukkan bahwa konten yang mengandung emosi—terutama kemarahan, kesedihan, atau kebanggaan—jauh lebih mudah menjadi viral dibandingkan dengan informasi yang bersifat netral atau rasional. Hal ini menjelaskan mengapa kampanye politik di era digital cenderung menonjolkan sisi emosional dan simbolik dibandingkan argumentasi berbasis data. Dalam konteks ini, emosi berperan sebagai “bahan bakar” utama penyebaran pesan politik, yang tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga memobilisasi tindakan kolektif seperti dukungan elektoral atau partisipasi dalam demonstrasi. Namun, dominasi emosi ini juga membuat ruang politik digital rentan terhadap manipulasi, provokasi, dan disinformasi yang memanfaatkan reaksi spontan pengguna.

Karakteristik ketiga yang tak kalah penting adalah munculnya fenomena filter bubble dan echo chamber. Seperti dijelaskan oleh Cass Sunstein (2001), algoritma media sosial bekerja dengan cara menyesuaikan konten berdasarkan preferensi dan interaksi pengguna. Akibatnya, seseorang cenderung hanya terpapar pada informasi dan opini yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Lingkungan digital semacam ini memperkuat confirmation bias—kecenderungan untuk mencari dan mempercayai informasi yang mendukung pandangan pribadi—dan mendorong terbentuknya group polarization, di mana pandangan kelompok menjadi semakin ekstrem karena kurangnya paparan terhadap perspektif yang berbeda. Dalam jangka panjang,

fenomena ini berpotensi mengikis kemampuan masyarakat untuk berdialog lintas pandangan dan memperdalam polarisasi politik yang sudah ada.

Dengan demikian, media sosial bukan sekadar alat komunikasi politik, tetapi juga ruang psikologis yang membentuk cara individu berinteraksi, beridentifikasi, dan bereaksi terhadap isu-isu publik. Interaktivitas, viralitas, dan filter algoritmik menjadikan media sosial sebagai arena yang dinamis sekaligus paradoks—memperluas partisipasi politik rakyat, namun pada saat yang sama, juga memperbesar risiko fragmentasi sosial dan manipulasi emosi kolektif. Tantangan ke depan bukan hanya bagaimana memanfaatkan potensi media sosial untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga bagaimana membangun literasi digital dan kesadaran psikologis agar ruang politik digital tetap sehat, kritis, dan inklusif.

B. Algoritma, Disinformasi, dan Manipulasi Psikologis

Di balik tampilan media sosial yang tampak sederhana dan mudah digunakan, sebenarnya terdapat sistem algoritmik yang sangat kompleks dan canggih. Algoritma-algoritma ini dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan menampilkan konten yang paling mampu menarik perhatian dan membangkitkan emosi. Dalam konteks politik, mekanisme ini membawa dampak serius karena dapat dimanfaatkan untuk manipulasi psikologis publik.

Konten yang bersifat provokatif, sensasional, atau menimbulkan kemarahan sering kali lebih mudah menyebar luas dibandingkan informasi yang faktual dan netral. Akibatnya, media sosial bukan hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga arena pertarungan persepsi dan opini yang sarat dengan kepentingan politik tertentu.

Secara psikologis, penyebaran disinformasi di media sosial dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme kognitif yang telah lama diteliti dalam psikologi sosial. Salah satunya adalah *confirmation bias*, yaitu kecenderungan individu untuk lebih mudah mempercayai informasi yang sejalan dengan keyakinan atau pandangan politik yang sudah mereka miliki. Bias ini membuat seseorang cenderung menolak fakta yang bertentangan dengan pandangannya, meskipun bukti yang ada sangat kuat. Selain itu, konsep *cognitive ease* yang diperkenalkan oleh Daniel Kahneman (2011) menjelaskan bahwa informasi yang sering diulang—meskipun salah—akan terasa lebih familiar dan karenanya lebih mudah diterima sebagai kebenaran. Hal ini menjelaskan mengapa hoaks yang berulang kali muncul di linimasa dapat memengaruhi opini publik secara perlahan.

Faktor lainnya adalah heuristik sosial, di mana individu mempercayai suatu informasi karena melihat banyak orang lain yang juga mempercayai atau membagikannya, fenomena yang dikenal sebagai *herd behavior*. Dalam konteks media sosial, jumlah “like”, “share”, dan komentar dapat menciptakan ilusi kebenaran dan

legitimasi sosial terhadap suatu informasi, padahal tidak selalu demikian.

Kasus-kasus nyata menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mekanisme psikologis ini. Misalnya, pada Pemilu 2019 di Indonesia, ditemukan operasi sistematis penyebaran hoaks dan penggunaan akun bot politik untuk membentuk opini publik serta memperkuat polarisasi masyarakat. Skandal Cambridge Analytica juga menjadi contoh global yang relevan. Melalui teknik pemetaan psikografis, perusahaan tersebut memanfaatkan data pribadi jutaan pengguna Facebook untuk menargetkan pesan politik yang disesuaikan dengan karakter psikologis masing-masing pemilih (Zuboff, 2019). Kedua contoh ini menegaskan bahwa di era digital, politik tidak lagi hanya soal ide dan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana algoritma dan psikologi manusia dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan persepsi serta membentuk perilaku kolektif.

C. Emosi Politik dan Konten Viral

Dalam era digital saat ini, emosi memainkan peran yang sangat dominan dalam membentuk perilaku dan dinamika politik masyarakat. Platform media sosial, dengan algoritma yang dirancang untuk memprioritaskan keterlibatan pengguna, cenderung mengangkat konten yang membangkitkan reaksi emosional yang kuat dibandingkan dengan konten yang bersifat netral atau informatif.

Konten politik yang memicu rasa marah, takut, atau bangga jauh lebih mudah menjadi viral karena mampu menggugah respons instingtif manusia. Akibatnya, ruang publik digital sering kali dipenuhi dengan narasi yang emosional dan provokatif, bukan diskusi rasional yang berbasis data. Fenomena ini secara tidak langsung memperkuat polarisasi politik, memperdalam jurang perbedaan antar kelompok, serta mempercepat proses radikalisasi di dunia maya, di mana individu menjadi semakin terikat pada pandangan ekstrem dan sulit menerima perspektif yang berbeda.

Penjelasan teoretis mengenai peran emosi dalam politik digital dapat ditemukan dalam Affective Intelligence Theory yang dikembangkan oleh Marcus, Neuman, dan MacKuen (2000). Teori ini menyatakan bahwa emosi memiliki fungsi adaptif dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan politik. Rasa takut, misalnya, dapat meningkatkan kewaspadaan dan mendorong individu untuk mencari serta memeriksa informasi baru yang relevan. Sebaliknya, emosi seperti kemarahan cenderung memperkuat loyalitas terhadap kelompok atau identitas politik yang sudah ada, membuat seseorang lebih defensif dan kurang terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Dengan demikian, politik yang sarat emosi tidak hanya memengaruhi cara seseorang menilai informasi, tetapi juga menentukan arah afiliasi dan tindakan politiknya.

Selain itu, konsep moral outrage atau kemarahan moral, sebagaimana dijelaskan oleh Rothschild dan Keefer (2017), juga sangat relevan dalam konteks media sosial. Moral outrage muncul ketika seseorang merasa marah atas ketidakadilan atau pelanggaran moral yang dianggap serius, dan perasaan ini sering kali disalurkan melalui ekspresi publik seperti unggahan, komentar, atau kampanye daring. Di dunia digital, emosi kolektif semacam ini dapat menyebar dengan sangat cepat, menciptakan gelombang kemarahan bersama yang mampu mengubah arah wacana publik dalam waktu singkat. Walaupun pada satu sisi moral outrage dapat menjadi pemicu kesadaran sosial dan dorongan untuk memperjuangkan keadilan, di sisi lain, jika tidak dikendalikan, ia dapat memicu spiral kebencian dan memperkuat konflik antar kelompok. Dengan demikian, memahami dinamika emosi dalam politik digital menjadi penting agar masyarakat dapat lebih bijak dalam merespons konten yang berseliweran di dunia maya dan tidak mudah terseret dalam arus polarisasi emosional yang destruktif.

D. Aktivisme Digital dan Mobilisasi Politik Online

Era digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru dari aktivisme sosial dan politik yang berbeda secara mendasar dari gerakan konvensional di masa lalu. Jika dahulu mobilisasi massa membutuhkan struktur organisasi yang besar, sumber daya yang kuat,

dan koordinasi yang kompleks, kini sebuah gerakan dapat lahir hanya dari satu unggahan, hashtag, atau momen viral di media sosial. Ruang digital memungkinkan setiap individu untuk menjadi agen perubahan tanpa harus terikat pada organisasi formal. Petisi daring, kampanye tagar (hashtag activism), hingga gerakan boikot digital menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik dan sosial secara cepat, spontan, dan luas. Aktivisme semacam ini menandai pergeseran dari politik konvensional menuju politik partisipatif yang berbasis jaringan, di mana kekuatan utama terletak pada kemampuan menyebarkan pesan dan membangun resonansi emosional di dunia maya.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai gerakan sosial yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Kampanye #ReformasiDikorupsi pada tahun 2019, misalnya, menjadi salah satu contoh paling kuat tentang bagaimana mahasiswa dan netizen dapat bersatu secara digital untuk menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui media sosial, pesan perlawanan terhadap pelemahan lembaga antirasuah tersebut menyebar dengan cepat dan berhasil menggerakkan aksi turun ke jalan di berbagai daerah. Gerakan #GejayanMemanggil di Yogyakarta juga menunjukkan dinamika serupa, di mana aksi massa yang besar berawal dari seruan dan koordinasi di dunia maya. Selain itu, platform seperti Change.org turut memperkuat bentuk partisipasi digital ini melalui petisi-petisi online yang kerap kali berhasil

memengaruhi kebijakan lokal atau menekan pengambil keputusan publik. Dengan demikian, media sosial telah menjadi ruang baru bagi demokrasi partisipatif yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam membentuk arah kebijakan dan wacana politik nasional.

Dari perspektif psikologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui dua konsep penting. Pertama, *Collective Identity Formation* yang dikemukakan oleh Polletta dan Jasper (2001) menjelaskan bahwa identitas kolektif tidak hanya terbentuk melalui pengalaman langsung di dunia nyata, tetapi juga dapat muncul dari narasi bersama yang dibangun di ruang digital. Melalui simbol, tagar, dan kisah perjuangan bersama, individu merasa menjadi bagian dari komunitas yang memiliki tujuan dan nilai yang sama. Identitas kolektif inilah yang kemudian memperkuat solidaritas dan mendorong aksi bersama, bahkan di antara orang-orang yang belum pernah bertemu secara fisik.

Kedua, *Online Disinhibition Effect* yang dijelaskan oleh Suler (2004) menunjukkan bahwa dunia maya memberikan rasa anonimitas yang membuat individu lebih berani mengekspresikan pandangan politik, mengkritik kekuasaan, atau menyuarakan ketidakadilan tanpa takut terhadap konsekuensi langsung. Efek ini dapat memperluas ruang kebebasan berekspresi dan membuka kanal baru bagi partisipasi politik warga. Namun, di sisi lain, anonimitas yang sama juga dapat menimbulkan risiko seperti ujaran kebencian atau penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, meskipun era digital membuka

peluang besar bagi lahirnya gerakan sosial yang inklusif dan cepat, tantangan etika dan tanggung jawab digital juga harus menjadi perhatian utama agar aktivisme daring tetap produktif, damai, dan berorientasi pada perubahan sosial yang konstruktif.

E. Tantangan Etika dan Regulasi Politik Digital

Kemunculan disinformasi, polarisasi ekstrem, dan manipulasi emosi dalam politik digital telah memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk melindungi integritas demokrasi. Di satu sisi, ruang digital telah menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, menyuarakan aspirasi, serta mengawasi kekuasaan. Namun di sisi lain, ruang yang sama juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan kebohongan, membentuk opini publik secara manipulatif, dan bahkan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Pertanyaannya kemudian: bagaimana negara, masyarakat, dan perusahaan teknologi dapat mengatur ruang digital tanpa mengekang kebebasan berekspresi yang merupakan fondasi dari demokrasi itu sendiri?

Secara etis dan politis, persoalan ini sangat kompleks. Salah satu isu utama adalah mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas penyebaran konten politik palsu atau menyesatkan. Apakah tanggung jawab tersebut berada pada individu pengguna yang

membagikan informasi, platform media sosial yang memfasilitasi penyebarannya, atau pemerintah yang memiliki kewajiban menjaga ketertiban publik? Selain itu, muncul pula perdebatan tentang sejauh mana algoritma yang digunakan oleh platform digital perlu diatur atau diawasi untuk mencegah bias dan penyalahgunaan yang dapat merugikan proses demokrasi. Algoritma memiliki kekuatan besar dalam menentukan apa yang dilihat, dipercaya, dan dibicarakan publik. Tanpa regulasi yang memadai, kekuatan ini dapat berubah menjadi alat politik yang mengarahkan opini publik secara halus namun sistematis. Tidak kalah penting, isu privasi pengguna juga menjadi perhatian besar, terutama setelah berbagai skandal penyalahgunaan data politik, seperti kasus Cambridge Analytica, yang menunjukkan bagaimana data pribadi dapat dimanfaatkan untuk menargetkan pesan politik yang bersifat manipulatif dan personal.

Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi tantangan ini, meskipun hasilnya masih menimbulkan perdebatan. Pemerintah, misalnya, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Hoaks, berusaha mengontrol penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di dunia maya. Langkah ini bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari dampak destruktif disinformasi. Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan kekhawatiran dari masyarakat sipil dan pengamat kebebasan berekspresi, karena dalam praktiknya,

pasal-pasal dalam UU ITE kerap dianggap multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengambil langkah penting dengan mengatur iklan kampanye digital demi memastikan transparansi dan keadilan dalam kontestasi politik.

Dengan demikian, tantangan terbesar di era politik digital bukan hanya soal bagaimana menekan laju disinformasi, tetapi juga bagaimana menciptakan tata kelola ruang digital yang adil, transparan, dan demokratis. Regulasi yang terlalu ketat dapat membungkam kebebasan berpendapat, sementara pengawasan yang terlalu longgar dapat membiarkan manipulasi politik berkembang tanpa kendali. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan perusahaan teknologi untuk membangun ekosistem digital yang sehat—di mana kebebasan berekspresi tetap terlindungi, namun disertai tanggung jawab dan etika dalam penggunaan teknologi informasi.

F. Studi Kasus Lokal

1. Kepemimpinan Karismatik Soekarno vs. Gaya Tekokratis Jokowi

Kepemimpinan di Indonesia telah mengalami transformasi yang menarik dari era revolusioner menuju era teknokratis, sebagaimana tergambar jelas dalam perbandingan antara

Soekarno dan Joko Widodo. Soekarno, sebagai proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan sosok pemimpin karismatik yang muncul dalam konteks sosial-politik yang penuh gejolak. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan figur simbolik yang mampu membangkitkan semangat persatuan dan menumbuhkan identitas nasional di tengah situasi ketidakpastian dan penjajahan yang baru saja berakhir. Soekarno menjelma menjadi simbol perjuangan itu—seorang pemimpin revolusioner yang bukan hanya memimpin secara politik, tetapi juga secara emosional dan ideologis. Melalui pidato-pidatonya yang penuh daya retorika, seperti seruannya yang legendaris “beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia!”, Soekarno berhasil menggugah rasa kebangsaan dan menanamkan kepercayaan diri kolektif pada rakyat Indonesia. Ia mempersonifikasikan perjuangan anti-imperialisme dan membangun *mythos* nasionalisme yang kuat, di mana rakyat memandangnya bukan sekadar sebagai pemimpin politik, melainkan sebagai bapak bangsa dan simbol harapan.

Dalam perspektif teori, gaya kepemimpinan Soekarno sejalan dengan konsep *Charismatic Authority* yang diperkenalkan oleh Max Weber (1978). Weber menjelaskan bahwa otoritas karismatik muncul dari kepribadian luar biasa seorang

individu yang mampu menginspirasi pengikutnya melalui keyakinan emosional, bukan semata-mata melalui struktur birokrasi atau legitimasi hukum. Karisma Soekarno terbangun dari kemampuannya mengartikulasikan visi besar tentang kemerdekaan dan keadilan sosial, serta dari kehadirannya yang mampu menciptakan keterikatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Konsep Emotional Leadership yang dikemukakan oleh Daniel Goleman (2006) juga relevan dalam menjelaskan gaya Soekarno, di mana kekuatan utama seorang pemimpin terletak pada kemampuannya mengelola dan memengaruhi emosi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Soekarno memimpin melalui narasi dan emosi, menjadikan politik sebagai panggung ideologis dan spiritual bagi kebangkitan bangsa.

Berbeda jauh dari gaya kepemimpinan Soekarno, Joko Widodo (Jokowi) tampil sebagai representasi pemimpin teknokrat dan populis modern di era digital. Latar belakangnya sebagai pengusaha furnitur dan mantan wali kota membuat gaya kepemimpinannya lebih pragmatis, fungsional, dan berbasis pada penyelesaian masalah konkret ketimbang ideologi besar. Jokowi lebih dikenal dengan pendekatan problem-solving dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang bersifat tangible—mulai dari proyek jalan tol, bendungan, hingga transportasi publik. Dalam

berkomunikasi dengan publik, Jokowi memanfaatkan gaya yang informal, visual, dan dekat dengan keseharian rakyat. Fenomena blusukan, vlog, dan kehadirannya di platform seperti TikTok merupakan bentuk komunikasi politik yang membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa harus mengandalkan retorika bombastis. Ia mencerminkan tipikal pemimpin era digital yang memahami pentingnya citra kesederhanaan dan koneksi langsung dengan warga.

Secara teoretis, gaya kepemimpinan Jokowi dapat dijelaskan melalui Situational Leadership Theory yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard, yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan situasi dan tingkat kesiapan pengikut. Jokowi menunjukkan fleksibilitas tersebut dengan memadukan antara pendekatan populis dan teknokratis sesuai dengan konteks politik dan birokrasi yang dihadapinya. Selain itu, gaya kepemimpinannya juga dapat dipahami melalui konsep Technopopulism yang dijelaskan oleh Bickerton dan Accetti (2021), yaitu perpaduan antara rasionalitas teknokratis dan daya tarik populis. Dalam technopopulism, pemimpin berusaha tampil sebagai sosok yang kompeten secara teknis namun tetap dekat dengan rakyat, menggunakan teknologi

dan media sosial sebagai alat utama untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, jika Soekarno adalah simbol karisma revolusioner yang mengandalkan kekuatan ide dan emosi untuk mempersatukan bangsa, maka Jokowi adalah representasi pemimpin era modern yang mengedepankan efisiensi, hasil konkret, dan komunikasi yang membumi. Keduanya menunjukkan dua wajah berbeda dari kepemimpinan nasional Indonesia—yang satu lahir dari semangat perjuangan dan mitos nasionalisme, sementara yang lain tumbuh dari kebutuhan pragmatis akan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

2. Gaya Komunikasi Politik Jokowi vs. Prabowo di Mata Pemilih

Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 di Indonesia memperlihatkan kontras yang sangat menarik antara dua tokoh utama dalam panggung politik nasional: Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Kedua pemimpin ini tidak hanya berbeda dalam latar belakang dan orientasi politik, tetapi juga dalam gaya komunikasi mereka yang secara signifikan memengaruhi persepsi publik dan preferensi pemilih. Dalam politik modern, gaya komunikasi bukan sekadar alat untuk menyampaikan pesan, melainkan strategi

untuk membentuk citra, membangun kedekatan emosional dengan pemilih, dan mengarahkan cara masyarakat menafsirkan realitas politik. Jokowi dan Prabowo memahami hal ini dengan pendekatan yang sangat berbeda—Jokowi dengan kesederhanaan visual dan kehangatan simbolik, sementara Prabowo dengan retorika emosional dan gaya orasi yang penuh daya mobilisasi.

Joko Widodo menampilkan diri sebagai komunikator visual dan santai yang memanfaatkan kekuatan media sosial untuk membangun citra sebagai pemimpin yang merakyat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui unggahan di YouTube, Instagram, dan TikTok, Jokowi memperlihatkan kesehariannya secara sederhana—dari makan di warung kaki lima, blusukan ke pasar tradisional, hingga berbincang dengan warga di desa terpencil. Strategi komunikasi semacam ini memperkuat kesan bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang “bisa disentuh”, rendah hati, dan tidak berjarak dari rakyatnya. Ia juga cenderung menghindari pernyataan yang bersifat kontroversial atau konfrontatif; sebaliknya, ia lebih sering menggunakan simbol-simbol visual dan gestur yang menciptakan kesan tenang dan stabil. Pendekatan komunikasinya mencerminkan karakter pemimpin yang adaptif terhadap budaya digital, di mana citra visual dan narasi

ringan lebih efektif dalam menjangkau generasi muda serta pemilih urban yang aktif di media sosial.

Sementara itu, Prabowo Subianto dikenal sebagai komunikator yang emosional, dramatis, dan penuh semangat nasionalisme. Gaya retorikanya yang tegas, berapi-api, dan kadang konfrontatif menampilkan citra seorang pemimpin yang kuat, protektif, dan siap membela rakyat dari ancaman eksternal, baik dalam bentuk kekuatan asing maupun elit ekonomi domestik yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Dalam setiap pidatonya, Prabowo sering menggunakan narasi heroik dan bahasa yang sarat emosi, yang memunculkan kesan ketegasan dan kepemimpinan ala militer. Ia membangun imaji sebagai figur “bapak bangsa” yang siap mengorbankan diri demi keselamatan negara, sehingga mampu menarik simpati pemilih yang mendambakan kepemimpinan otoritatif dan penuh ketegasan moral. Gaya komunikasinya menonjolkan energi dan ketegangan emosional, yang efektif dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pendukungnya, tetapi kadang juga memunculkan persepsi polaritas di antara kelompok pemilih yang berbeda pandangan.

Dalam perspektif teori komunikasi politik, perbedaan gaya Jokowi dan Prabowo dapat dijelaskan melalui Framing Theory yang dikemukakan oleh Robert Entman (1993).

Menurut teori ini, cara isu dan pesan politik dibingkai akan sangat memengaruhi bagaimana publik memahami dan menilai suatu peristiwa atau figur. Jokowi membingkai dirinya sebagai representasi rakyat biasa yang fokus pada kerja konkret dan keseharian, sementara Prabowo membingkai dirinya sebagai pemimpin nasionalis yang melindungi bangsa dari ancaman eksternal dan ketidakadilan global. Bingkai komunikasi ini menciptakan dua citra yang berbeda di mata publik: satu yang menenangkan dan membumi, dan satu lagi yang heroik dan konfrontatif.

Selain itu, Affective Intelligence Theory dari Marcus, Neuman, dan MacKuen (2000) juga memberikan pemahaman penting tentang bagaimana emosi memengaruhi pilihan politik. Teori ini menjelaskan bahwa emosi seperti takut, marah, dan antusias dapat memengaruhi cara individu memproses informasi dan menilai seorang pemimpin. Dalam konteks ini, gaya Prabowo yang menonjolkan emosi marah dan ketegasan mampu membangkitkan rasa proteksi dan loyalitas di kalangan pemilihnya, sementara gaya Jokowi yang menenangkan dan hangat menumbuhkan rasa aman serta kepercayaan emosional.

Dengan demikian, pertarungan politik antara Jokowi dan Prabowo bukan hanya kompetisi visi dan program, tetapi juga pertarungan narasi dan gaya komunikasi yang merefleksikan

dua model kepemimpinan yang berbeda: satu yang menekankan kedekatan dan kesederhanaan dalam konteks politik digital, dan satu lagi yang mengandalkan emosi, nasionalisme, serta kekuatan simbolik untuk menggerakkan massa. Kedua gaya ini menunjukkan bahwa dalam politik kontemporer, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh ide dan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola persepsi publik melalui komunikasi yang efektif dan bermuatan emosional.

3. Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Indonesia: Megawati, Risma, Puan Maharani

Kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks, baik dari segi kultural maupun struktural. Norma patriarkal yang mengakar dalam budaya politik nasional sering kali membuat perempuan harus bekerja lebih keras untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, sejumlah tokoh perempuan berhasil menembus dominasi politik maskulin dan menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat serta beragam. Figur seperti Megawati Soekarnoputri, Tri Rismaharini, dan Puan Maharani merepresentasikan tiga model kepemimpinan perempuan yang berbeda—masing-masing dengan kekuatan, tantangan, serta strategi politik yang mencerminkan konteks

sosial dan sejarah yang melingkupinya. Ketiganya tidak hanya berperan dalam memperluas partisipasi perempuan di ranah publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana gender dapat memengaruhi gaya kepemimpinan dan persepsi masyarakat terhadap pemimpin politik.

Megawati Soekarnoputri menempati posisi yang unik dalam sejarah politik Indonesia sebagai presiden perempuan pertama sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Kepemimpinannya sarat dengan nilai simbolik dan kultural, karena ia memikul beban historis sebagai putri dari proklamator bangsa, Soekarno. Hal ini memberinya legitimasi politik yang kuat, namun sekaligus menempatkannya dalam posisi simbolis yang penuh ekspektasi. Megawati dikenal sebagai pemimpin yang cenderung bekerja di balik layar—lebih mengandalkan pengaruh politik dan strategi ketimbang retorika publik. Gaya kepemimpinannya dapat dikategorikan sebagai konservatif dan simbolik, dengan fokus pada stabilitas partai serta kontinuitas ideologis daripada ekspresi populisme. Meski demikian, perjalanan politiknya tidak lepas dari tantangan berbasis gender, di mana lawan politik kerap memanfaatkan stereotip seksis untuk melemahkannya. Sebagai perempuan dalam ruang politik yang didominasi laki-laki, Megawati sering dihadapkan pada dilema double bind, di mana setiap

tindakan—baik yang keras maupun lembut—selalu dinilai secara bias oleh publik.

Berbeda dengan Megawati, Tri Rismaharini atau Risma dikenal dengan gaya kepemimpinan yang emosional, tegas, namun juga transformatif. Selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma memperlihatkan model kepemimpinan yang menggabungkan ketegasan birokrasi dengan empati sosial yang kuat. Ia dikenal turun langsung ke lapangan, menegur aparat yang lalai, dan menangis di hadapan publik ketika menghadapi ketidakadilan sosial. Gaya ekspresif dan emosionalnya sering dianggap tidak konvensional dalam politik yang biasanya menuntut ketenangan dan rasionalitas, namun justru itulah yang membuatnya dekat dengan rakyat. Risma berhasil mengubah birokrasi Surabaya menjadi lebih responsif dan humanis, sekaligus membangun citra sebagai pemimpin perempuan yang autentik dan berintegritas. Kepemimpinan semacam ini sejalan dengan temuan Eagly dan Carli (2003) dalam teori Gender and Leadership Styles, yang menyebut bahwa perempuan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih demokratis, empatik, dan kolektif dibandingkan laki-laki. Risma menjadi contoh nyata bahwa emosi bukanlah kelemahan dalam kepemimpinan, melainkan sumber kekuatan moral yang dapat mendorong transformasi sosial.

Sementara itu, Puan Maharani membawa karakteristik kepemimpinan yang lebih formal dan elitis. Sebagai cucu Soekarno dan putri Megawati, Puan merupakan bagian dari generasi ketiga trah politik Soekarno yang mewarisi legitimasi historis keluarga. Namun, berbeda dengan gaya karismatik kakeknya atau pendekatan simbolik ibunya, Puan cenderung menampilkan gaya kepemimpinan yang administratif dan berorientasi pada struktur formal kekuasaan. Selama menjabat sebagai Ketua DPR RI, ia lebih dikenal dengan kemampuan manajerial dan pendekatan institusional daripada pendekatan populis yang menonjolkan kedekatan dengan rakyat. Gaya ini membuatnya tampak kuat secara politik, tetapi juga menghadapi tantangan dalam membangun kedekatan emosional dengan basis akar rumput. Dalam konteks persepsi publik, Puan kerap terjebak dalam double bind—jika tampil tegas, ia dianggap keras dan dingin; namun jika tampil lembut, ia dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi pemimpin nasional.

Secara keseluruhan, ketiga figur ini memperlihatkan spektrum luas dari gaya kepemimpinan perempuan di Indonesia—dari simbolik dan ideologis (Megawati), transformatif dan emosional (Risma), hingga formal dan elitis (Puan). Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak dapat dipandang sebagai satu model tunggal, melainkan beragam

sesuai konteks sosial, politik, dan kepribadian masing-masing tokoh. Namun, yang menjadi benang merah adalah bagaimana ketiganya tetap harus berhadapan dengan bias gender dan ekspektasi ganda yang membentuk pengalaman politik perempuan di Indonesia. Dalam hal ini, teori Double Bind menjadi sangat relevan: perempuan pemimpin sering kali dinilai bukan hanya dari efektivitasnya, tetapi juga dari seberapa baik mereka mampu menavigasi persepsi publik yang paradoks—antara kelembutan dan ketegasan, antara empati dan otoritas. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan perempuan di ranah politik tidak berhenti pada keterwakilan jumlah, tetapi juga pada penerimaan dan legitimasi sosial terhadap gaya kepemimpinan yang mereka tampilkan.

Studi-studi kasus lokal mengenai kepemimpinan politik di Indonesia memperlihatkan bahwa dinamika kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari konteks historis, konstruksi gender, pengaruh emosi publik, serta strategi komunikasi yang digunakan oleh para tokohnya. Kepemimpinan di Indonesia selalu lahir dari situasi sosial dan kultural yang spesifik—di mana legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif atau ideologis, tetapi juga oleh kemampuannya membaca kondisi zaman dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam hal ini, perbandingan antara pemimpin karismatik seperti Soekarno dan pemimpin teknokrat

seperti Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan dua model kepemimpinan yang berbeda, namun sama-sama efektif dalam konteks masing-masing. Soekarno muncul di masa revolusi, ketika bangsa membutuhkan simbol pemersatu yang mampu mengobarkan semangat nasionalisme dan membangun identitas kolektif. Sementara itu, Jokowi hadir di era modern dan digital, ketika masyarakat menuntut efisiensi, transparansi, serta kedekatan emosional yang lebih spontan dan visual. Perbedaan gaya ini menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan bukanlah hasil dari satu formula tetap, melainkan produk dari kesesuaian antara karakter pemimpin, kebutuhan publik, dan tantangan zamannya.

Selain faktor historis, gender juga memainkan peran penting dalam membentuk wajah kepemimpinan politik di Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh perempuan seperti Megawati Soekarnoputri, Tri Rismaharini, dan Puan Maharani menunjukkan bahwa perempuan mampu memainkan peran strategis dalam ranah politik nasional. Namun, perjalanan mereka juga mengungkap kenyataan bahwa sistem politik Indonesia masih dibayangi oleh bias gender dan norma patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi yang sering kali dilemahkan secara simbolik. Perempuan pemimpin kerap dihadapkan pada dilema antara harus menunjukkan ketegasan untuk dianggap kompeten, tetapi pada saat yang sama tetap diharapkan menunjukkan kelembutan agar tidak dianggap menyalahi norma sosial. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya dukungan kultural dan

institusional dalam menciptakan ruang politik yang benar-benar setara bagi perempuan. Upaya memperkuat partisipasi politik perempuan tidak cukup hanya melalui kebijakan afirmatif, tetapi juga perlu didukung oleh perubahan nilai sosial yang mengakui bahwa kepemimpinan perempuan sama legitimnya dengan kepemimpinan laki-laki.

Selain itu, dimensi emosional dan gaya komunikasi juga berperan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap pemimpin. Politik Indonesia tidak hanya digerakkan oleh logika rasional, tetapi juga oleh sentimen kolektif yang muncul dari bahasa tubuh, gaya bicara, dan simbol yang digunakan oleh para pemimpin. Soekarno, dengan retorika heroiknya, mampu menggerakkan massa melalui kata-kata dan emosi nasionalisme. Jokowi, sebaliknya, menggunakan bahasa visual dan gestur sederhana untuk menciptakan kedekatan yang bersifat personal. Prabowo, di sisi lain, mengandalkan gaya orasi yang emosional dan dramatis untuk membangkitkan rasa patriotisme. Pola-pola ini menunjukkan bahwa komunikasi politik bukan sekadar alat penyampaian pesan, melainkan sarana untuk membangun identitas, meneguhkan loyalitas, dan mengatur relasi antara pemimpin dan rakyat.

Dengan demikian, kepemimpinan dalam politik Indonesia merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara sejarah, budaya, emosi, gender, dan teknologi komunikasi. Dari Soekarno hingga Jokowi, dari Megawati hingga Risma dan Puan, setiap pemimpin

merepresentasikan fase tertentu dalam evolusi politik bangsa—di mana karisma, rasionalitas, dan kesetaraan gender terus dinegosiasikan dalam ruang publik. Tantangan ke depan adalah bagaimana Indonesia dapat melahirkan model kepemimpinan yang tidak hanya efektif dan adaptif terhadap zaman, tetapi juga inklusif, sensitif terhadap perbedaan, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik politiknya.

Kesimpulan

Psikologi politik dalam era digital menggambarkan perubahan mendasar dalam cara individu dan kelompok berinteraksi, berpikir, serta membentuk sikap politik. Kehadiran teknologi digital, terutama media sosial, tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memperluas jangkauan pengaruh psikologis terhadap opini publik. Algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna telah menciptakan ruang politik yang sarat emosi, di mana kemarahan, ketakutan, dan kebanggaan lebih mudah viral dibandingkan dengan diskusi yang rasional dan mendalam. Fenomena ini menjadikan politik digital sebagai arena yang sangat dinamis sekaligus berisiko, karena emosi kolektif dapat dengan cepat berubah menjadi polarisasi sosial yang tajam. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap psikologi politik menjadi sangat penting untuk menganalisis bagaimana individu dipengaruhi oleh informasi yang mereka

konsumsi, bagaimana identitas kelompok terbentuk secara daring, serta bagaimana persepsi terhadap pemimpin dan kebijakan dibentuk melalui narasi digital yang sering kali manipulatif.

Lebih jauh lagi, politik digital tidak hanya mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku. Algoritma media sosial menciptakan filter bubble atau ruang gema (echo chamber), di mana pengguna hanya terekspos pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Akibatnya, kemampuan untuk berpikir kritis dan menilai secara objektif menjadi menurun, sementara bias kognitif seperti confirmation bias semakin menguat. Dalam situasi seperti ini, politik menjadi semakin emosional dan terfragmentasi, dengan batas antara fakta dan opini semakin kabur. Banyak individu kemudian merasa lebih terhubung dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sementara pihak lain yang berbeda pandangan dianggap sebagai ancaman. Ini menimbulkan fenomena digital tribalism, di mana loyalitas emosional terhadap kelompok menggantikan rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik.

Namun, di balik tantangan tersebut, era digital juga membuka peluang besar bagi demokrasi. Teknologi memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif, memberi ruang bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk bersuara. Gerakan sosial dapat muncul dari satu unggahan viral, petisi daring dapat

memengaruhi kebijakan publik, dan komunikasi antara pemimpin dan rakyat menjadi lebih langsung tanpa perantara media tradisional. Akan tetapi, kebebasan ini harus diimbangi dengan kesadaran etis dan regulasi yang memadai. Tanpa tata kelola yang jelas, ruang digital dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, melakukan manipulasi psikologis, atau bahkan mengancam integritas pemilu melalui propaganda digital.

Oleh karena itu, tantangan utama ke depan adalah membangun kerangka etika dan regulasi politik digital yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap stabilitas demokrasi. Negara, masyarakat sipil, akademisi, dan platform teknologi perlu bekerja sama dalam merumuskan sistem yang mendorong literasi digital, transparansi algoritma, serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Politik digital seharusnya tidak menjadi alat untuk memecah-belah masyarakat, melainkan sarana untuk memperkuat partisipasi warga dan memperdalam praktik demokrasi. Dengan pemahaman psikologis yang matang, teknologi dapat diubah dari instrumen polarisasi menjadi medium yang memperkaya dialog publik, memperkuat empati sosial, dan membangun kesadaran politik yang lebih kritis serta beradab.

BAB VII

DEMOKRASI DAN PSIKOLOGI PARTISIPASI

Partisipasi politik merupakan jantung dari kehidupan demokrasi, karena melalui keterlibatan warga negara dalam proses politik, legitimasi dan arah kebijakan suatu pemerintahan dapat terbentuk. Namun, fenomena yang menarik adalah tidak semua individu menunjukkan tingkat partisipasi yang sama. Sebagian orang dengan antusias ikut serta dalam pemilu, menghadiri demonstrasi, bergabung dalam organisasi masyarakat sipil, atau aktif berdiskusi mengenai isu-isu publik. Sementara itu, ada pula kelompok masyarakat yang bersikap pasif, acuh, atau bahkan sinis terhadap politik. Perbedaan ini tidak hanya dapat dijelaskan melalui faktor sosial dan ekonomi, tetapi juga melalui sudut pandang psikologi politik yang menyoroti aspek-aspek kepribadian, emosi, persepsi, serta pengalaman sosial individu.

Psikologi politik membantu kita memahami bagaimana keyakinan, nilai, dan identitas seseorang membentuk pandangannya terhadap politik serta memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam proses demokratis. Misalnya, individu yang memiliki rasa efikasi

politik tinggi—yakni keyakinan bahwa tindakan mereka dapat membawa perubahan—cenderung lebih aktif berpartisipasi. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak memiliki kendali atau suara dalam sistem politik sering kali memilih untuk menjauh. Faktor emosional seperti rasa marah terhadap ketidakadilan, empati terhadap kelompok yang tertindas, atau semangat solidaritas sosial juga dapat menjadi pemicu kuat bagi partisipasi politik.

Selain itu, peran informasi dan pendidikan politik menjadi sangat penting dalam membentuk kesadaran dan sikap politik masyarakat. Akses terhadap informasi yang akurat, pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, serta kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu publik merupakan fondasi bagi partisipasi yang sehat dan rasional. Tanpa pendidikan politik yang memadai, partisipasi warga dapat terjebak dalam tindakan simbolik, emosional, atau bahkan manipulatif yang tidak memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan secara mendalam dinamika psikologis di balik partisipasi politik—meliputi motivasi aktivisme, pengaruh informasi dan media, serta peran pendidikan politik dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab warga negara sebagai bagian dari upaya menjaga vitalitas demokrasi.

A. Psikologi Partisipasi Politik: Mengapa Orang Terlibat?

Partisipasi politik mencakup beragam bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan publik, baik yang bersifat konvensional seperti memberikan suara dalam pemilu, maupun yang lebih non-konvensional seperti menandatangani petisi daring, mengikuti demonstrasi, atau bergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Dalam perspektif psikologi politik, keputusan seseorang untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial yang saling berkaitan.

Dari sisi faktor individual, salah satu konsep penting adalah *political efficacy* (Campbell et al., 1954), yaitu sejauh mana individu merasa bahwa tindakannya memiliki dampak nyata terhadap proses politik dan kebijakan publik. Individu yang memiliki efikasi politik tinggi akan lebih percaya bahwa suaranya berharga dan dapat membawa perubahan, sehingga lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak memiliki pengaruh dalam sistem politik cenderung bersikap pasif dan apatis. Selain itu, terdapat pula faktor *sense of civic duty*, yaitu dorongan moral untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama. Orang dengan rasa tanggung jawab sipil yang kuat biasanya menganggap keterlibatan politik sebagai kewajiban etis untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

Kepribadian dan nilai-nilai pribadi juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi. Penelitian Vecchione dan Caprara (2009) menunjukkan bahwa individu dengan kepribadian terbuka terhadap pengalaman baru (*open to experience*) cenderung lebih tertarik untuk mengeksplorasi ide-ide politik dan terlibat dalam diskusi publik. Sementara itu, individu yang memiliki sifat tanggung jawab tinggi (*conscientious*) umumnya lebih disiplin dan berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan solidaritas sosial turut memperkuat dorongan untuk berpartisipasi demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Dari sisi faktor sosial, lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berinteraksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politiknya. Teman, keluarga, dan komunitas keagamaan sering kali menjadi sumber sosialisasi politik pertama yang membentuk orientasi dan sikap seseorang terhadap isu-isu publik. Diskusi di lingkungan keluarga, ajakan dari teman sebaya, atau dorongan dari organisasi kampus dan lembaga keagamaan dapat meningkatkan kesadaran politik serta memperluas kesempatan untuk berpartisipasi. Selain itu, ketersediaan saluran ekspresi seperti media sosial, forum publik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut membuka ruang baru bagi warga untuk menyalurkan aspirasi mereka. Di era digital, platform daring memungkinkan partisipasi politik

berlangsung lebih cepat, luas, dan inklusif, sehingga setiap individu memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, partisipasi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan formal semata, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis dan sosial yang membentuk kesadaran, motivasi, dan perilaku politik seseorang.

B. Motivasi di Balik Aktivisme Politik dan Protes Sosial

Protes sosial dan aktivisme merupakan wujud nyata dari keterlibatan politik masyarakat yang muncul ketika individu atau kelompok merasa bahwa sistem yang ada tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan, kesetaraan, atau aspirasi mereka. Fenomena ini sering kali menjadi ekspresi kolektif dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, ketimpangan sosial, maupun ketidakadilan struktural yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks psikologi politik, protes dan aktivisme tidak hanya dipandang sebagai bentuk perlawanan politik, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika psikologis yang kompleks—melibatkan persepsi ketidakadilan, identitas kelompok, serta nilai moral yang tertanam kuat dalam diri individu maupun komunitas.

Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan munculnya perilaku protes adalah *Relative Deprivation Theory* yang

dikemukakan oleh Ted Robert Gurr (1970). Teori ini menyatakan bahwa protes cenderung terjadi ketika individu atau kelompok merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan kelompok lain atau dibandingkan dengan harapan mereka sendiri terhadap kondisi yang layak. Perasaan ketertinggalan atau ketidakadilan relatif ini dapat menimbulkan frustrasi sosial yang kemudian berkembang menjadi kemarahan kolektif, mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan protes sebagai upaya memperjuangkan hak dan martabat mereka. Dengan kata lain, bukan sekadar kemiskinan atau kesenjangan yang memicu aksi, melainkan rasa ketidakadilan yang dirasakan secara emosional dan sosial.

Selain itu, Social Identity Theory yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner (1979) juga memberikan penjelasan penting. Menurut teori ini, identitas seseorang tidak hanya bersumber dari kepribadian individu, tetapi juga dari keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu—seperti mahasiswa, buruh, atau komunitas keagamaan. Ketika identitas kelompok tersebut terancam oleh kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan, individu akan cenderung mengidentifikasi diri secara lebih kuat dengan kelompoknya dan termotivasi untuk bertindak demi membela kepentingan kolektif. Oleh karena itu, protes sering kali bukan hanya bentuk ekspresi politik, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas dan kohesi antaranggota kelompok yang memiliki nasib atau tujuan bersama.

Teori lain yang menyoroti aspek moral dalam perilaku aktivisme adalah konsep Moral Conviction yang dikemukakan oleh Skitka dan rekan-rekannya (2005). Menurut teori ini, ketika seseorang menganggap bahwa suatu isu menyentuh nilai moral yang mendasar—seperti kejujuran, keadilan, atau kemanusiaan—ia akan merasa terdorong untuk bertindak bahkan dengan cara-cara ekstrem demi mempertahankan nilai tersebut. Moral conviction dapat menjadi sumber motivasi kuat bagi tindakan politik yang berani, meskipun berisiko tinggi, karena individu merasa bahwa diam berarti mengkhianati prinsip moralnya sendiri.

Contoh konkret dari dinamika ini dapat dilihat dalam konteks Indonesia. Gerakan mahasiswa 1998 merupakan manifestasi dari ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan sosial terhadap rezim Orde Baru yang otoriter dan korup. Demikian pula, gerakan #ReformasiDikorupsi pada tahun 2019 muncul sebagai bentuk kemarahan moral masyarakat terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kebijakan yang dianggap mengancam transparansi publik. Sementara itu, aksi buruh menentang Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan solidaritas identitas kelompok pekerja yang merasa hak-haknya terancam oleh kebijakan ekonomi yang tidak berpihak. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa protes sosial bukanlah sekadar reaksi emosional sesaat, melainkan cerminan dari proses psikologis yang melibatkan

persepsi ketidakadilan, identitas kelompok, dan keyakinan moral yang mendalam.

Dengan demikian, protes dan aktivisme dapat dipahami sebagai fenomena yang berakar pada kebutuhan manusia untuk diakui, diperlakukan adil, dan mempertahankan nilai-nilai moral yang dianggap fundamental. Ketika saluran politik formal tidak lagi mampu menampung aspirasi masyarakat, ekspresi politik melalui gerakan sosial menjadi bentuk komunikasi politik yang paling kuat dan bermakna dalam memperjuangkan perubahan sosial.

C. Demokrasi Dalam Konteks Psikologi Politik

Demokrasi pada hakikatnya bukan hanya sekadar sistem kelembagaan atau prosedur formal dalam pemerintahan, melainkan juga merupakan suatu sistem kepercayaan, persepsi, dan interaksi psikologis antara warga negara dengan institusi negara. Dalam arti yang lebih dalam, keberlangsungan demokrasi bergantung pada hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah yang dilandasi oleh rasa saling percaya, toleransi, serta keyakinan bahwa sistem yang dijalankan adil dan representatif. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari adanya pemilu yang rutin, partai politik, atau kebebasan berpendapat, tetapi juga dari kondisi psikologis warga negara yang merasa memiliki peran, suara, dan tanggung jawab dalam menentukan arah kehidupan berbangsa.

Salah satu elemen psikologis penting dalam demokrasi adalah kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik (*trust in government*). Menurut Levi dan Stoker (2000), tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara secara langsung memengaruhi sejauh mana warga bersedia mematuhi kebijakan, berpartisipasi dalam proses politik, dan menerima hasil keputusan politik yang diambil. Ketika kepercayaan ini tinggi, masyarakat cenderung memandang negara sebagai perpanjangan dari kehendak kolektif mereka. Sebaliknya, jika kepercayaan publik menurun akibat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidaktransparanan, maka muncul sikap sinis dan apatis yang dapat menggerus legitimasi pemerintahan serta melemahkan partisipasi demokratis.

Selain kepercayaan, toleransi dan kemampuan berdialog juga menjadi pilar penting bagi kelangsungan demokrasi. Fishkin (1995) menekankan pentingnya *deliberative democracy*, yakni model demokrasi yang menempatkan dialog dan pertukaran gagasan antarwarga sebagai inti dari proses politik. Demokrasi yang sehat menuntut adanya kemampuan masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari titik temu tanpa harus saling meniadakan. Sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda menjadi indikator kedewasaan politik, karena hanya melalui proses deliberasi yang inklusif, keputusan kolektif yang adil dan rasional dapat tercapai.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat terhadap legitimasi hasil pemilu. Pemilu yang dianggap jujur, transparan, dan adil akan memperkuat stabilitas politik serta meningkatkan rasa percaya terhadap sistem demokrasi. Sebaliknya, ketika warga memandang proses pemilu sarat kecurangan atau manipulasi, kepercayaan terhadap hasilnya akan menurun, yang pada gilirannya dapat menimbulkan polarisasi, konflik sosial, bahkan delegitimasi terhadap pemerintahan yang terpilih. Persepsi ini bersifat psikologis, namun memiliki dampak sosial-politik yang besar, karena legitimasi demokrasi pada dasarnya dibangun atas kepercayaan kolektif masyarakat terhadap proses dan hasilnya.

Dalam konteks modern, muncul pula fenomena “democratic fatigue” atau kelelahan terhadap demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh David Van Reybrouck (2016). Konsep ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat merasa jenuh dan frustrasi terhadap mekanisme demokrasi yang dianggap terlalu prosedural dan tidak substantif. Banyak warga merasa bahwa suara mereka tidak benar-benar berpengaruh, dan keputusan politik justru didominasi oleh elite atau kepentingan tertentu. Akibatnya, sebagian masyarakat mulai bersikap apatis atau mencari alternatif di luar jalur demokratis, seperti populisme dan otoritarianisme yang menjanjikan efisiensi dan ketegasan.

Dengan demikian, demokrasi sejatinya tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan struktur formal dan hukum yang mapan. Ia memerlukan fondasi psikologis yang kuat—berupa kepercayaan, toleransi, persepsi legitimasi, serta rasa memiliki terhadap sistem politik. Ketika dimensi psikologis ini melemah, demokrasi akan kehilangan ruhnya dan berisiko terjebak dalam formalitas tanpa makna. Oleh karena itu, memperkuat dimensi psikologis warga negara melalui pendidikan politik, transparansi pemerintahan, dan ruang dialog yang sehat menjadi kunci utama dalam menjaga vitalitas dan keberlanjutan demokrasi.

D. Efek Desinformasi dan Politisasi dalam Demokrasi

Salah satu tantangan paling serius yang dihadapi demokrasi modern adalah meningkatnya arus desinformasi, hoaks, dan politisasi identitas, terutama melalui media sosial yang kini menjadi arena utama pembentukan opini publik. Platform digital yang awalnya diharapkan menjadi ruang dialog terbuka dan sarana pemberdayaan warga negara, justru sering kali berubah menjadi medan pertempuran informasi yang sarat manipulasi dan emosi. Dalam konteks ini, psikologi politik membantu kita memahami bagaimana dinamika kognitif, emosional, dan sosial memengaruhi cara individu memproses informasi, membentuk sikap politik, dan berinteraksi dalam ruang publik digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi

tidak hanya datang dari luar sistem, tetapi juga dari proses psikologis internal masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk membentuk opini dan perilaku kolektif.

Dari perspektif psikologis, salah satu mekanisme utama yang menjelaskan penyebaran hoaks dan desinformasi adalah *cognitive bias*, khususnya *confirmation bias*. Bias ini membuat individu cenderung lebih mudah menerima dan mempercayai informasi yang sejalan dengan keyakinan, pandangan politik, atau identitas kelompok mereka, sambil menolak atau mengabaikan informasi yang bertentangan. Dalam konteks politik, bias ini menciptakan kondisi di mana masyarakat terjebak dalam “gelembung kognitif”, di mana fakta tidak lagi menjadi ukuran kebenaran, melainkan sejauh mana informasi tersebut mendukung posisi ideologis mereka. Akibatnya, diskusi publik menjadi semakin emosional dan sulit rasional, karena setiap pihak hanya memperkuat keyakinannya sendiri tanpa membuka ruang untuk memahami sudut pandang lain.

Selain itu, terdapat pula mekanisme *fear appeal*, yakni strategi penyebaran informasi yang memanfaatkan rasa takut untuk membentuk sikap dan perilaku politik. Pesan yang mengandung ancaman, baik terhadap keamanan, agama, maupun identitas kelompok, cenderung lebih mudah menarik perhatian dan menyebar luas di media sosial. Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk merespons informasi yang menimbulkan rasa

takut karena hal itu menyentuh insting pertahanan diri. Namun, ketika rasa takut tersebut dimanipulasi secara politik, ia dapat melahirkan kepanikan moral (*moral panic*), memperkuat stereotip terhadap kelompok lain, dan menurunkan kemampuan berpikir kritis masyarakat.

Fenomena lain yang memperburuk situasi ini adalah *group polarization*, sebagaimana dijelaskan oleh Cass Sunstein (2001). Ketika individu hanya berinteraksi dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa dalam ruang tertutup—seperti grup media sosial atau komunitas daring—pandangan mereka cenderung menjadi semakin ekstrem. Ruang gema (*echo chamber*) semacam ini membuat argumen yang berbeda sulit masuk, dan setiap opini yang sejalan justru memperkuat keyakinan kolektif kelompok. Akibatnya, polarisasi sosial semakin tajam, rasa saling percaya antarwarga melemah, dan dialog lintas pandangan menjadi langka.

Contoh nyata dari dinamika ini dapat dilihat pada konteks politik Indonesia, terutama selama Pemilu 2019, di mana polarisasi antara pendukung pasangan calon 01 dan 02 mencapai titik yang sangat intens. Media sosial dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoaks politik, serta narasi berbasis agama dan etnis yang dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan sekaligus mendeligitimasi pihak lawan. Penyebaran hoaks bernuansa agama dan ras selama masa kampanye memperdalam kecurigaan antarkelompok masyarakat, bahkan

menimbulkan konflik di tingkat keluarga dan komunitas kecil. Dalam skala mikro, fenomena seperti radikalisasi politik di grup WhatsApp keluarga menunjukkan bagaimana bias kognitif, emosi kolektif, dan keterbatasan informasi dapat membentuk polarisasi yang nyata di kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, desinformasi dan politisasi identitas bukan sekadar persoalan teknologi atau etika komunikasi, melainkan juga masalah psikologis dan sosial yang mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk memilah informasi secara kritis dan lebih mengandalkan emosi serta identitas kelompok dalam mengambil keputusan politik, maka rasionalitas publik yang menjadi inti demokrasi mulai terkikis. Oleh karena itu, penting bagi negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat literasi digital, empati sosial, dan kesadaran kritis, agar ruang demokrasi tetap menjadi arena dialog yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kebenaran, bukan sekadar pada kepentingan politik yang sempit.

E. Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter warga negara yang kritis, toleran, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi tidak akan dapat bertahan hanya dengan mengandalkan mekanisme institusional seperti pemilu atau

parlemen semata, tetapi membutuhkan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, mampu berpikir rasional, serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan kesadaran politik yang sehat, memperkuat identitas kewargaan, serta menanamkan nilai-nilai demokratis sejak dini. Melalui proses pendidikan yang terarah, warga negara tidak hanya diajak untuk mengenal sistem politik, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu fungsi utama pendidikan politik adalah memberikan pengetahuan dasar tentang sistem politik dan hak-hak warga negara. Melalui pemahaman ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemerintahan bekerja, apa peran lembaga-lembaga politik, serta bagaimana mereka dapat menyalurkan aspirasi secara sah. Kesadaran tentang hak politik—seperti hak memilih, berpendapat, dan berserikat—akan memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan publik. Selain itu, pendidikan politik juga mengajarkan kecakapan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menilai informasi secara rasional, mengenali bias, dan membedakan antara fakta dengan opini. Di era digital yang dipenuhi banjir informasi dan berita palsu, keterampilan berpikir kritis menjadi benteng utama melawan manipulasi politik dan penyebaran hoaks.

Fungsi penting lainnya adalah mendorong lahirnya aktivisme sosial yang konstruktif. Pendidikan politik yang baik tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial dan keberanian untuk bertindak. Melalui pemahaman terhadap masalah publik—seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, atau kerusakan lingkungan—peserta didik diharapkan mampu berpartisipasi dalam mencari solusi dan melakukan advokasi secara damai. Dengan demikian, pendidikan politik dapat menjadi wahana pembentukan citizen empowerment, di mana warga negara tidak hanya menjadi penonton politik, melainkan aktor yang turut menentukan arah perubahan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan model pendidikan politik yang inovatif dan partisipatif. Salah satu pendekatan yang efektif adalah civic education berbasis pengalaman atau project-based learning, di mana peserta didik tidak hanya mempelajari teori politik, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan politik di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan mereka belajar dari pengalaman nyata, memahami kompleksitas masalah publik, dan mengembangkan empati terhadap berbagai kelompok sosial. Contohnya, program Kampus Merdeka di Indonesia dapat menjadi wadah yang relevan, karena memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan komunitas, serta mengamati dinamika politik dan kebijakan publik secara nyata.

Selain itu, di era media digital, literasi digital menjadi aspek yang tak kalah penting dalam pendidikan politik modern. Kemampuan untuk mengenali, memverifikasi, dan menyaring informasi di internet merupakan bentuk baru dari keterampilan kewargaan demokratis. Literasi digital membantu masyarakat agar tidak mudah termakan propaganda, disinformasi, atau ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. Melalui literasi digital yang kuat, warga negara dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang sehat.

Dengan demikian, pendidikan politik bukan sekadar transfer pengetahuan tentang sistem pemerintahan, melainkan proses pembentukan karakter demokratis yang menyeluruh. Ia mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan praktis dalam membentuk warga negara yang berpikir kritis, bertindak etis, dan berpartisipasi aktif. Dalam jangka panjang, pendidikan politik yang efektif akan melahirkan masyarakat yang tidak hanya melek politik, tetapi juga matang secara moral dan psikologis—sebuah prasyarat utama bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

F. Studi Kasus Lokal

1. GejayanMemanggil (2019 & 2022)

Gerakan #GejayanMemanggil, yang berlangsung pada tahun 2019 dan kembali muncul pada 2022, merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah politik kontemporer Indonesia yang memperlihatkan bagaimana kesadaran kolektif, moral, dan digital dapat bersatu membentuk kekuatan sosial yang besar. Gerakan ini lahir di Yogyakarta—sebuah kota dengan tradisi intelektual dan aktivisme mahasiswa yang kuat—sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial dan merugikan kepentingan publik, seperti Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bagi banyak mahasiswa dan masyarakat sipil, kebijakan-kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap prinsip keadilan sosial yang diperjuangkan sejak era reformasi.

Dari sudut pandang psikologi politik, gerakan #GejayanMemanggil dapat dipahami sebagai manifestasi dari moral outrage—rasa marah moral terhadap ketidakadilan sosial dan pelanggaran nilai-nilai etis yang fundamental. Mengacu pada teori Moral Conviction yang dikemukakan

oleh Skitka (2005), kemarahan moral muncul ketika seseorang merasa nilai-nilai inti seperti kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan publik dilanggar oleh pihak berkuasa. Emosi ini menjadi pemicu yang kuat bagi tindakan kolektif, karena partisipasi dalam protes tidak lagi didorong semata oleh kepentingan pribadi, tetapi oleh keyakinan moral untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam konteks #GejayanMemanggil, kemarahan moral terhadap pelemahan lembaga antikorupsi dan kebijakan yang dianggap mengabaikan suara rakyat menjadi energi psikologis yang menggerakkan ribuan individu turun ke jalan dengan satu seruan: menuntut keadilan dan transparansi.

Selain itu, gerakan ini juga memperlihatkan kuatnya identitas kolektif mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Mahasiswa tidak hanya memposisikan diri sebagai kelompok akademik, tetapi juga sebagai representasi suara rakyat yang terpinggirkan oleh kebijakan elitis. Solidaritas ini berakar pada kesadaran bersama bahwa perjuangan mereka bukan semata untuk kepentingan kampus, melainkan untuk menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam psikologi sosial, identitas kolektif seperti ini memperkuat rasa kebersamaan, komitmen moral, dan keberanian untuk bertindak, bahkan dalam menghadapi risiko politik dan sosial. Slogan-slogan seperti “Rakyat Bersatu Tak

Bisa Dikalahkan” atau “Yogyakarta Melawan” menjadi simbol solidaritas dan kekuatan moral yang menyatukan individu-individu dari berbagai latar belakang.

Ciri lain yang menonjol dari gerakan #GejayanMemanggil adalah penggunaan media sosial sebagai alat konsolidasi, mobilisasi, dan dokumentasi. Aktivisme digital memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, mengkoordinasikan aksi, serta membangun narasi alternatif terhadap media arus utama. Platform seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp menjadi ruang strategis untuk mengorganisir massa, menyebarkan ajakan, hingga mendokumentasikan aksi secara real-time. Proses ini menunjukkan bagaimana aktivisme digital mampu bertransformasi menjadi gerakan lapangan yang nyata, memperlihatkan bentuk baru partisipasi politik generasi muda yang lebih adaptif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi. Melalui media sosial pula, pesan moral dan politik gerakan ini menyebar secara luas, menciptakan efek viral yang memperkuat tekanan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif.

Efek dari gerakan #GejayanMemanggil tidak hanya terlihat dalam bentuk aksi damai massal yang berlangsung secara tertib dan solid, tetapi juga dalam resonansi sosial dan politik yang ditimbulkannya. Tekanan publik yang dihasilkan dari

aksi ini memaksa pemerintah dan DPR untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek, serta mendorong perdebatan nasional mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, gerakan ini juga berfungsi sebagai pendidikan politik informal yang sangat luas. Melalui partisipasi langsung dan diskusi terbuka di ruang publik, masyarakat—khususnya generasi muda—belajar memahami hak-hak politik mereka, pentingnya transparansi, serta cara menyampaikan kritik secara damai dan konstruktif. Dengan demikian, #GejayanMemanggil bukan sekadar peristiwa protes mahasiswa, melainkan simbol kebangkitan kesadaran politik generasi muda di era digital. Gerakan ini memperlihatkan bahwa demokrasi dapat tetap hidup dan dinamis ketika warganya memiliki keberanian moral, solidaritas sosial, serta kecakapan digital untuk menuntut akuntabilitas dari penguasa. Lebih dari itu, ia menjadi bukti bahwa psikologi kolektif yang berakar pada rasa keadilan dan tanggung jawab sosial mampu melahirkan perubahan nyata di tengah tantangan politik dan informasi yang semakin kompleks.

2. Petisi Online Mahasiswa: Change.org dan Aksi Digital

Fenomena petisi online yang banyak dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat melalui platform seperti Change.org menandai babak baru dalam bentuk partisipasi

politik digital di era modern. Gerakan semacam ini menjadi saluran ekspresi politik yang relatif baru, namun memiliki daya jangkau yang luas dan dampak sosial yang signifikan. Contoh yang mencuat di Indonesia antara lain petisi “Batalkan UU Cipta Kerja”, “Kembalikan KPK sebagai lembaga independen”, serta berbagai petisi lain yang menyoroiti isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Petisi-petisi tersebut bukan hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran politik generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi dan media digital sebagai instrumen perjuangan sosial.

Dari sudut pandang psikologi politik, keterlibatan dalam petisi online dapat dijelaskan melalui konsep low-cost activism, yaitu bentuk aktivisme dengan hambatan partisipasi yang sangat rendah. Seperti dijelaskan oleh Shoshana Zuboff (2019), dunia digital telah memudahkan warga negara untuk mengekspresikan pendapat politik mereka secara instan, cukup dengan satu klik atau tanda tangan digital. Bagi banyak individu, terutama mahasiswa, tindakan ini menjadi cara cepat dan efisien untuk menunjukkan sikap politik tanpa memerlukan mobilisasi fisik atau pengorbanan besar. Meskipun dianggap sebagai bentuk aktivisme yang “ringan”, petisi online tetap berfungsi sebagai pemicu kesadaran

kolektif dan langkah awal menuju keterlibatan politik yang lebih mendalam. Dengan kata lain, low-cost activism membuka pintu partisipasi bagi mereka yang sebelumnya mungkin merasa tidak memiliki cukup waktu, keberanian, atau akses untuk ikut serta dalam gerakan sosial secara langsung.

Selain kemudahan akses, penyebaran petisi online juga sangat dipengaruhi oleh prinsip social proof, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Cialdini (2001). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu sering kali dipengaruhi oleh tindakan orang lain; semakin banyak orang yang menandatangani suatu petisi, semakin besar dorongan psikologis bagi individu lain untuk ikut berpartisipasi. Dalam konteks digital, angka jumlah tanda tangan yang terus meningkat berfungsi sebagai indikator sosial bahwa isu tersebut penting dan mendapat dukungan luas. Hal ini menciptakan efek bola salju (snowball effect), di mana partisipasi satu individu dapat memicu partisipasi yang lebih besar, sehingga gerakan digital berkembang menjadi tekanan sosial dan politik yang nyata.

Partisipasi dalam petisi online juga dapat meningkatkan rasa memiliki pengaruh politik atau political efficacy di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Ketika seseorang menandatangani petisi dan melihat bahwa suaranya turut berkontribusi dalam memperkuat gerakan, muncul perasaan

bahwa tindakannya memiliki dampak terhadap kebijakan publik atau opini sosial. Perasaan berdaya ini penting dalam konteks psikologi politik karena memperkuat keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memengaruhi sistem, tidak peduli seberapa kecil kontribusinya. Dalam jangka panjang, pengalaman partisipasi semacam ini dapat memperkuat identitas kewargaan demokratis dan meningkatkan keterlibatan politik yang lebih luas.

Efek dari petisi online tidak hanya berhenti pada dunia maya, tetapi juga menjalar ke ranah publik dan politik formal. Petisi yang viral sering kali membentuk opini publik, menekan lembaga pemerintah untuk merespons, serta menarik perhatian media massa. Dalam banyak kasus, media kemudian mengangkat isu-isu dari petisi tersebut, memperluas cakupan wacana dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan tertentu. Tak jarang pula, gerakan petisi digital menjadi titik awal bagi munculnya dukungan politik alternatif di luar partai, mencerminkan pergeseran bentuk partisipasi politik dari yang bersifat institusional menuju bentuk yang lebih horizontal, spontan, dan berbasis jaringan sosial.

Dengan demikian, fenomena petisi online mahasiswa bukan sekadar tren digital, melainkan bagian dari transformasi

psikologis dan sosial dalam demokrasi modern. Ia menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperluas ruang partisipasi politik dan memperkuat kesadaran kolektif di kalangan warga negara. Di sisi lain, gerakan ini juga menandai munculnya bentuk baru aktivisme yang lebih fleksibel, partisipatif, dan egaliter—di mana setiap klik, setiap tanda tangan, dan setiap aksi digital kecil dapat menjadi bagian dari gelombang besar perubahan sosial dan politik yang bermakna.

Kesimpulan

Partisipasi dalam demokrasi tidak dapat dipahami hanya sebatas tindakan memberikan suara dalam pemilu, melainkan merupakan refleksi dari proses psikologis yang kompleks yang melibatkan keyakinan, emosi, identitas, serta nilai-nilai moral yang dianut oleh individu dan kelompok. Demokrasi yang sejati tumbuh dari kesadaran warga negara bahwa keterlibatan mereka memiliki makna dan konsekuensi terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Setiap tindakan politik—mulai dari memilih, berdiskusi, hingga melakukan protes—berakar pada persepsi seseorang tentang keadilan, rasa memiliki terhadap sistem, dan kepercayaan bahwa suaranya dapat membawa perubahan. Dalam

konteks ini, partisipasi politik bukan hanya ekspresi rasional, tetapi juga manifestasi dari dorongan emosional dan moral yang mendalam.

Aktivisme dan protes sosial sering kali lahir sebagai respons terhadap ketimpangan, ketidakadilan, dan pelanggaran nilai-nilai moral. Ketika warga merasa bahwa sistem politik tidak lagi merepresentasikan aspirasi mereka atau justru menindas kelompok tertentu, muncul dorongan moral untuk bertindak. Seperti dijelaskan dalam konsep moral conviction oleh Skitka (2005), kemarahan moral terhadap ketidakadilan dapat memotivasi tindakan politik yang berani dan konsisten. Dalam hal ini, aktivisme menjadi bentuk pembelaan terhadap nilai-nilai fundamental demokrasi seperti kebebasan, transparansi, dan kesetaraan. Namun, dorongan moral tersebut juga perlu diarahkan secara konstruktif agar tidak berubah menjadi tindakan destruktif atau intoleran. Oleh karena itu, keberadaan ruang dialog dan saluran partisipasi yang sehat menjadi sangat penting agar ekspresi politik warga dapat tersalurkan dengan damai dan produktif.

Di sisi lain, tantangan besar bagi demokrasi modern adalah meningkatnya arus desinformasi, hoaks, dan politisasi identitas yang menyusup melalui media sosial dan ruang digital. Informasi palsu tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga memanipulasi emosi dan memperkuat bias kognitif yang sudah ada, seperti confirmation bias dan group polarization. Ketika masyarakat hanya mau mendengar hal-hal yang sesuai dengan pandangannya, ruang publik kehilangan sifat

deliberatifnya—dialog berubah menjadi pertentangan, dan perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman, bukan kekayaan demokrasi. Dalam jangka panjang, fenomena ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga politik dan memperkuat apatisme masyarakat, di mana warga merasa suara mereka tidak lagi bermakna.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan politik memiliki peran yang sangat vital. Ia berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang kritis, rasional, dan beretika. Melalui pendidikan politik yang berbasis pada pengalaman, literasi digital, dan nilai-nilai demokratis, masyarakat dapat belajar menyaring informasi, memahami perbedaan, serta menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Pendidikan politik membantu warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sektarian atau propaganda, sekaligus menumbuhkan kemampuan reflektif untuk memahami bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan upaya bersama untuk mencapai kebaikan publik.

Dengan demikian, partisipasi politik yang sadar dan kritis menjadi penentu keberlanjutan demokrasi. Demokrasi tidak akan kuat hanya dengan aturan dan lembaga, tetapi dengan warga negara yang memiliki kesadaran moral, kapasitas intelektual, dan kematangan emosional untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Di tengah ancaman apatisme, polarisasi, dan manipulasi informasi,

memperkuat dimensi psikologis warga melalui pendidikan politik dan literasi demokrasi adalah langkah mendasar untuk memastikan bahwa demokrasi tetap hidup—bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai budaya berpikir dan bertindak yang berakar pada kesadaran kolektif masyarakat.

Kuis Reflektif

Pilihan Ganda

1. Teori yang menjelaskan bahwa orang akan melakukan aksi protes ketika merasa kelompoknya diperlakukan tidak adil adalah:
 - a. Social Identity Theory
 - b. Relative Deprivation Theory
 - c. Moral Conviction Theory
 - d. Cognitive Dissonance Theory
2. Manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan partisipasi politik digital?
 - a. Pemungutan suara di TPS
 - b. Tanda tangan petisi online
 - c. Pidato kampanye
 - d. Aksi damai di gedung DPR

Pertanyaan Esai

1. Jelaskan mengapa mahasiswa sering menjadi pelopor gerakan sosial di Indonesia!
2. Apa bahaya utama dari politisasi dan disinformasi dalam demokrasi digital?

3. Bagaimana pendidikan politik bisa melindungi demokrasi dari krisis kepercayaan?

BAB VIII

TEKNOLOGI, MEDIA SOSIAL, DAN PSIKOLOGI POLITIK

Teknologi digital, terutama media sosial, telah merevolusi lanskap politik global dengan cara yang sangat mendalam dan kompleks. Kehadiran platform seperti X (Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube telah mengubah tidak hanya cara politisi berkomunikasi dengan publik, tetapi juga bagaimana masyarakat membentuk, menyebarkan, dan mempertahankan opini politik mereka. Dalam dunia yang semakin terhubung secara daring, pesan-pesan politik kini dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik, melampaui batas geografis dan sosial. Algoritma media sosial berperan besar dalam menentukan informasi apa yang muncul di layar pengguna, sehingga menciptakan gelembung informasi (filter bubble) yang memperkuat pandangan tertentu dan sering kali mempersempit ruang dialog publik.

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi data dan kecerdasan buatan telah memungkinkan kampanye politik memanfaatkan analisis perilaku untuk menargetkan pesan secara personal, bahkan hingga pada tingkat emosi dan preferensi individu. Strategi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi, manipulasi opini, dan integritas

demokrasi. Dalam konteks ini, politik tidak lagi sekadar soal ideologi dan visi kebangsaan, melainkan juga tentang bagaimana narasi dan citra digital dikelola dengan cermat untuk membentuk persepsi publik.

Selain membawa peluang untuk memperluas partisipasi politik, teknologi digital juga menghadirkan tantangan besar, seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang kian tajam. Dinamika politik digital menciptakan medan baru di mana kecepatan informasi sering kali mengalahkan kedalaman analisis. Oleh karena itu, memahami pengaruh teknologi terhadap persepsi, sikap, dan perilaku politik menjadi sangat penting agar masyarakat mampu beradaptasi secara kritis dan etis di tengah arus informasi yang terus berubah. Bab ini tidak hanya mengulas bagaimana teknologi membentuk perilaku politik modern, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang tanggung jawab moral, sosial, dan etika dalam membangun budaya politik yang sehat di era digital.

Teknologi digital, terutama media sosial, telah mengubah lanskap politik global secara mendasar. Dari cara politisi berkomunikasi, hingga cara publik membentuk opini, semuanya kini dipengaruhi algoritma, platform, dan strategi psikologis yang memanfaatkan data perilaku. Bab ini mengeksplorasi bagaimana teknologi memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politik, sekaligus membuka diskusi tentang tantangan etis dan sosial dalam era politik digital.

A. Pengaruh Teknologi Terhadap Psikologi Politik Kontemporer

Pengaruh teknologi terhadap psikologi politik kontemporer tampak jelas dalam cara manusia berpikir, merasakan, dan bertindak di ranah politik. Transformasi digital telah mengubah proses kognitif individu, di mana kecepatan arus informasi yang sangat tinggi mendorong munculnya reaksi emosional yang instan terhadap isu-isu politik. Media sosial, dengan sistem notifikasi dan algoritmanya yang dirancang untuk memicu keterlibatan emosional, mendorong pengguna untuk merespons peristiwa politik tanpa refleksi mendalam. Akibatnya, politik sering kali dipersepsikan melalui lensa emosi sesaat—seperti kemarahan, kebanggaan, atau ketakutan—daripada analisis rasional yang berbasis data dan argumen. Fenomena ini menimbulkan efek psikologis berupa peningkatan polarisasi dan penurunan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perbedaan pandangan politik.

Di sisi lain, keterbukaan informasi yang diharapkan memperluas wawasan masyarakat justru sering kali menimbulkan apa yang disebut sebagai *information overload*, yakni kondisi ketika individu merasa kewalahan oleh ledakan informasi yang tak terbatas dan sulit diverifikasi. Dalam situasi ini, kapasitas kognitif seseorang untuk memproses informasi politik menjadi terbatas, sehingga mereka cenderung mengandalkan sumber-sumber yang paling mudah diakses atau paling sering muncul di linimasa mereka. Akibatnya, bias

konfirmasi semakin menguat karena individu hanya menyerap informasi yang sesuai dengan keyakinan awalnya, mempersempit ruang diskusi rasional dan memperkuat identitas politik kelompok tertentu.

Lebih jauh lagi, isu privasi menjadi tantangan serius dalam politik digital modern. Ketika aktivitas daring seseorang dapat dilacak dan dianalisis, data pribadi berubah menjadi komoditas politik yang bernilai tinggi. Melalui praktik yang dijelaskan oleh Shoshana Zuboff dalam konsep *Surveillance Capitalism* (2019), data perilaku dikumpulkan, diproses, dan dimanfaatkan untuk memprediksi serta memengaruhi pilihan politik individu, misalnya melalui iklan mikro (*microtargeting*) dalam kampanye pemilu. Strategi ini memanfaatkan psikologi manusia untuk menciptakan pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kelemahan emosional tiap pemilih, sehingga mengaburkan batas antara persuasi yang sah dan manipulasi yang tersembunyi.

Dalam kerangka teoritis, Graber (1984) melalui *Information Processing Theory* menekankan bahwa individu memproses informasi politik berdasarkan kapasitas kognitif, pengalaman, dan motivasi internal mereka. Dalam konteks teknologi digital saat ini, teori tersebut menjadi semakin relevan karena kemampuan seseorang untuk memilah dan memahami informasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana algoritma menentukan apa yang mereka lihat. Dengan

demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen psikologis yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku politik masyarakat modern. Transformasi ini menuntut kesadaran baru tentang pentingnya literasi digital dan etika politik dalam menghadapi kompleksitas psikologi politik di era informasi.

B. Media Sosial Sebagai Alat Pengaruh Dalam Politik

Media sosial kini telah berkembang menjadi arena utama dalam kontestasi politik modern, menggantikan peran media tradisional sebagai sumber utama informasi dan ruang pembentukan opini publik. Platform seperti Facebook, X (Twitter), TikTok, Instagram, dan YouTube bukan hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang strategis bagi politisi dan partai untuk membangun citra, menyebarkan pesan, serta memengaruhi perilaku pemilih. Kampanye politik digital kini dirancang dengan memanfaatkan fitur-fitur platform tersebut, seperti Facebook Ads, Twitter/X threads, atau video pendek di TikTok, untuk menjangkau audiens secara luas dan personal. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial memungkinkan isu politik berkembang secara viral dalam waktu singkat, membentuk persepsi publik bahkan sebelum fakta dan analisis mendalam muncul di ruang publik.

Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam mobilisasi massa dan aktivisme politik. Gerakan seperti #GejayanMemanggil di Indonesia atau #BlackLivesMatter di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana kekuatan digital mampu menggerakkan solidaritas sosial lintas wilayah dan kelas sosial. Aksi-aksi ini membuktikan bahwa media sosial bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana pembentukan kesadaran kolektif dan tekanan politik terhadap penguasa. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga mengungkap tantangan baru: munculnya slacktivism atau aktivisme semu, di mana partisipasi politik berhenti pada level simbolik, seperti menyukai, membagikan, atau mengunggah konten, tanpa tindakan nyata di dunia offline.

Dalam konteks pencitraan politik, media sosial menjadi ruang utama untuk membangun dan mempertahankan “brand” politik seorang pemimpin. Misalnya, Presiden Joko Widodo dikenal dengan gaya “merakyat”-nya yang ditampilkan melalui konten sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat, sementara Prabowo Subianto menampilkan citra “tegas” dan “militeristik” yang menegaskan karakter kepemimpinannya. Citra semacam ini dibangun secara sistematis melalui strategi komunikasi visual, naratif, dan emosional yang disesuaikan dengan karakter audiens masing-masing.

Di balik semua itu, strategi psikologis memainkan peran krusial dalam kampanye digital. Teknik framing digunakan untuk

membingkai isu dengan cara tertentu agar sesuai dengan emosi dan nilai-nilai audiens, sementara emotional appeal dimanfaatkan untuk memicu rasa empati, marah, atau bangga—emosi yang dapat meningkatkan keterlibatan politik. Lebih jauh, praktik microtargeting berbasis perilaku daring memungkinkan pesan politik disesuaikan dengan preferensi individu berdasarkan data aktivitas mereka di dunia maya. Bahkan, penggunaan meme kini menjadi salah satu alat komunikasi politik paling efektif, karena bentuknya yang ringan, mudah disebarkan, dan penuh simbolisme. Meme berfungsi sebagai alat narasi identitas politik, menciptakan solidaritas dalam kelompok sekaligus membedakan “kami” dari “mereka”. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga medan psikologis di mana persepsi, emosi, dan identitas politik dibentuk, dipertarungkan, dan dimanipulasi secara halus namun mendalam.

C. Psikologi di Balik Manipulasi Media dalam Politik

Dalam era politik digital kontemporer, manipulasi opini publik telah berkembang menjadi proses yang sangat canggih dan halus, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi untuk memengaruhi cara masyarakat berpikir dan mengambil keputusan politik. Manipulasi ini tidak lagi dilakukan secara frontal melalui propaganda eksplisit, melainkan melalui pendekatan psikologis yang

bekerja di tingkat bawah sadar individu. Media, terutama media sosial, menjadi instrumen utama dalam strategi ini, karena mampu menanamkan pesan secara berulang, personal, dan emosional melalui algoritma yang menyesuaikan konten dengan preferensi pengguna. Dengan demikian, publik sering kali tidak menyadari bahwa opini dan pilihan politik mereka telah diarahkan melalui desain komunikasi yang sistematis dan terencana.

Salah satu taktik yang umum digunakan adalah priming, yaitu upaya menstimulasi publik untuk lebih peka terhadap isu atau topik tertentu sehingga lebih mudah menerima pesan politik yang diinginkan. Misalnya, menjelang pemilihan umum, media dapat secara terus-menerus menyoroti isu keamanan nasional atau korupsi agar pemilih lebih responsif terhadap kandidat yang dianggap “tegas” atau “bersih”. Taktik lain yang tak kalah penting adalah framing, sebagaimana dijelaskan oleh Entman (1993), yaitu cara menyajikan informasi untuk membentuk persepsi publik secara tertentu—apakah sebuah kebijakan dipandang sebagai solusi atau ancaman, prestasi atau kegagalan, bergantung pada bingkai yang digunakan media. Framing ini bekerja secara halus karena memengaruhi emosi dan nilai moral yang melekat dalam interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa.

Selain itu, muncul pula konsep nudge politik yang diperkenalkan oleh Thaler dan Sunstein (2008), yakni strategi memberikan dorongan kecil untuk memengaruhi keputusan individu

tanpa menggunakan paksaan langsung. Dalam konteks politik digital, nudge ini dapat berupa penempatan tombol “donasi” di lokasi strategis, penyajian konten positif tentang kandidat tertentu lebih sering di beranda, atau bahkan rekomendasi otomatis untuk mengikuti akun politik tertentu. Walau tampak sepele, dorongan kecil ini dapat mengubah perilaku pemilih secara signifikan karena memanfaatkan bias kognitif manusia, seperti kecenderungan mengikuti pilihan yang paling mudah diakses atau tampak populer.

Salah satu contoh paling terkenal dari praktik manipulasi psikologis dalam politik adalah skandal Cambridge Analytica, di mana data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan dianalisis untuk menargetkan pesan politik yang disesuaikan dengan kepribadian pemilih. Teknik ini digunakan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 serta referendum Brexit di Inggris, dengan hasil yang mengguncang tatanan politik global. Melalui analisis perilaku daring, perusahaan tersebut mampu menyusun profil psikologis individu dan mengirimkan pesan yang dirancang untuk memicu emosi spesifik, seperti ketakutan, harapan, atau kemarahan.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara lain, seperti di Filipina dan Brasil, di mana disinformasi dan narasi “anti-elite” dimanfaatkan untuk membangun citra populis dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Melalui penyebaran berita palsu, teori konspirasi, dan manipulasi simbol-

simbol nasionalisme, para aktor politik mampu menanamkan persepsi bahwa mereka adalah “wakil rakyat sejati” yang melawan kekuasaan lama. Akibatnya, batas antara fakta dan opini menjadi semakin kabur, dan masyarakat terjebak dalam realitas politik yang dikonstruksi secara psikologis. Dalam konteks ini, memahami psikologi di balik manipulasi media bukan sekadar upaya akademik, tetapi juga langkah penting untuk melindungi integritas demokrasi dan kesadaran kritis warga negara di tengah gempuran informasi yang tak lagi netral.

D. Kecenderungan Polarisasi dan Echo Chambers di Media Sosial

Salah satu dampak paling signifikan dari kemunculan media sosial dalam ranah politik modern adalah munculnya polarisasi dan fenomena echo chamber, di mana individu cenderung berinteraksi hanya dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Media sosial, dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, secara tidak langsung menciptakan ruang gema digital di mana pandangan yang sama diulang-ulang dan diperkuat tanpa adanya perlawanan dari opini berbeda. Akibatnya, pengguna terjebak dalam lingkaran informasi yang homogen, yang bukan hanya memperkuat keyakinan lama, tetapi juga menurunkan kemampuan mereka untuk menerima pandangan alternatif. Fenomena ini menjadikan ruang publik digital semakin tertutup dan terfragmentasi,

sehingga proses deliberasi demokratis yang sehat menjadi sulit terwujud.

Kondisi ini diperparah oleh fenomena group polarization, sebagaimana dijelaskan oleh Cass Sunstein (2001), yakni kecenderungan kelompok yang berpandangan sama untuk menjadi lebih ekstrem setelah berdiskusi bersama. Dalam konteks media sosial, proses ini terjadi karena setiap komentar, “like,” dan “share” berfungsi sebagai penguatan sosial terhadap keyakinan kelompok. Akibatnya, diskusi politik yang seharusnya membuka wawasan justru menjadi ajang peneguhan identitas kelompok dan penolakan terhadap pandangan berbeda. Polarisasi ini sering kali memunculkan permusuhan dan dehumanisasi terhadap “lawan politik,” menjadikan perdebatan publik lebih emosional daripada rasional.

Faktor penting lainnya adalah algorithmic bias, di mana algoritma platform seperti Facebook, YouTube, atau TikTok secara otomatis menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna. Meskipun hal ini meningkatkan kenyamanan dan relevansi pengalaman digital, dampak jangka panjangnya adalah penyempitan wawasan politik karena pengguna jarang terpapar pada pandangan yang berbeda. Algoritma ini, tanpa disadari, memperkuat bias konfirmasi (confirmation bias) dan menciptakan ilusi bahwa mayoritas orang berpikir seperti kita, padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam jangka panjang, situasi ini mengikis fondasi

pluralisme dan empati sosial, karena masyarakat terbiasa memandang dunia dari sudut pandang yang sempit dan partisan.

Secara sosial, fenomena polarisasi digital ini telah melemahkan ruang publik deliberatif, yaitu ruang di mana warga seharusnya dapat bertukar pikiran secara rasional dan terbuka. Ketika perdebatan publik berubah menjadi pertarungan identitas dan emosi, politik kehilangan substansinya sebagai sarana mencari solusi bersama. Akibatnya, muncul fragmentasi sosial, di mana masyarakat terpecah dalam kelompok-kelompok yang saling curiga dan sulit berdialog secara konstruktif. Konflik politik yang semula berbasis ideologi kini bergeser menjadi konflik identitas, diwarnai oleh sentimen agama, etnis, dan loyalitas kelompok.

Fenomena ini juga nyata terlihat di Indonesia, terutama selama kontestasi politik besar seperti Pemilu 2019, yang memperlihatkan polarisasi tajam antara pendukung pasangan 01 (Jokowi–Ma'ruf Amin) dan 02 (Prabowo–Sandiaga Uno). Media sosial menjadi arena pertempuran narasi yang disertai penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye negatif yang menajamkan perbedaan. Di berbagai grup WhatsApp, muncul pula bentuk radikalisasi politik berbasis agama, di mana wacana keagamaan digunakan untuk membenarkan posisi politik tertentu. Selain itu, menjelang pemilu, narasi konspiratif dan disinformasi semakin marak,

memperburuk ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam konteks ini, polarisasi dan echo chamber bukan sekadar fenomena teknologis, tetapi juga persoalan psikologis dan sosial yang kompleks. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan literasi digital, pendidikan politik yang kritis, serta komitmen bersama untuk mengembalikan media sosial sebagai ruang dialog yang sehat dan inklusif, bukan sebagai medan perang ideologis yang memecah belah bangsa.

E. Dampak Media Sosial terhadap Persepsi dan Opini Publik

Media sosial telah membawa perubahan mendasar terhadap cara masyarakat membentuk persepsi dan opini politik. Dalam konteks psikologi politik kontemporer, platform digital tidak hanya menjadi saluran penyebaran informasi, tetapi juga arena pembentukan makna sosial dan emosional yang sangat memengaruhi cara individu memahami realitas politik. Salah satu fenomena penting yang muncul adalah visual dominance, di mana konten visual—seperti video pendek, foto, dan infografis—memiliki kekuatan jauh lebih besar dalam memengaruhi persepsi publik dibandingkan argumen rasional atau teks panjang. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memanfaatkan kecepatan dan daya tarik visual untuk menarik perhatian, membuat pesan politik dikonsumsi secara instan tanpa

banyak refleksi kritis. Hal ini menjadikan opini publik semakin terbentuk oleh kesan emosional sesaat ketimbang pemikiran yang matang, sehingga kualitas deliberasi politik cenderung menurun.

Selain itu, mekanisme psikologis seperti availability heuristic, sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Kahneman (2011), turut berperan besar dalam membentuk persepsi politik di era digital. Menurut prinsip ini, individu cenderung menganggap informasi yang paling sering muncul di linimasa mereka sebagai yang paling penting atau paling benar. Algoritma media sosial yang menampilkan konten berdasarkan popularitas dan interaksi memperkuat efek ini, karena isu atau narasi yang sering diulang—bahkan jika tidak sepenuhnya akurat—lebih mudah dipercaya oleh publik. Akibatnya, kebenaran faktual sering kali kalah oleh “kebenaran perseptual,” di mana apa yang tampak dominan di dunia maya dianggap sebagai representasi realitas sosial. Fenomena ini menjelaskan bagaimana disinformasi atau berita palsu dapat dengan cepat membentuk opini publik dan bahkan memengaruhi hasil pemilu.

Aspek psikologis lain yang tak kalah penting adalah munculnya affective polarization, yaitu kecenderungan individu untuk tidak hanya berbeda pandangan politik, tetapi juga mengembangkan perasaan negatif yang kuat terhadap kelompok lawan. Dalam konteks media sosial, perbedaan politik tidak lagi dipahami sebagai variasi pandangan dalam masyarakat demokratis, melainkan sebagai

pertempuran identitas antara “kami” dan “mereka.” Lawan politik dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai, moralitas, atau bahkan eksistensi kelompok sendiri. Kondisi ini diperkuat oleh konten-konten emosional yang viral, seperti meme satir, video provokatif, atau narasi konspiratif, yang menstimulasi reaksi afektif seperti marah, takut, atau benci. Akibatnya, ruang dialog publik menjadi semakin sempit, dan politik lebih sering didorong oleh emosi daripada argumentasi rasional.

Dalam konteks demokrasi, dampak dari dinamika ini sangat signifikan. Ketika emosi mendominasi ruang publik, proses deliberatif—yakni diskusi rasional untuk mencari solusi bersama—menjadi lemah. Pemilih menjadi lebih mudah dimanipulasi melalui strategi komunikasi yang bersifat emosional dan sensasional, bukan berdasarkan visi kebijakan yang rasional. Kampanye politik kemudian bergeser dari adu gagasan menjadi adu citra dan emosi, di mana keberhasilan diukur dari seberapa viral suatu pesan, bukan dari substansinya. Situasi ini menimbulkan risiko serius bagi kualitas demokrasi, karena keputusan politik masyarakat sering kali didasarkan pada persepsi yang dibentuk oleh algoritma, bukan pada pertimbangan rasional yang mendalam.

Oleh karena itu, tantangan utama di era politik digital bukan hanya soal kemampuan memahami informasi, tetapi juga literasi digital dan literasi emosional politik. Literasi digital penting agar

masyarakat mampu mengenali disinformasi, bias algoritma, dan strategi manipulatif di balik konten politik. Sementara literasi emosional politik dibutuhkan untuk mengelola respons afektif—seperti kemarahan, ketakutan, dan kebencian—agar tidak mudah dimanfaatkan oleh aktor politik. Dengan membangun kesadaran kritis ini, publik dapat menjadi lebih resilien terhadap pengaruh psikologis media sosial dan berperan aktif dalam menciptakan ruang politik yang lebih rasional, inklusif, dan demokratis.

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai pengaruh teknologi digital terhadap psikologi politik kontemporer, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi kekuatan dominan yang secara fundamental mengubah cara individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam konteks politik. Transformasi ini terjadi bukan hanya pada level komunikasi politik, tetapi juga pada tingkat psikologis yang lebih dalam—mempengaruhi persepsi, emosi, dan pengambilan keputusan publik. Melalui mekanisme algoritma, teknologi digital kini mampu menyeleksi, menyesuaikan, dan menyebarkan informasi politik secara personal, sehingga membentuk realitas sosial yang unik bagi setiap pengguna. Proses ini menjadikan politik semakin bersifat psikologis dan emosional, di mana daya tarik visual, narasi emosional, serta simbol-simbol identitas memiliki

pengaruh yang lebih besar daripada argumen rasional atau data faktual.

Berbagai fenomena seperti priming, framing, dan nudge politik menunjukkan bagaimana strategi komunikasi digital memanfaatkan bias kognitif manusia untuk mengarahkan opini tanpa disadari. Praktik seperti yang terjadi dalam skandal Cambridge Analytica memperlihatkan bahwa data perilaku dapat digunakan untuk memanipulasi pilihan politik secara sistematis. Dalam konteks inilah, politik digital menjadi ruang yang kompleks: di satu sisi menawarkan peluang besar untuk partisipasi, transparansi, dan mobilisasi sosial; namun di sisi lain, membuka celah bagi eksploitasi psikologis dan manipulasi emosional yang dapat melemahkan kesadaran kritis masyarakat. Fenomena disinformasi, hoaks, dan populisme digital yang mengandalkan narasi “anti-elite” menjadi contoh nyata bagaimana media sosial dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik melalui strategi yang memanfaatkan ketakutan, kemarahan, atau rasa ketidakadilan.

Lebih jauh, media sosial juga menciptakan ruang komunikasi yang semakin terfragmentasi. Melalui fenomena echo chamber dan group polarization, masyarakat cenderung hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sependapat, memperkuat keyakinan dan identitas kelompoknya masing-masing. Pola ini diperkuat oleh algorithmic bias, di mana platform digital menampilkan konten yang dianggap relevan

dengan preferensi pengguna, namun justru mempersempit wawasan politik dan menghambat dialog lintas pandangan. Akibatnya, ruang publik deliberatif—yang idealnya menjadi arena pertukaran ide dan argumentasi rasional—berubah menjadi arena konflik emosional dan identitas. Fenomena ini sangat tampak dalam konteks Indonesia, seperti dalam polarisasi politik antara pendukung 01 dan 02, radikalisasi berbasis agama di grup WhatsApp, serta maraknya narasi konspiratif menjelang pemilu. Semua ini menandakan bahwa demokrasi digital menghadapi tantangan serius dalam menjaga kohesi sosial dan rasionalitas publik.

Dalam aspek psikologis, media sosial memperkuat dominasi emosi dalam pembentukan opini politik. Melalui visual dominance, masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh gambar dan video daripada argumen yang logis. Efek availability heuristic (Kahneman, 2011) membuat individu cenderung mempercayai informasi yang sering muncul di linimasa mereka, tanpa memverifikasi kebenarannya. Sementara itu, affective polarization memperdalam jarak emosional antar kelompok, menjadikan lawan politik bukan lagi sekadar pihak yang berbeda pandangan, tetapi dianggap sebagai ancaman terhadap identitas dan nilai-nilai pribadi. Kondisi ini menyebabkan politik semakin kehilangan substansi deliberatifnya dan berubah menjadi kompetisi simbolik yang sarat dengan emosi, sentimen, dan persepsi.

Dengan demikian, politik di era digital tidak bisa lagi dipahami hanya dari perspektif institusional atau ideologis, melainkan juga dari sisi psikologis dan kultural. Demokrasi kini berada di persimpangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan literasi digital yang memungkinkan masyarakat memahami cara kerja algoritma, bias informasi, dan taktik manipulatif di ruang daring. Selain itu, literasi emosional politik menjadi kunci penting untuk membantu individu mengenali, mengendalikan, dan merefleksikan emosi mereka dalam proses politik. Hanya dengan membangun kesadaran kritis dan empati sosial, masyarakat dapat mengembalikan fungsi media sosial sebagai ruang dialog yang sehat dan demokratis. Kesimpulannya, masa depan politik digital bergantung pada kemampuan kita untuk menyeimbangkan kekuatan teknologi dengan kedewasaan psikologis, etika publik, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sejati.

Kuis Reflektif

Pilihan Ganda

1. Apa itu echo chamber dalam konteks media sosial?
 - a. Saluran berita online
 - b. Diskusi terbuka lintas kelompok
 - c. Lingkungan tertutup dengan pandangan serupa
 - d. Kampanye politik nasional
2. Teori yang menjelaskan bagaimana orang terpengaruh oleh cara penyajian berita disebut:
 - a. Priming
 - b. Framing
 - c. Anchoring
 - d. Labeling

Pertanyaan Reflektif

1. Bagaimana media sosial mengubah cara Anda memahami politik?
2. Apakah algoritma membuat Anda lebih terbuka atau lebih tertutup terhadap pandangan politik yang berbeda?
3. Apakah kita masih punya ruang dialog politik sehat di era digital?

BAB IX

PSIKOLOGI POLITIK GLOBAL

Psikologi politik tidak lagi dapat dipahami hanya dalam kerangka batas-batas nasional, melainkan harus dipandang sebagai disiplin yang beroperasi dalam ranah global, antarbangsa, dan lintas budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui globalisasi, arus informasi, serta mobilitas manusia dan ide, pemahaman mengenai bagaimana individu maupun kelompok berpikir, merasakan, dan bertindak dalam konteks politik internasional menjadi semakin penting. Proses pengambilan keputusan politik, pembentukan opini publik, serta persepsi terhadap kekuasaan dan keadilan kini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lintas budaya dan interaksi antarnegara.

Psikologi politik global mempelajari bagaimana nilai-nilai budaya, identitas nasional, dan pengalaman sejarah kolektif membentuk perilaku politik suatu masyarakat serta memengaruhi hubungan antarbangsa. Melalui pendekatan ini, para peneliti berupaya memahami dinamika konflik internasional, diplomasi, serta upaya resolusi damai dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis yang mendasarinya—seperti stereotip, prasangka, empati, dan persepsi terhadap “yang lain.” Dengan demikian, studi psikologi

politik lintas budaya tidak hanya berperan dalam menjelaskan perilaku politik di tingkat global, tetapi juga menawarkan kontribusi penting bagi pembangunan kerja sama internasional, penguatan perdamaian dunia, dan pembentukan tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

A. Perbedaan Psikologi Politik di Berbagai Negara

Psikologi politik berkembang secara berbeda di setiap negara karena dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, sistem politik, nilai budaya, serta struktur relasi antara negara dan warga negaranya. Perspektif perbandingan menjadi penting untuk memahami bagaimana konteks sosial dan politik suatu bangsa membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak masyarakatnya dalam ranah politik. Faktor-faktor seperti pengalaman kolonialisme, ideologi negara, sistem pendidikan, serta norma sosial dan agama turut menentukan bagaimana konsep kekuasaan, kepemimpinan, dan partisipasi politik dimaknai di berbagai tempat. Dengan demikian, studi perbandingan dalam psikologi politik membantu mengungkap dinamika yang unik dari setiap negara sekaligus memperkaya pemahaman global tentang perilaku politik manusia.

Negara	Fokus Psikologi Politik	Karakteristik Khusus
AS	Individualisme, otoritarianisme, voting behavior	Dominasi teori kepribadian politik (Altemeyer, 1981)
Rusia	Kepatuhan, identitas nasional, psikologi elite	Politik otoriter dan simbolisme negara kuat
Indonesia	Agama, identitas etnik, patron-klien	Perpaduan antara tradisionalisme & demokrasi prosedural
Jerman	Trauma sejarah, memori kolektif, sikap anti-ekstremisme	Fokus pada pendidikan anti-fasis
Cina	Kolektivisme, kontrol sosial, loyalitas kepada negara	Peran besar negara dalam membentuk opini dan sikap

Di Amerika Serikat, misalnya, psikologi politik banyak berfokus pada isu-isu seperti individualisme, otoritarianisme, dan perilaku pemilih (voting behavior). Tradisi penelitian di negara ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan psikologi kepribadian dan

eksperimen sosial, sebagaimana terlihat dalam karya-karya seperti teori otoritarianisme oleh Bob Altemeyer (1981). Orientasi terhadap kebebasan individu dan kompetisi politik membuat studi-studi di AS sering menyoroti hubungan antara karakter pribadi dan pilihan politik seseorang.

Sebaliknya, di Rusia, psikologi politik lebih banyak menyoroti aspek kepatuhan terhadap otoritas, identitas nasional, dan psikologi elite penguasa. Latar belakang sejarah otoritarianisme dan simbolisme negara kuat membentuk pola pikir kolektif yang menekankan kesetiaan terhadap pemimpin serta pentingnya stabilitas politik. Identitas nasional sering kali dikonstruksi melalui narasi kejayaan dan ketahanan terhadap ancaman luar, sehingga aspek emosional dan simbolik memainkan peran penting dalam perilaku politik masyarakat Rusia.

Di Indonesia, psikologi politik berkembang dengan warna yang khas karena dipengaruhi oleh keragaman etnik, agama, dan struktur sosial patron-klien yang masih kuat. Kombinasi antara nilai-nilai tradisional, spiritualitas, dan demokrasi prosedural menjadikan politik Indonesia sebagai arena di mana rasionalitas modern dan nilai-nilai budaya lokal saling berinteraksi. Kajian psikologi politik di Indonesia sering menyoroti peran agama dalam pembentukan identitas politik, loyalitas terhadap figur karismatik, serta dinamika perilaku massa dalam konteks demokrasi yang sedang tumbuh.

Sementara itu, Jerman memiliki fokus yang unik pada aspek trauma sejarah dan memori kolektif. Pengalaman masa lalu, terutama tragedi Nazi dan Perang Dunia II, membentuk kesadaran politik yang kuat terhadap bahaya ekstremisme dan otoritarianisme. Karena itu, pendidikan politik dan nilai-nilai demokratis di Jerman menekankan pentingnya refleksi moral dan tanggung jawab sosial untuk mencegah kembalinya ideologi fasis.

Di sisi lain, Cina menampilkan karakteristik psikologi politik yang berakar pada nilai-nilai kolektivisme dan loyalitas terhadap negara. Negara memainkan peran dominan dalam membentuk opini publik dan orientasi politik masyarakat melalui kontrol sosial dan sistem pendidikan. Kesetiaan kepada negara dan harmoni sosial dianggap lebih penting daripada kebebasan individu, mencerminkan perpaduan antara tradisi Konfusianisme dan ideologi politik modern.

Dengan melihat variasi ini, jelas bahwa psikologi politik tidak dapat dipahami secara universal tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan historis masing-masing bangsa. Setiap negara memiliki dinamika psikologis tersendiri yang mencerminkan cara masyarakatnya memahami kekuasaan, otoritas, dan identitas kolektif.

B. Konflik Internasional dan Psikologi Antar-Negara

Konflik internasional tidak hanya dapat dijelaskan melalui faktor ekonomi, militer, atau politik, tetapi juga melalui dimensi psikologis yang mendalam. Dalam studi psikologi politik antar-negara, perhatian utama diberikan pada bagaimana persepsi, emosi, dan konstruksi sosial membentuk dinamika konflik antarbangsa. Setiap konflik biasanya disertai dengan pembentukan citra musuh, stereotip nasional, serta justifikasi moral terhadap kekerasan atau kebijakan luar negeri tertentu. Pandangan ini ditegaskan oleh Herbert C. Kelman (1982) melalui *Enemy Image Theory*, yang menjelaskan bahwa negara atau kelompok sering kali menciptakan citra negatif terhadap pihak lawan untuk memperkuat legitimasi tindakan agresif mereka. Citra musuh tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat propaganda, tetapi juga membentuk persepsi kolektif masyarakat tentang siapa yang “benar” dan siapa yang “bersalah.”

Fenomena ini berhubungan erat dengan konsep ingroup vs outgroup bias, yaitu kecenderungan manusia untuk menilai kelompok sendiri (ingroup) secara lebih positif dan kelompok lain (outgroup) secara negatif. Dalam konteks internasional, bias ini dapat memperkuat sentimen nasionalisme, xenofobia, atau bahkan dehumanisasi terhadap pihak lawan. Ketika sebuah negara merasa terancam oleh kekuatan luar, masyarakatnya cenderung memperkuat solidaritas internal dan menolak informasi yang tidak sejalan dengan narasi nasional. Proses ini sering diperkuat melalui media massa,

pendidikan, dan simbol-simbol nasional yang menumbuhkan identitas kolektif berbasis antagonisme terhadap pihak lain.

Selain itu, konsep psychological distance juga memainkan peran penting dalam memahami sikap publik terhadap konflik global. Konflik yang terjadi jauh dari wilayah geografis atau emosional suatu masyarakat sering kali dianggap kurang relevan, sehingga empati terhadap korban menurun. Hal ini menjelaskan mengapa masyarakat di negara-negara yang jauh dari zona perang cenderung menunjukkan sikap acuh atau netral, sementara konflik yang dirasakan dekat secara emosional—misalnya karena kesamaan agama, ideologi, atau sejarah kolonial—dapat menimbulkan reaksi emosional yang lebih kuat. Dengan demikian, jarak psikologis memengaruhi tingkat perhatian, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat terhadap isu internasional.

Aplikasi dari teori-teori ini dapat dilihat pada berbagai konflik dunia kontemporer. Dalam konflik Rusia–Ukraina, misalnya, propaganda memainkan peran sentral dalam membangun citra musuh di kedua belah pihak. Rusia menggunakan narasi tentang “ancaman Barat” dan “penyelamatan etnis Rusia di Donbas” untuk membenarkan tindakannya, sementara Ukraina menekankan perjuangan heroik melawan penjajahan modern. Kedua pihak memanfaatkan media untuk memperkuat identitas nasional dan mengobarkan semangat patriotisme.

Dalam konflik Palestina–Israel, aspek psikologi kolektif bahkan lebih kompleks. Kedua bangsa memiliki trauma sejarah mendalam—Holocaust di pihak Yahudi dan Nakba (pengusiran massal) di pihak Palestina—yang membentuk narasi sejarah saling bersaing. Trauma kolektif ini melahirkan siklus ketakutan dan ketidakpercayaan yang sulit dipecahkan, bahkan melalui negosiasi diplomatik. Dalam konteks ini, psikologi politik membantu menjelaskan mengapa konflik tersebut bertahan lama, bukan semata-mata karena kepentingan politik, tetapi karena luka psikologis yang diwariskan lintas generasi.

Sementara itu, pada masa Perang Dingin, dinamika psikologis terlihat jelas dalam fenomena Red Scare di Amerika Serikat. Ketakutan terhadap ideologi komunis menciptakan iklim paranoia massal, di mana perbedaan ideologis dianggap ancaman eksistensial terhadap kebebasan dan identitas nasional. Pemerintah, media, dan institusi pendidikan berperan aktif dalam memperkuat rasa takut tersebut, menghasilkan bentuk pengendalian sosial berbasis psikologis.

Secara keseluruhan, pendekatan psikologi politik terhadap konflik internasional menyoroti bahwa perang dan permusuhan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kepentingan material, tetapi juga oleh persepsi, emosi, dan identitas kolektif yang dibentuk secara sosial. Dengan memahami dimensi psikologis ini, upaya diplomasi

dan perdamaian dapat diarahkan tidak hanya pada penyelesaian politik, tetapi juga pada rekonsiliasi emosi dan persepsi antarbangsa—sebuah langkah penting menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan.

C. Pengaruh Budaya dalam Membentuk Perspektif Politik Global

Budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara masyarakat memahami, merasakan, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam konteks global, psikologi politik lintas budaya menyoroti bagaimana nilai-nilai sosial, norma, dan orientasi budaya memengaruhi persepsi terhadap kekuasaan, kepemimpinan, dan legitimasi politik. Setiap budaya mengembangkan sistem makna yang membentuk cara warga negara memandang hubungan antara individu dan negara, antara kebebasan dan tanggung jawab sosial, serta antara stabilitas dan perubahan. Oleh karena itu, memahami pengaruh budaya menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa sistem politik yang serupa dapat berfungsi secara berbeda di berbagai negara.

Salah satu teori yang menjelaskan perbedaan ini adalah konsep Individualisme vs Kolektivisme yang diperkenalkan oleh Geert Hofstede (1980). Dalam budaya individualis, seperti di Amerika Serikat, Kanada, atau Swedia, individu dipandang sebagai entitas otonom yang memiliki hak dan kebebasan pribadi yang harus

dihormati. Nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai bagian wajar dari demokrasi yang sehat. Dalam masyarakat semacam ini, politik sering dipandang sebagai arena kompetisi ide dan kepentingan, di mana keberhasilan seseorang diukur melalui kemampuan pribadi dan kontribusi terhadap masyarakat luas.

Sebaliknya, dalam budaya kolektivis, seperti yang ditemukan di Jepang, Korea Selatan, atau banyak negara Asia lainnya, prioritas utama bukanlah kepentingan individu, melainkan harmoni sosial dan keseimbangan dalam kelompok. Struktur sosial yang hierarkis dan berorientasi pada kelompok menciptakan pola politik yang menekankan stabilitas, konsensus, serta penghormatan terhadap otoritas. Dalam konteks ini, perbedaan pendapat atau kritik terhadap pemimpin sering dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan sosial. Nilai-nilai seperti rasa malu (*shame culture*), loyalitas, dan tanggung jawab kolektif sangat memengaruhi perilaku politik masyarakat. Akibatnya, perubahan politik sering terjadi secara bertahap dan disertai mekanisme adaptasi sosial yang kuat.

Dimensi budaya lain yang penting adalah konsep “Tight vs Loose Cultures” yang dikembangkan oleh Michele Gelfand (2011). Budaya yang tergolong “tight” memiliki norma sosial yang ketat dan tingkat toleransi rendah terhadap penyimpangan perilaku. Negara-negara seperti Singapura, Jepang, atau Korea Selatan termasuk dalam

kategori ini. Ketaatan terhadap aturan, keseragaman sosial, dan stabilitas dianggap sangat penting, sehingga sistem politik di negara-negara ini cenderung lebih teratur namun kurang fleksibel terhadap perubahan. Sebaliknya, budaya “loose”, seperti di Belanda, Swedia, atau Amerika Serikat, ditandai oleh toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dan inovasi sosial. Masyarakat dalam budaya longgar biasanya lebih terbuka terhadap gagasan baru dan lebih berani mengkritik kebijakan pemerintah, yang menciptakan dinamika politik yang lebih cair dan partisipatif.

Perbandingan antara politik di Jepang dan Korea dengan politik di Amerika Serikat atau Swedia menggambarkan dengan jelas bagaimana budaya membentuk perilaku politik. Jepang dan Korea memiliki sistem politik yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektivisme dan hierarki sosial, di mana harmoni kelompok dan loyalitas terhadap institusi lebih diutamakan dibanding ekspresi individual. Ketaatan terhadap struktur birokrasi dan penghormatan kepada pemimpin menciptakan politik yang relatif stabil, tetapi terkadang kurang responsif terhadap perubahan mendadak.

Sebaliknya, di Amerika Serikat dan Swedia, budaya individualisme dan norma sosial yang longgar menumbuhkan sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara, bukan

tindakan tidak sopan. Politik dalam konteks ini lebih berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan inovasi kebijakan.

Secara keseluruhan, pengaruh budaya terhadap psikologi politik global menunjukkan bahwa perilaku politik tidak dapat dipahami semata-mata dari struktur institusional atau ekonomi, melainkan juga dari nilai-nilai mendasar yang hidup dalam masyarakat. Dengan memahami dimensi budaya ini, kita dapat lebih bijak dalam menafsirkan perbedaan sistem politik dunia—bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi publik selalu berakar pada pandangan budaya tentang hubungan manusia dengan kekuasaan dan masyarakatnya.

D. Psikologi dalam Hubungan Internasional dan Diplomasi

Psikologi memiliki peran yang semakin menonjol dalam memahami hubungan internasional dan praktik diplomasi modern. Hubungan antarnegara tidak hanya ditentukan oleh kepentingan strategis, ekonomi, atau militer, tetapi juga oleh faktor psikologis yang melekat pada para pengambil keputusan. Para pemimpin politik, diplomat, dan negosiator beroperasi dalam konteks kompleks yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan persepsi timbal balik. Karena itu, psikologi elite politik menjadi aspek penting dalam analisis kebijakan luar negeri—karena keputusan strategis sering kali dipengaruhi oleh

kepribadian, emosi, dan sistem nilai individu yang berada di posisi kekuasaan tertinggi.

Dalam kajian *Political Psychology of Leaders*, perilaku pemimpin dalam arena internasional tidak bisa dipisahkan dari karakter personal, pengalaman hidup, dan cara berpikir mereka tentang dunia. Seorang pemimpin dengan gaya kognitif yang tertutup dan orientasi kekuasaan tinggi, misalnya, cenderung mengadopsi kebijakan luar negeri yang agresif dan defensif. Sebaliknya, pemimpin dengan orientasi empatik dan berpikiran terbuka lebih mungkin menekankan diplomasi, kompromi, dan kerja sama multilateral. Dengan demikian, persepsi, emosi, dan keyakinan pribadi pemimpin berperan besar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara—bahkan lebih besar daripada faktor institusional dalam beberapa kasus.

Salah satu fenomena yang sering muncul dalam diplomasi adalah *attribution bias*, yaitu kecenderungan pemimpin untuk menafsirkan tindakan pihak lain secara keliru karena bias kognitif. Misalnya, tindakan pertahanan diri dari negara lain dapat dipersepsikan sebagai ancaman, atau isyarat kompromi ditafsirkan sebagai kelemahan. Bias semacam ini sering memperburuk ketegangan antarnegara karena memperkuat sikap saling curiga dan menghambat proses negosiasi. Dalam diplomasi, kesalahan persepsi

kecil dapat berakibat besar, bahkan menyebabkan krisis atau kebuntuan diplomatik.

Selain bias persepsi, diplomasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor emosional dan simbolik, khususnya dalam hal menjaga face-saving atau harga diri negara. Dalam banyak kebudayaan, terutama di Asia, konsep “muka” atau kehormatan kolektif merupakan aspek krusial dalam interaksi politik. Negara, layaknya individu, memiliki kebutuhan untuk mempertahankan citra dan martabat di mata komunitas internasional. Oleh karena itu, strategi persuasi dan komunikasi diplomatik sering dirancang sedemikian rupa agar tidak mempermalukan pihak lain, bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Keberhasilan diplomasi sering kali ditentukan bukan oleh substansi kesepakatan semata, tetapi oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan penghormatan simbolik terhadap pihak lawan.

Sebuah contoh konkret dapat dilihat pada negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, yang memperlihatkan dinamika psikologis yang sangat kompleks. Kedua negara membawa beban sejarah panjang berupa saling kecurigaan dan ketidakpercayaan. Bagi Iran, program nuklir adalah simbol kemandirian dan martabat nasional; sementara bagi AS, hal itu dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan global. Proses negosiasi diwarnai strategi face-saving dari kedua belah pihak—di mana masing-masing berusaha

mempertahankan posisi tanpa kehilangan legitimasi di mata publik domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, kompromi politik hanya bisa tercapai ketika kedua pihak merasa bahwa harga diri nasional mereka tetap dihormati.

Sebaliknya, dalam konteks Asia Tenggara, diplomasi ASEAN menampilkan karakter yang sangat berbeda karena berakar pada nilai-nilai kolektivisme dan budaya komunikasi high-context, di mana makna tersirat lebih diutamakan daripada pernyataan langsung. Prinsip utama diplomasi ASEAN adalah musyawarah dan mufakat (consensus-based diplomacy), yang mencerminkan preferensi terhadap harmoni dan penghindaran konflik terbuka. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana nilai budaya dan faktor psikologis—seperti keinginan menjaga hubungan baik dan menghindari rasa malu publik—menjadi dasar penting bagi stabilitas politik regional.

Secara keseluruhan, studi tentang psikologi dalam hubungan internasional dan diplomasi menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan diplomatik tidak hanya bergantung pada kalkulasi rasional atau kekuatan material, tetapi juga pada kemampuan memahami dimensi psikologis interaksi antarnegara. Pemimpin dan diplomat yang mampu mengelola emosi, menghindari bias persepsi, serta menjaga kehormatan simbolik pihak lain memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diplomasi modern menuntut bukan hanya kecerdasan strategis, tetapi

juga kecerdasan emosional dan budaya—sebuah keterampilan halus yang menjadi inti dari politik global abad ke-21.

E. Dampak Psikologi Politik dalam Konflik Global dan Perubahan Sosial

Dalam era globalisasi yang saling terhubung, psikologi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika konflik global dan proses perubahan sosial dunia. Isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, ketimpangan sosial, dan gerakan keadilan lintas negara tidak hanya dapat dipahami dari sudut pandang ekonomi atau politik semata, tetapi juga melalui lensa psikologi yang menyoroti emosi, persepsi, dan nilai-nilai moral kolektif manusia. Dunia modern tidak lagi terpisah oleh batas-batas negara secara kaku, melainkan terhubung oleh arus informasi, solidaritas digital, dan kesadaran moral yang melintasi budaya serta generasi.

Salah satu contoh paling nyata dari peran psikologi politik dalam isu global adalah dalam konteks perubahan iklim. Respons masyarakat terhadap krisis iklim sangat dipengaruhi oleh persepsi ancaman, kepercayaan terhadap sains, dan efikasi kolektif—yaitu keyakinan bahwa tindakan bersama dapat membawa perubahan nyata. Banyak individu memahami secara rasional bahwa perubahan iklim berbahaya, tetapi emosi seperti ketakutan, rasa tidak berdaya, atau kelelahan moral (*climate fatigue*) sering menghambat tindakan nyata.

Di sisi lain, muncul pula emosi positif seperti harapan dan rasa tanggung jawab global yang mendorong gerakan aktivisme lingkungan. Dengan demikian, dimensi psikologis berperan penting dalam menentukan sejauh mana kesadaran ekologis dapat berubah menjadi perilaku politik kolektif yang konkret.

Dalam isu migrasi dan xenofobia, psikologi sosial menjelaskan bahwa reaksi terhadap pendatang atau “orang asing” sering kali berakar pada mekanisme ingroup–outgroup dan persepsi ancaman terhadap identitas budaya atau ekonomi. Ketakutan terhadap perbedaan dapat memicu lahirnya sentimen proteksionis dan kebijakan imigrasi yang eksklusif. Narasi politik yang mengeksploitasi ketakutan ini sering dimanfaatkan oleh populisme kanan di berbagai negara untuk memperkuat dukungan politik melalui retorika anti-imigran. Di sisi lain, ketika empati dan rasa kemanusiaan dikembangkan melalui media, pendidikan, dan pengalaman lintas budaya, masyarakat dapat mengubah ketakutan menjadi solidaritas global. Dengan demikian, persepsi psikologis terhadap “yang lain” memiliki konsekuensi langsung terhadap kebijakan dan stabilitas sosial suatu negara.

Gerakan sosial lintas negara seperti Black Lives Matter dan Fridays for Future menjadi bukti konkret kekuatan psikologi politik dalam menciptakan mobilisasi global berbasis emosi moral. Gerakan-gerakan ini tidak hanya digerakkan oleh isu struktural seperti rasisme

atau krisis lingkungan, tetapi juga oleh energi psikologis yang kuat berupa moral outrage (kemarahan moral), rasa ketidakadilan, dan solidaritas digital yang melampaui batas geografis. Platform media sosial berfungsi sebagai ruang resonansi emosional yang mempercepat penyebaran kesadaran, menghubungkan jutaan individu dalam perjuangan moral bersama. Fenomena ini menunjukkan bagaimana emosi kolektif dapat menjadi kekuatan politik global yang mendorong perubahan sosial nyata.

Selain aspek konflik dan perlawanan, muncul pula dimensi psikologi positif dalam konteks globalisasi. Nilai-nilai seperti harapan, empati global, dan rasa tanggung jawab sosial kini semakin menonjol, terutama di kalangan generasi Z, yang tumbuh dalam dunia digital dengan kesadaran multikultural yang tinggi. Generasi ini menunjukkan kecenderungan untuk melihat isu-isu global—seperti keadilan iklim, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender—sebagai tanggung jawab moral bersama umat manusia. Dari perspektif psikologi positif, mereka berperan sebagai agen perubahan sosial yang berorientasi pada kolaborasi, bukan konfrontasi, serta pada inovasi sosial yang didorong oleh rasa empati dan optimisme terhadap masa depan.

Dengan demikian, dampak psikologi politik dalam konflik global dan perubahan sosial menunjukkan bahwa dunia modern tidak hanya digerakkan oleh kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh

dinamika psikologis yang membentuk kesadaran kolektif manusia. Perubahan besar di abad ke-21 menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana emosi, nilai, dan identitas global berkembang di tengah keterhubungan digital dan krisis planet yang terus meningkat. Dalam konteks ini, psikologi politik berfungsi bukan hanya sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai fondasi etis untuk membangun dunia yang lebih empatik, adil, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa psikologi politik kontemporer merupakan bidang ilmu yang berperan penting dalam menjembatani pemahaman antara perilaku manusia dan dinamika kekuasaan di berbagai level—mulai dari lokal hingga global. Politik tidak semata-mata lahir dari kalkulasi rasional atau struktur institusional, melainkan juga dari dorongan psikologis yang bersumber pada persepsi, emosi, keyakinan, serta sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan psikologi politik, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor seperti identitas sosial, stereotip, kebutuhan akan keamanan, dan bias kognitif membentuk cara individu dan kelompok merespons isu-isu politik. Pemahaman ini menjadi semakin relevan di era globalisasi, di mana batas-batas negara dan budaya semakin kabur, serta arus informasi membentuk persepsi politik secara cepat dan masif.

Setiap negara memiliki karakter psikologi politik yang unik, dipengaruhi oleh sejarah, sistem pemerintahan, dan nilai budaya yang mendasarinya. Misalnya, negara-negara dengan tradisi individualistik seperti Amerika Serikat atau Swedia menekankan kebebasan individu, kritik terhadap pemerintah, dan partisipasi politik aktif, sementara negara-negara dengan budaya kolektivistik seperti Jepang, Korea, atau Indonesia cenderung menekankan harmoni sosial, hierarki, dan loyalitas terhadap kelompok atau pemimpin. Keragaman ini menunjukkan bahwa perilaku politik tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan struktur sosial tempatnya berkembang. Dengan demikian, pendekatan psikologi lintas budaya membantu kita memahami mengapa nilai-nilai demokrasi, otoritarianisme, atau partisipasi politik memiliki manifestasi yang berbeda di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks hubungan internasional, psikologi politik antarnegara juga berperan penting dalam menjelaskan bagaimana persepsi dan emosi kolektif dapat membentuk pola konflik dan kerja sama global. Teori seperti *Enemy Image Theory* dan *ingroup-outgroup bias* menunjukkan bahwa konflik antarnegara sering berakar dari konstruksi sosial tentang “musuh” dan “kami” versus “mereka.” Bias persepsi dan kebutuhan untuk menjaga harga diri nasional kerap memperumit diplomasi, sementara kemampuan untuk membangun empati dan pengakuan timbal balik menjadi kunci keberhasilan negosiasi damai. Kasus seperti konflik Rusia–Ukraina, negosiasi

nuklir Iran–AS, maupun diplomasi ASEAN memperlihatkan bahwa di balik strategi politik, terdapat dimensi psikologis yang menentukan arah interaksi internasional. Diplomasi yang efektif tidak hanya menuntut kecerdasan strategis, tetapi juga kecerdasan emosional dan budaya, agar komunikasi antarbangsa dapat berjalan tanpa merusak kehormatan dan stabilitas hubungan.

Selain itu, psikologi politik berperan besar dalam memahami isu-isu global dan perubahan sosial kontemporer. Fenomena seperti perubahan iklim, migrasi, xenofobia, dan gerakan sosial lintas negara memperlihatkan bahwa emosi kolektif seperti ketakutan, kemarahan moral (*moral outrage*), dan empati global dapat menjadi pendorong atau penghambat transformasi sosial. Gerakan seperti Black Lives Matter dan Fridays for Future menunjukkan bahwa kesadaran moral dan solidaritas digital mampu menciptakan mobilisasi global yang melampaui batas-batas geografis dan ideologis. Dalam hal ini, psikologi politik membantu menjelaskan bagaimana emosi dan persepsi individu dapat terakumulasi menjadi kekuatan sosial yang berpotensi mengubah struktur kekuasaan di tingkat dunia.

Pada saat yang sama, muncul pula dimensi psikologi positif dalam konteks globalisasi yang menekankan pentingnya harapan, empati, dan optimisme kolektif. Generasi muda, terutama generasi Z, menjadi contoh nyata dari agen perubahan sosial yang mengedepankan nilai kemanusiaan universal, keadilan lingkungan,

dan solidaritas lintas budaya. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa politik global masa depan tidak hanya akan digerakkan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran psikologis baru yang berlandaskan empati dan rasa tanggung jawab bersama terhadap masa depan planet ini.

Secara keseluruhan, psikologi politik kontemporer menawarkan lensa yang komprehensif untuk memahami interaksi antara pikiran manusia dan struktur kekuasaan dalam dunia yang terus berubah. Ia mengajarkan bahwa kebijakan, konflik, maupun gerakan sosial selalu memiliki akar psikologis yang dalam—berasal dari bagaimana manusia memaknai identitas, ancaman, dan harapan mereka. Oleh karena itu, pengintegrasian perspektif psikologi dalam studi politik tidak hanya memperkaya analisis ilmiah, tetapi juga membantu menciptakan praktik politik yang lebih beretika, empatik, dan berorientasi pada perdamaian. Dalam menghadapi tantangan global abad ke-21, seperti krisis iklim, disinformasi, dan ketimpangan sosial, pendekatan psikologi politik dapat menjadi fondasi penting bagi terbentuknya tatanan dunia yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

BAB X

REFLEKSI MASA DEPAN PSIKOLOGI POLITIK

Perkembangan psikologi politik sebagai bidang ilmu menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan relevan dalam memahami perilaku manusia dalam konteks kekuasaan, kebijakan, dan perubahan sosial. Di tengah arus globalisasi, disrupsi teknologi, serta meningkatnya polarisasi ideologis, psikologi politik menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas cakrawala analisisnya. Bidang ini tidak lagi sekadar berfokus pada dinamika perilaku pemilih atau persepsi terhadap pemimpin, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana emosi kolektif, identitas sosial, dan narasi politik membentuk arah masa depan masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, refleksi terhadap masa depan psikologi politik menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana teori dan praktiknya dapat menjawab isu-isu baru. Perubahan iklim, migrasi global, populisme, serta perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara individu dan kelompok memandang kekuasaan serta berpartisipasi dalam proses politik. Tantangan ini menuntut psikologi politik untuk beradaptasi dengan pendekatan lintas disiplin,

mengintegrasikan ilmu komunikasi, sosiologi, dan teknologi agar mampu memetakan kompleksitas perilaku politik di era digital dan global.

Selain itu, masa depan psikologi politik juga menuntut kepekaan etis dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh informasi dan identitas, psikolog politik perlu berperan bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai agen yang mampu memfasilitasi dialog, empati, dan rekonsiliasi sosial. Refleksi terhadap arah dan tujuan disiplin ini harus diarahkan pada upaya memperkuat kohesi sosial, meningkatkan literasi politik masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap manipulasi psikologis dalam ruang publik.

Dengan demikian, refleksi masa depan psikologi politik bukan sekadar membicarakan tren baru dalam penelitian, melainkan juga mempertanyakan peran moral dan sosial ilmu ini di tengah perubahan dunia. Psikologi politik di masa depan diharapkan mampu menjadi wadah bagi pemikiran yang kritis, humanistik, dan transformatif — tidak hanya untuk memahami politik, tetapi juga untuk membentuk masa depan politik yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

A. Psikologi Politik sebagai Disiplin Interdisipliner

Psikologi politik merupakan salah satu cabang ilmu yang secara khas bersifat interdisipliner, karena menggabungkan berbagai perspektif untuk memahami keterkaitan antara dinamika kejiwaan individu dan struktur kekuasaan sosial yang mengatur kehidupan bersama. Disiplin ini tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari persilangan antara psikologi sosial, psikologi kognitif, ilmu politik, sosiologi, dan kajian budaya. Dari sisi psikologi sosial, psikologi politik menyoroti bagaimana persepsi sosial, konformitas, dan identitas kelompok memengaruhi cara individu berinteraksi dalam arena politik. Misalnya, bagaimana seseorang menyesuaikan pandangannya terhadap mayoritas atau kelompok tertentu, serta bagaimana rasa memiliki terhadap identitas sosial tertentu (seperti etnis, agama, atau ideologi) dapat menentukan orientasi politik dan perilaku memilih.

Dari perspektif psikologi kognitif, psikologi politik membantu menjelaskan proses pengambilan keputusan politik serta bias-bias kognitif yang memengaruhi penilaian terhadap kebijakan dan pemimpin. Pemilih tidak selalu bertindak secara rasional; keputusan mereka sering kali dipengaruhi oleh emosi, stereotip, atau efek framing dari media. Pemahaman tentang bias seperti confirmation bias, ingroup favoritism, atau cognitive dissonance memberikan wawasan mengapa individu dapat mempertahankan pandangan politik tertentu meskipun bertentangan dengan fakta yang objektif.

Dengan demikian, pendekatan kognitif memperkaya psikologi politik dengan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana proses berpikir dan persepsi membentuk perilaku politik.

Sementara itu, dari ilmu politik, psikologi politik meminjam konsep-konsep penting seperti sistem kekuasaan, legitimasi, partisipasi politik, dan demokrasi untuk memahami struktur tempat perilaku politik terjadi. Dengan memadukan dimensi psikologis dan struktural, disiplin ini tidak hanya berfokus pada individu sebagai aktor politik, tetapi juga pada sistem yang membentuk peluang, batasan, dan dinamika kekuasaan di masyarakat. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa partisipasi politik tidak hanya bergantung pada niat atau sikap individu, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan institusional yang lebih luas.

Selain itu, sosiologi dan kajian budaya memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai kolektif, identitas nasional, dan konflik antarbudaya berperan dalam membentuk orientasi politik masyarakat. Melalui perspektif ini, psikologi politik mampu memahami fenomena seperti nasionalisme, xenofobia, atau radikalisme dari sudut pandang psikologis dan sosial sekaligus. Nilai-nilai budaya menentukan cara individu menafsirkan konsep keadilan, kebebasan, dan kekuasaan, sementara struktur sosial memengaruhi bagaimana identitas kolektif digunakan untuk memperkuat solidaritas atau, sebaliknya, menimbulkan perpecahan.

Dengan demikian, psikologi politik sebagai disiplin interdisipliner tidak hanya menjembatani ilmu tentang individu dan masyarakat, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang mengapa orang memilih, bagaimana pemimpin mendapatkan karisma dan legitimasi, serta mengapa konflik sosial dan politik dapat berkembang secara psikologis. Pendekatan yang integratif ini menjadikan psikologi politik relevan untuk menjawab tantangan dunia modern, di mana perilaku politik tidak lagi dapat dipahami hanya dari sisi rasionalitas, tetapi juga dari emosi, identitas, dan dinamika sosial yang melingkupinya.

B. Tantangan Kontemporer dalam Psikologi Politik

Dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh percepatan teknologi dan perubahan sosial yang masif, psikologi politik menghadapi sejumlah tantangan kontemporer yang menuntut pendekatan baru dan refleksi mendalam. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya fenomena disinformasi dan manipulasi teknologi di era post-truth, di mana kebenaran objektif sering kali kalah oleh kekuatan narasi emosional. Media sosial, algoritma, dan kecerdasan buatan (AI) kini memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik, memengaruhi opini politik, dan bahkan menentukan hasil pemilihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku politik tidak hanya dibentuk oleh ideologi, tetapi juga oleh arsitektur informasi

yang dikendalikan oleh kekuatan ekonomi dan teknologi. Bagi psikologi politik, ini menimbulkan pertanyaan etis dan ilmiah yang mendesak: bagaimana memahami dan melawan pengaruh psikologis dari echo chamber, filter bubble, serta deepfake yang mengaburkan batas antara realitas dan rekayasa?

Selain itu, dunia saat ini menghadapi peningkatan polarisasi dan krisis kepercayaan yang mengancam kohesi sosial. Politik identitas dan afektif semakin memperdalam jurang emosional antara kelompok yang berbeda, membuat diskursus publik terjebak dalam kebencian dan stereotip. Dalam situasi ini, perbedaan pandangan politik tidak lagi dilihat sebagai keragaman ide, tetapi sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok lain. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana emosi — seperti rasa takut, marah, atau bangga terhadap identitas kelompok — dapat menjadi bahan bakar konflik sosial yang sulit diredam. Psikologi politik dihadapkan pada tugas berat untuk meneliti mekanisme psikologis di balik polarisasi afektif ini serta mencari cara untuk membangun kembali kepercayaan sosial dan politik di tengah masyarakat yang terpecah.

Lebih jauh, globalisasi dan trauma kolektif akibat perang, pandemi, serta krisis iklim menambah lapisan kompleksitas baru dalam dinamika politik global. Masyarakat di berbagai belahan dunia kini terhubung melalui pengalaman bersama yang penuh ketidakpastian dan penderitaan, namun solidaritas lintas negara sering

kali diuji oleh kepentingan nasionalisme dan egoisme politik. Dalam kondisi seperti ini, psikologi politik perlu memahami bagaimana trauma kolektif memengaruhi sikap terhadap kebijakan internasional, penerimaan terhadap migran, serta munculnya sentimen proteksionisme. Refleksi terhadap isu ini penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih empatik dalam diplomasi dan kebijakan global yang berorientasi pada kesejahteraan manusia.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan dan representasi politik. Dalam banyak sistem politik, suara kelompok minoritas, perempuan, dan generasi muda masih sering terpinggirkan. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan publik. Psikologi politik dapat berperan penting dalam mengkaji faktor psikologis yang menghambat partisipasi politik kelompok tersebut, seperti rasa tidak berdaya, stereotip gender, atau ketidakpercayaan terhadap institusi. Upaya untuk membangun partisipasi politik yang inklusif memerlukan pemahaman mendalam tentang motivasi, identitas, dan persepsi keadilan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa psikologi politik masa kini dan masa depan tidak lagi dapat beroperasi dalam ruang teoritis yang sempit. Ia harus menjadi disiplin yang adaptif, kritis, dan berorientasi solusi dalam menghadapi realitas sosial-politik yang terus berubah. Dengan memahami dimensi

psikologis dari disinformasi, polarisasi, trauma, dan ketimpangan, psikologi politik dapat berkontribusi secara signifikan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, empatik, dan demokratis di tengah arus perubahan global.

C. Arah Masa Depan Psikologi Politik

Arah masa depan psikologi politik menunjukkan pergeseran yang semakin luas dan mendalam menuju integrasi antara ilmu perilaku, teknologi, etika, dan konteks sosial global. Salah satu perkembangan yang menonjol adalah munculnya pendekatan neurosains politik, yang berupaya memahami bagaimana otak manusia merespons simbol-simbol politik, ancaman ideologis, serta pengalaman empati terhadap pihak lain. Melalui penggunaan teknologi seperti fMRI atau EEG, para peneliti seperti Westen (2007) menunjukkan bahwa keputusan politik sering kali tidak murni rasional, melainkan melibatkan aktivitas emosional yang kompleks di area otak tertentu. Temuan ini menantang pandangan klasik tentang pemilih rasional dan membuka jalan bagi pemahaman baru tentang bagaimana rasa takut, harapan, atau kebanggaan dapat dimanipulasi dalam komunikasi politik. Dengan demikian, neurosains politik tidak hanya memperkaya teori psikologi politik, tetapi juga menawarkan landasan ilmiah bagi pendidikan politik yang lebih sadar terhadap bias dan emosi manusia.

Selanjutnya, arah penting lainnya adalah berkembangnya psikologi politik digital, yang meneliti dampak algoritma, big data, dan media sosial terhadap pembentukan opini publik serta perilaku politik. Di era digital, individu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen narasi politik melalui interaksi di platform daring. Algoritma media sosial menciptakan ekosistem informasi yang dapat memperkuat bias kognitif dan membentuk echo chamber yang menurunkan kualitas deliberasi publik. Psikologi politik masa depan perlu mempelajari bagaimana struktur digital ini memengaruhi persepsi keadilan, kepercayaan terhadap institusi, dan perilaku politik kolektif. Dengan memahami dinamika psikologis di balik konsumsi informasi digital, para peneliti dapat membantu merancang intervensi yang mendorong literasi politik dan ketahanan psikologis masyarakat terhadap manipulasi informasi.

Selain dimensi teknologi, masa depan psikologi politik juga mengarah pada penguatan aspek kesadaran diri dan empati kewargaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya refleksi pribadi, regulasi emosi, dan kesadaran etis dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain menjadi modal penting bagi terciptanya dialog demokratis. Pendidikan kewargaan yang berbasis pada kesadaran diri — di mana individu diajak mengenali bias, prasangka, serta nilai-nilai yang membentuk pandangan politik mereka — dapat memperkuat daya

tahan sosial terhadap konflik ideologis. Psikologi politik yang berorientasi pada mindfulness dan empati membuka peluang bagi pembentukan budaya politik yang lebih inklusif, humanistik, dan berkelanjutan.

Terakhir, arah masa depan yang semakin mendapat perhatian adalah upaya dekolonisasi dalam psikologi politik, yaitu integrasi perspektif dan pengalaman dari dunia non-Barat atau Global South ke dalam teori-teori besar yang selama ini didominasi oleh pandangan Barat. Pendekatan dekolonial menekankan pentingnya memahami realitas politik lokal, nilai-nilai budaya, dan struktur kekuasaan yang khas di setiap konteks sosial. Hal ini penting karena pengalaman politik masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin sering kali berbeda secara historis dan kultural dari model-model yang dikembangkan di dunia Barat. Dengan mengakomodasi keragaman epistemologis ini, psikologi politik dapat berkembang menjadi disiplin yang lebih adil, relevan, dan kontekstual sebuah ilmu yang tidak hanya menjelaskan perilaku politik manusia secara universal, tetapi juga menghargai pluralitas pengalaman dan makna politik di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, arah masa depan psikologi politik bergerak menuju integrasi antara ilmu, teknologi, empati, dan keadilan epistemologis. Disiplin ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis politik, tetapi juga sebagai sarana refleksi moral dan sosial untuk membangun masa depan politik yang lebih sadar, adil, dan manusiawi.

Pesan Penutup

"Di balik suara, sikap, dan pilihan politik kita, terdapat keinginan untuk didengar, dikenali, dan dihargai."

Kalimat ini menggambarkan esensi terdalam dari psikologi politik — bahwa di balik setiap tindakan politik, baik yang tampak besar seperti gerakan massa maupun yang sederhana seperti mencoblos di bilik suara, tersimpan dimensi kemanusiaan yang mendalam. Psikologi politik tidak sekadar berbicara tentang strategi kekuasaan, persuasi politik, atau dinamika pemilu, tetapi juga tentang harapan, rasa takut, dan pencarian makna dalam kehidupan bersama. Ia membantu kita memahami bahwa politik pada dasarnya adalah cermin dari kondisi psikologis masyarakat: bagaimana individu menafsirkan keadilan, bagaimana kelompok membangun identitasnya, dan bagaimana manusia berjuang untuk mempertahankan martabat di tengah sistem sosial yang sering kali tidak sempurna.

Sebagai disiplin ilmu, psikologi politik juga mengajarkan bahwa setiap keputusan politik adalah refleksi dari proses batin manusia — proses berpikir, merasakan, dan memaknai dunia di sekelilingnya. Dalam konteks ini, mempelajari psikologi politik berarti

belajar memahami diri sendiri sebagai warga yang berperan aktif dalam membentuk realitas sosial. Ilmu ini mendorong kita untuk lebih kritis terhadap kekuasaan, namun juga lebih empatik terhadap sesama. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap konflik dan perbedaan, selalu ada kebutuhan universal akan pengakuan, rasa aman, dan keterhubungan. Oleh karena itu, masa depan psikologi politik bukan hanya tentang teori dan penelitian, tetapi tentang bagaimana pengetahuan ini dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi yang berakar pada empati dan kesadaran moral.

Pada akhirnya, psikologi politik menuntun kita untuk melihat politik bukan sebagai arena pertarungan kepentingan semata, melainkan sebagai ruang dialog kemanusiaan — tempat di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan membayangkan masa depan bersama. Dalam dunia yang terus berubah, penuh ketidakpastian dan kompleksitas, psikologi politik hadir sebagai pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada dominasi, tetapi pada kemampuan untuk memahami dan memanusiakan yang lain. Melalui refleksi ini, kita diajak untuk tidak hanya menjadi pengamat politik, tetapi juga penggerak perubahan yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab terhadap sesama dan masa depan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, C. (2021). Mapping Internet Aesthetics and Youth Political Expression. Oxford Internet Institute.
- Altemeyer, B. (1981). *Right-Wing Authoritarianism*. University of Manitoba Press.
- Ana, F. (2023). Youth Political Engagement in Digital Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
- Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. *Groups, Leadership, and Men*.
- Azar, E. E. (1990). The Management of Protracted Social Conflicts: Theory and Cases. Dartmouth Publishing.
- Banaji, S., & Buckingham, D. (2013). The Civic Web: Youth, Participation and Politics in the Internet Age. MIT Press.
- Bandura, A. (1973). *Aggression: A Social Learning Analysis*. Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.

- Bar-Tal, D. (2007). *Sociopsychological Foundations of Intractable Conflicts*. American Behavioral Scientist.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action*. Cambridge University Press.
- Bernstein, M., et al. (2022). Digital misinformation among youth. *Computers in Human Behavior*.
- Boulianne, S., & Theocharis, Y. (2020). Digital media and youth political engagement. *Journal of Youth Studies*.
- Brady, W. J., Wills, J. A., et al. (2017). Emotion shapes the diffusion of moral content in social networks. *PNAS*.
- Brewer, M. B. (1999). Ingroup Favoritism
- Brewer, M. B. (1999). The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?. *Journal of Social Issues*.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E. (1954). *The Voter Decides*.
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*.
- Chan, M. (2020). Media use and political fatigue among youth. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*.
- Chusnul Mariyah (2004). *Kepemimpinan Perempuan dalam Demokrasi Indonesia*. (Studi UI).

- Clayton, S., & Manning, C. (2018). *Psychology and Climate Change*. Academic Press.
- Collin, P., et al. (2020). Youth, activism, and digital media. *Journal of Youth Studies*.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). *Psychological Assessment*.
- Dalton, R. J., & Klingemann, H.-D. (2007). *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford University Press
- Delli Carpini & Keeter (1996). *What Americans Know about Politics*.
- Deloitte. (2022). Gen Z Shopping and Activism Trends in Asia.
- Deloitte. (2023). Global Gen Z and Millennial Survey.
- Dimock, M., & Wike, R. (2020). How Generations Differ in Their Political Values. Pew Research Center.
- Dollard, J., Doob, L., Miller, N., Mowrer, O., & Sears, R. (1939). *Frustration and Aggression*. Yale University Press.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2003). The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. *The Leadership Quarterly*.
- Edelman Trust Barometer. (2023). Global Trust in Government.
- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*.

- Erikson, E. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton.
- Facione, P. (2015). *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*.
- Fishkin, J. S. (1995). *The Voice of the People: Public Opinion and Democracy*.
- Fiske, S. T., Cuddy, A. J., & Glick, P. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. *Journal of Personality and Social Psychology*.
- French, J. R. P., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In Cartwright, D. (Ed.), *Studies in Social Power*. University of Michigan.
- Freud, S. (1921). *Group Psychology and the Analysis of the Ego*. Hogarth Press.
- Gelfand, M. J. (2011). *Rule Makers, Rule Breakers: How Tight and Loose Cultures Wire Our World*. Scribner.
- Gil de Zúñiga, H., Molyneux, L., & Zheng, P. (2014). Social media, political expression, and participation. *Journal of Communication*.
- Graber, D. A. (1984). *Processing the News: How People Tame the Information Tide*.

- Greenstein, F. I. (2009). *The Paradoxes of American Politics*. Harvard University Press.
- Guess, A., et al. (2020). Digital literacy and misinformation. *PNAS*.
- Gurr, T. R. (1970). *Why Men Rebel*.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1989.
- Haidt, J. (2012). *The Righteous Mind*.
- Ha, L., Perez, L., & Ray, R. (2021). Youth political engagement in social media. *New Media & Society*
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Jakarta: LP3ES, 1981
- Henn, M., & Foard, N. (2014). Social trust and youth political alienation. *Political Studies*.
- Hermann, M. G. (2001). *Leaders, Groups, and Coalitions: Understanding the People and Processes in Foreign Policymaking*. Wiley-Blackwell.
- Hess, D., & McAvoy, P. (2015). *The Political Classroom*.
- Hobbs, W., & Lajevardi, N. (2020). Authenticity and youth trust in politics. *Political Communication*.
- Hobbs, W., & Lajevardi, N. (2020). Authenticity in Modern Political Communication. *Political Communication Journal*.

- Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences*. Sage Publications.
- Inglehart, R. (2018). Cultural Evolution.
- Iyengar, S., & Krupenkin, M. (2018). The strengthening of partisan affect. *Political Psychology*.
- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). *Fear and Loathing Across Party Lines*.
- Janis, I. L. (1972). Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-policy Decisions and Fiascos. Houghton Mifflin.
- Jones, E. E. (1972). The attribution of attitudes. *Theories in Cognitive Social Psychology*.
- Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1994). "The role of stereotyping in political psychology: A review." *Political Psychology*, 23(2), 263-276.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2018). Youth, new media, and political learning. *Political Psychology*.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1974). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kelman, H. C. (1982). *National Identity in Conflict Resolution*. *Psychology of Intergroup Relations*.

- Kelman, H. C. (1999). Transforming the Relationship Between Former Enemies: A Social-Psychological Analysis. In R. Rothstein (Ed.), *After the Peace: Resistance and Reconciliation*. Lynne Rienner.
- Kim, Y. (2021). Youth representation and political trust. *Journal of Politics*.
- KPU. (2024). *Laporan Statistik Pemilihan Pemilu 2024*.
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. Verso.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace*
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science*.
- Lewin, K. (1947). *Frontiers in Group Dynamics*. Human Relations.
- LIPI. (2023). *Survei Persepsi Politik Generasi Z Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Machiavelli, Niccolò. *The Prince*. Florence, 1532.
- Mandela, Nelson. *Long Walk to Freedom*. London: Little, Brown and Company, 1994.

- Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). *Affective Intelligence and Political Judgment*.
- Marcus, G. E. (2000). *The Sentimental Citizen: Emotion in Democratic Politics*. Penn State Press.
- McCauley, C., & Moskaleiko, S. (2011). *Friction: How Radicalization Happens to Them and Us*. Oxford University Press.
- McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*.
- Milgram, S. (1974). *Obedience to Authority: An Experimental View*. Harper & Row.
- Miller, K., & Twenge, J. (2020). Generational changes in social and political values. *Journal of Youth Studies*
- Moffitt, B. (2018). *The Rise of Identity-Based Youth Politics*. Oxford University Press.
- Moffitt, B., & Tormey, S. (2020). Youth identity and activism. *Political Studies Review*.
- Moffitt, B., & Tormey, S. (2020). Youth political identities in digital spaces. *Political Studies Review*.
- Nielsen, R., & Vaccari, C. (2021). Digital campaign engagement among youth. *New Media & Society*.

- Niemi, R. G., & Junn, J. (1998). Civic Education: What Makes Students Learn?
- Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion. *Journal of Communication*.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power*. PublicAffairs.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Pew Research Center. (2019). *Defining Generations: Where Millennials End and Gen Z Begins*.
- Pew Research Center. (2022). *Teens, Social Media, and Politics*.
- Polletta, F., & Jasper, J. M. (2001). Collective Identity and Social Movements. *Annual Review of Sociology*.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*.
- Reicher, S., & Haslam, S. A. (2016). *The politics of hope: Psychology in the age of mass mobilization*. *The Psychologist*.
- Rothschild, Z. K., & Keefer, L. A. (2017). A cleansing fire: Moral outrage alleviates guilt and buffers threats to moral identity. *Motivation and Emotion*.

- Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values. *Advances in Experimental Social Psychology*.
- Sherif, M. (1961). *Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment*. University of Oklahoma Book Exchange.
- Simon, H. A. (1985). Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science. *American Political Science Review*.
- Siregar, W. Z. (2010). Pendidikan Politik dan Demokratisasi. Gramedia.
- Skitka, L. J., & Mullen, E. (2005). *Moral conviction and political engagement*. Political Psychology.
- Sloam, J., & Henn, M. (2019). *Youthquake: Young People's Political Participation*. Palgrave Macmillan.
- Social Media Lab. (2022). Youth, Trust, and Political Influence in the Digital Age.
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *Cyberpsychology & Behavior*.
- Sunstein, C. R. (2001). *Echo Chambers and the Law*.
- Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press

Sunstein, C. R. (2001). *The Paradox of Choice: Why More Is Less*. HarperCollins.

Sunstein, C. R. (2009). *Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide*

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Brooks/Cole.

Tajfel, H. (1979). Intergroup behavior and social identity. *Social Psychology of Intergroup Relations*.

Tajfel, H. (1979). *Social Identity Theory*

Tajfel, H. (1982). *Social Identity and Intergroup Relations*. Cambridge University Press.

Tesser, A. (2000). *Psychological Approaches to Political Behavior*. McGraw-Hill.

Thaler & Sunstein (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*.

Theocharis, Y. (2015). The political participation of youth in the digital era. *Information, Communication & Society*.

- Theocharis, Y., & Van Deth, J. (2018). Political participation in a changing world. Routledge
- Torney-Purta, J., et al. (2015). Civic education and youth engagement. *Journal of Adolescence*.
- Tufekci, Z. (2015). *Twitter and Tear Gas*. Yale University Press.
- Tufekci, Z. (2015). *Algorithmic Harms Beyond Facebook and Google: Emergent Challenges of Computational Agency*. *Colorado Technology Law Journal*.
- Twenge, J. (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious*. New York: Atria.
- Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Carter, N. (2019). Age, Generations, and Political Orientation. *Journal of Social Psychology*.
- UNICEF Indonesia. (2022). Youth Digital Participation & Well-Being Study. Van Deth, J. (2014). A conceptual map of political participation. *Acta Politica*.
- Van Reybrouck, D. (2016). *Against Elections*.
- Vecchione, M., & Caprara, G. V. (2009). Personality determinants of political participation. *European Journal of Personality*.
- Vraga, E., & Bode, L. (2021). Using Social Media to Engage Youth in Politics. *Political Communication*.

- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder. Council of Europe.
- Winter, D. G. (2011). *The Power Motive*. Free Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Westen, D. (2007). *The Political Brain*. PublicAffairs.
- Yusoff, N. (2022). *Youth Political Preferences in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: SEAS Institute.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

GLOSARIUM

Istilah	Definisi Singkat
Framing	Cara menyajikan isu agar memengaruhi cara publik menafsirkannya.
Priming	Pengaruh informasi sebelumnya terhadap respons politik berikutnya.
Echo Chamber	Lingkungan media sosial yang memperkuat pandangan yang sama.
Political Efficacy	Keyakinan individu bahwa ia mampu memengaruhi proses politik.
Authoritarianism	Sikap yang mengutamakan ketaatan pada otoritas dan struktur hierarkis.
Ingroup Bias	Kecenderungan menyukai kelompok sendiri dan merendahkan kelompok lain.
Affective Polarization	Permusuhan emosional terhadap kelompok politik lawan.

Istilah	Definisi Singkat
Nudge Politik	Strategi psikologis yang mendorong pilihan tanpa paksaan langsung.
Cognitive Dissonance	Ketidaknyamanan mental akibat ketidaksesuaian antara sikap dan tindakan.
Social Identity	Bagian dari jati diri yang berasal dari keanggotaan dalam suatu kelompok sosial.

TENTANG PENULIS

Ricka Comara Dewi M.Psi Psikolog



Ricka Comara Dewi, M.Psi., Psikolog, lahir di Jakarta Timur pada tanggal 3 Oktober 1967. Saat ini, ia telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak yang menjadi sumber inspirasi dan motivasinya dalam menjalani kehidupan pribadi maupun profesional. Dedikasinya terhadap dunia psikologi tumbuh seiring dengan keinginannya untuk

membantu individu, terutama generasi muda, dalam memahami potensi diri dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Perjalanan akademiknya dimulai ketika Ricka menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2011 hingga 2015. Selama masa studinya, ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada bidang psikologi pendidikan dan konseling. Setelah lulus, semangatnya untuk terus berkembang mendorongnya melanjutkan studi ke jenjang Magister Profesi Psikologi di universitas yang sama pada tahun 2017 hingga 2021. Di jenjang ini, Ricka menempuh jalur profesi sebagai Psikolog dengan spesialisasi di bidang penyuluhan pendidikan, memperdalam pemahamannya tentang asesmen psikologis, intervensi, serta strategi bimbingan bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

Kini, Ricka Comara Dewi bekerja sebagai Psikolog di bidang penyuluhan pendidikan, di mana ia aktif memberikan layanan konseling, pelatihan, serta penyuluhan bagi siswa, guru, dan orang tua. Ia percaya bahwa pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi manusia seutuhnya. Dengan pendekatan yang humanis dan empatik, Ricka berupaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung, dan berorientasi pada kesejahteraan psikologis.

Selain berkiprah di dunia profesional, Ricka juga aktif dalam kegiatan organisasi sosial dan politik. Ia terlibat dalam organisasi Pira

Sayap Gerindra, di mana ia menjabat sebagai Koordinator Pendidikan, menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Tidak hanya itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum di organisasi Satria Gerindra, peran yang memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan dan keuangan organisasi dengan tanggung jawab tinggi.

Dr. Tugimin Supriyadi,S.Psi.,MM.,Psikolog



Tugimin Supriyadi lahir di desa kecil lereng Gunung Merapi di Tampir kulon, Musuk - Boyolali. Pria yang memulai karir merangkak dari bawah ini memulai karir sebagai seorang loper koran di Semarang. Di sela-sela loper Koran inilah dirinya menyempatkan diri membaca apa saja yang tersaji di Koran. Berbekal tekun bekerja dan membaca inilah pada ahirnya Tugimin Supriyadi bisa menulis di berbagai Koran dan majalah, baik terbitan daerah maupun Ibu Kota. Karier menulisnya dia ujudkan sebagai wartawan Majalah Candi Zebra sekitar tahun 90-an. Setelah bisa menulis dan tulisannya tersebar di berbagai media, seiring waktu dirinya mendirikan sebuah

Tabloid INFOPlus (sekarang INFOPlus.id), Majalah PesanTred, sekaligus mendirikan CV Liandra Citra Pesona yang bergerak di bidang Penerbit dan percetakan. Pria yang lulus dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang ini, juga mendirikan Biro Konsultasi Psikologi “Liandra Citra Pesona” yang sampai dengan saat ini dikelola oleh sang istri Effy Anggraini,S.Psi.

Dr. Tugimin Supriyadi, kemudian menggabungkan usaha bersama istrinya dengan mendirikan PT. Psikodinamika yang bergerak di bidang penerbit dan percetakan, konsultasi psikologi dan juga Property, yang ditekuninya sampai dengan saat ini. Pria yang menamatkan Magister Managemen di STIE Widya Jayakaarta Jakarta tahun 2004 ini selain sebagai dosen dan peneliti, aktif mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai Dosen tetap. Ia juga mengajar Magister Psikologi di Universitas Semarang (USM) untuk mata kuliah Psikopatologi Masyarakat Perkotaan. Mengajar psikologi Sosial di Universitas Esa Unggul, dan membimbing Tesis Magister Psikologi Unair.

Pria berpenampilan sederhana yang menyelesaikan study Doktor Ilmu Psikologi dari Universitas Persada Indonesia pada tahun 2014 ini telah menerbitkan berbagai buku. Selain buku Teori dan Variabel Baru Dalam Psikologi Industri dan Organisasi ini, dirinya juga menerbitkan banyak buku seperti Psikologi Konseling, Psikologi Kepolisian, Psikologi Berlalu Lintas, Psikologi Sosial Kontemporer,

Psikologi Kriminal, Ide Bunuh Diri dan Cara Penanggulangannya, Pengendalian Intensi Turn Over-Sebuah Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan juga beberapa buku lainnya. dan sampai dengan saat ini merupakan konsultan dari berbagai perusahaan dan instansi. Yang bersangkutan bisa dihubungi melalui E-Mail: tugimin.supriyadi@gmail.com dan melalui WA 081 3277 82668. (TS)

Dr. Ecep Supriatna, S.Psi., M.Pd



Dr. Ecep Supriatna, S.Psi., M.Pd., yang akrab disapa Kang Ecep, merupakan seorang dosen, akademisi, dan peneliti yang memiliki konsentrasi keilmuan pada Psikologi Pendidikan. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Psikologi Pendidikan pada Universitas Negeri Malang, setelah sebelumnya menempuh dua jenjang pendidikan magister, yakni Magister Psikologi Pendidikan dan Magister Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Latar belakang akademik yang multidisipliner tersebut membentuk perspektif keilmuan Kang Ecep yang integratif antara pendekatan psikologis, pedagogis, dan konseling dalam konteks pendidikan.

Dalam kiprahnya di dunia profesional, Kang Ecep saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia

(APPI) Wilayah Jawa Barat, sebuah posisi strategis yang memperkuat perannya dalam pengembangan dan pengarusutamaan Psikologi Pendidikan di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Pembina Yayasan Obor Inspirasi Indonesia, yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan karakter, dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai psikologis dan edukatif.

Fokus keilmuan dan riset Kang Ecep meliputi berbagai isu strategis dalam Psikologi Pendidikan, antara lain pengembangan keterampilan sosial peserta didik, kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*), pembelajaran sosial emosional (*social-emotional learning*), serta asesmen dan pengukuran psikologis dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal. Penelitian-penelitian yang beliau lakukan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif, dengan tujuan memberikan kontribusi nyata terhadap praktik pendidikan, layanan bimbingan dan konseling, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Sebagai akademisi produktif, Kang Ecep telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi serta jurnal nasional terindeks SINTA, yang membahas isu-isu kontemporer dalam Psikologi Pendidikan dan pengembangan peserta didik. Selain artikel jurnal, beliau juga menulis sejumlah buku akademik yang banyak digunakan oleh mahasiswa dan praktisi

pendidikan, di antaranya Praktik Konseling Bagi Pemula (2025) dan Metode Penelitian Bagi Pemula (2023), yang dikenal karena pendekatannya yang sistematis, aplikatif, dan mudah dipahami.

Di luar aktivitas penelitian dan penulisan, Kang Ecep secara konsisten terlibat sebagai narasumber, pemateri, dan fasilitator dalam berbagai kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, serta pelatihan pengembangan profesional bagi pendidik, konselor, dan mahasiswa. Melalui berbagai peran tersebut, beliau terus berupaya menjembatani dunia akademik dengan praktik lapangan, serta memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pengembangan ilmu psikologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan kesejahteraan psikologis masyarakat secara luas.



ISBN 978-623-97210-2-2



9

786239

721022